



Australian Government

BIMBINGAN TEKNIS

# Peningkatan Kompetensi Camat Dalam Peningkatan Kesejahteraan melalui Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

BUKU PEGANGAN PESERTA



**KOMPAK**  
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan



---

BIMBINGAN TEKNIS

---

# **Peningkatan Kompetensi Camat Dalam Peningkatan Kesejahteraan melalui Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

---

BUKU PEGANGAN PESERTA

---

**KOMPAK**

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan  
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

**BUKU PEGANGAN PESERTA  
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI CAMAT DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MELALUI  
PELAYANAN DASAR DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

ISBN: 978-623-95507-1-4

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2018 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

**Pembina**

Sugiarto, S.E., M.Si

Dr. Drs. Rizari, M.B.A., M.Si

Anom Surahno SH., M.Si.

**Tim Penyusun Provinsi Jawa Timur**

Drs. Anang Triono, MM

Diyah Wetdiningtyas, S.Gz

Dwi Mardiana, S.STP, M. Si

Gitadi Tegas Supramudyo

Dr. Hary Wahyuni

Much. Taufik, SH, M. AP

Ir. Rubi Santoso, MT

Wahyudi Ismail Saputra, S. IP

**Tim Penyusun KOMPAK**

I. Made Utama, Dip.SD, S.E., M.B.A., M.M.

Entin Sriani Muslim, S.Psi., M.T.

Drs. Budi Maryono, M.M.

Arry Chandra Kurnia, S.T., M.H.

**Kontributor**

Agus Sarwo

Edhi Kurniawan Wahid

Danis Sriwijaya

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini. Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini dapat disalin dan disebarluaskan untuk tujuan non-komersial. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, silakan menghubungi [communication@kompak.or.id](mailto:communication@kompak.or.id)

Publikasi juga tersedia di [www.kompak.or.id](http://www.kompak.or.id)

**KOMPAK (Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia)**

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

# DAFTAR ISI

---

Kata Pengantar	v
Sambutan Gubernur Jatim	vi
<b>Modul 01</b> Perkenalan dan Kontrak Belajar	<b>1</b>
<b>Modul 02</b> Peningkatan Kesejahteraan Berbasis Hak	<b>20</b>
<b>Modul 03</b> Kepemimpinan Camat Sigap dan Cakap	<b>46</b>
<b>Modul 04</b> Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Berbasis Hak	<b>64</b>
<b>Modul 05</b> Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	<b>82</b>
<b>Modul 06</b> Pemerintahan Umum	<b>106</b>
<b>Modul 07</b> Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa	<b>120</b>
<b>Modul 08</b> Pelayanan Terpadu Kecamatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	<b>144</b>
<b>Modul 09</b> Koordinasi Kegiatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	<b>156</b>
<b>Modul 10</b> Menyusun Rencana Aksi	<b>170</b>



# KATA PENGANTAR

---

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga modul Bimbingan Teknis (BIMTEK) Peningkatan Kapasitas Camat dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pelayanan Dasar dan Ekonomi Produktif Provinsi Jawa Timur telah selesai disusun. Modul BIMTEK ini mengadopsi Modul BIMTEK Nasional yang disusun oleh Direktorat Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang didukung oleh KOMPAK. Modul ini digunakan untuk pelatihan kepada camat dalam rangka meningkatkan kapasitasnya untuk meningkatkan kualitas akses dan mutu pelayanan dasar dan ekonomi produktif di Provinsi Jawa Timur.

Peningkatan kapasitas camat ini sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 sejalan dengan pertimbangan penting hadirnya kecamatan dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan pada prakteknya menjadi representasi dari pemerintah pada level yang lebih tinggi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kedudukan yang strategis ini membuat kecamatan berperan penting dalam hal koordinasi, fasilitasi, serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Terdapat ruang yang cukup besar bagi kecamatan untuk berperan lebih optimal dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin dan rentan. Untuk dapat menjalankan peran kecamatan yang diharapkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar, camat dan perangkatnya perlu ditingkatkan kapasitasnya sehingga mampu menjalankan kewenangannya dengan optimal sehingga mampu menanggulangi kemiskinan melalui penyelenggaraan pelayanan dasar dan ekonomi produktif.

Hasil modul ini juga menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas camat dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan selain dibutuhkannya pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat. Kedua hal tersebut dibutuhkan untuk mendukung peran kecamatan dalam (i) pelaksanaan mekanisme akuntabilitas penyedia layanan terhadap masyarakat; (ii) pendataan untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran; dan (iii) pembinaan dan pengawasan desa dan kelurahan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk penyelenggaraan pelayanan dasar. Semoga modul ini ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur khususnya masyarakat miskin dan rentan agar dapat memperoleh pelayanan dasar yang berkualitas.

Terima kasih.

Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama  
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan  
Kementerian Dalam Negeri,

**Sugiarto, SE, M.Si**

# SAMBUTAN GUBERNUR JATIM

---



*Assalamualikum wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga modul pelatihan teknis bagi camat di Provinsi Jawa Timur ini telah selesai disusun.

Sebagaimana kita ketahui bersama, arah kebijakan dan strategi pembangunan lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019 mengamanatkan perluasan dan peningkatan pelayanan dasar sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Penduduk miskin dan rentan menjadi prioritas pelayanan dasar sehingga kualitas taraf hidupnya meningkat. Oleh karena itu, diperlukan upaya holistik, integratif, tematik, dan tepat lokus dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, serta lembaga non-pemerintah lainnya untuk bersama-sama mewujudkan prioritas pembangunan tersebut. Selain itu, pemerintah daerah serta jajarannya juga wajib mendukung pelaksanaan strategi peningkatan pelayanan dasar di tingkat kecamatan, sebagai amanat Undang-Undang (UU) nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Melalui UU ini, camat juga menerima tugas delegatif yaitu tugas pelimpahan dari bupati/walikota atas urusan-urusan konkuren yang dimilikinya. Demikian pula, pada Permendagri No. 4 tahun 2010, camat mendapatkan mandat melaksanakan pelayanan publik di kecamatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kompetensi camat yang cukup merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan kecamatan yang sigap dan tanggap untuk merespon dinamika di masyarakat.

Serangkaian regulasi yang ada menunjukkan bahwa: (1) Camat dituntut untuk menguasai keterampilan untuk melaksanakan tugas koordinasi dan fasilitasi kepada perangkat daerah yang ada di kecamatan, instansi vertikal kecamatan, desa dan tokoh agama/masyarakat dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan yang ada di kecamatan, (2) Camat dituntut untuk mempunyai kepekaan sosial dalam memetakan hak-hak masyarakat yang dapat dipenuhi melalui pelayanan

publik. Apabila kedua hal tersebut dimiliki oleh para camat maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kecamatan yang besar, yaitu sebanyak 666 kecamatan. Memastikan bahwa semua camat di Provinsi Jawa Timur telah memenuhi 3 syarat kompetensi (manajerial, sosio kultural, dan teknis) sebagaimana amanat Permenpan RB No. 38 Tahun 2017 tentang *Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)* merupakan tantangan bagi semua pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, diperlukan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur dalam membina dan mengawasi Camat secara berkesinambungan khususnya melalui rangkaian pelatihan teknis yang dilengkapi dengan seperangkat modul pelatihan.

Untuk mencapai hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah bekerjasama dengan Direktorat Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri yang didukung oleh KOMPAK Provinsi Jawa Timur telah menyusun 10 modul pelatihan, yaitu :

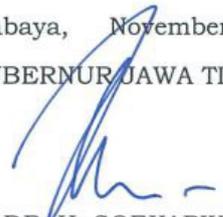
1. Perkenalan / muqodimah
2. Peningkatan kesejahteraan berbasis hak;
3. Kepemimpinan camat sigap dan cakap;
4. Penyelenggaraan pelayanan dasar berbasis hak
5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
6. Pemerintahan umum
7. Binwas penyelenggaraan kegiatan desa
8. Pelayanan terpadu kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
9. Koordinasi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
10. Penyusunan rencana aksi

Kesepuluh modul ini diharapkan dapat membantu berbagai pihak yang ingin mengembangkan kualitas SDM aparatur pemerintahan, terutama aparatur camat dan sekretaris camat sehingga mampu berkontribusi bagi terwujudnya ASN di tingkat daerah yang profesional sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat.

*Wassalamualikum Wr. Wb*

Surabaya, November 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

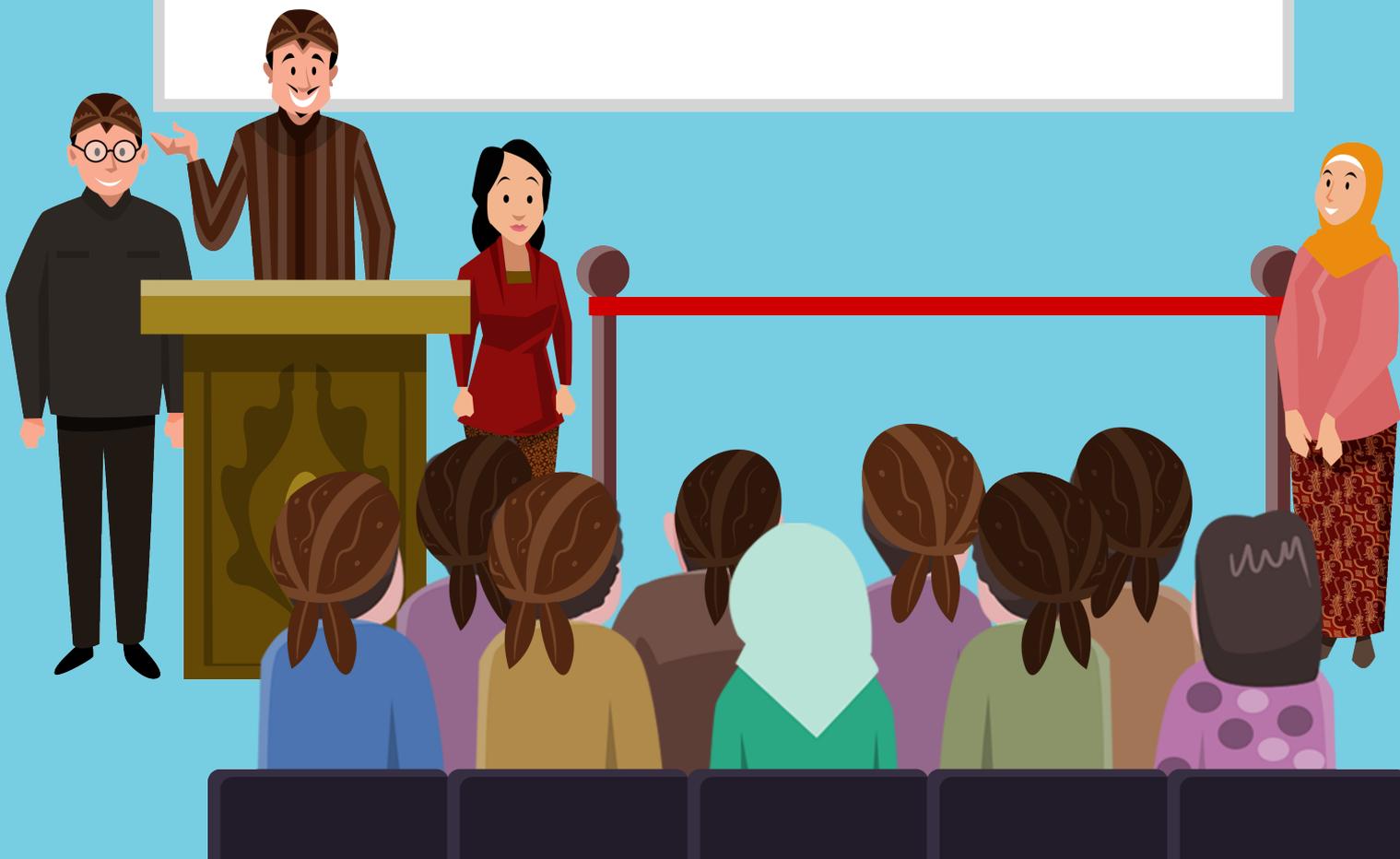


DR. H. SOEKARWO

MODUL

01

# PERKENALAN DAN KONTRAK BELAJAR





### **Materi Bahasan:**

- 1.1. Perkenalan dan Pengorganisasian Peserta
- 1.2. Ungkapan Harapan dan Kontribusi Peserta
- 1.3. Latar Belakang, Tujuan dan Proses BimTek



### **Kompetensi Dasar:**

#### A. KOMPETENSI PEMERINTAHAN:

1. (O.841120.031.01) Menjalin Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan
2. (O.841120.042.01) Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik

#### B. KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL:

1. M.01 Integritas
2. M.02 Kerjasama
3. M.03 Komunikasi
4. M.06 Pengembangan Diri dan Orang Lain
5. M.08 Pengambilan Keputusan
6. SK.01 Perikat Bangsa

#### C. KOMPETENSI TEKNIS Terkait pelaksanaan tugas camat, guna mendukung penanggulangan kemiskinan:

1. Fasilitasi
2. Koordinasi



### **Perubahan yang Diharapkan:**

#### **Peserta BimTek:**

1. Lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran BimTek
2. Terciptanya suasana belajar yang kondusif dan partisipatif.
3. Terbangunya suasana kerjasama antara peserta, fasilitator dan penyelenggara untuk mengikuti BimTek dengan serius



### **Waktu:**

3 JP ( Jam Pelajaran ) @ 45 menit = 135 menit



## 1. LATAR BELAKANG

Materi ini mengajak peserta untuk saling berkenalan sesama peserta, peserta dengan fasilitator dan peserta dengan penyelenggara melalui interaksi antara peserta, fasilitator dan penyelenggara pelatihan. Materi ini adalah bahagian dari pondasi untuk menjalankan pelatihan dan saling membangun komitmen semua peserta. Peserta juga mengetahui latar belakang, tujuan dan semua materi yang akan diberikan pada pelatihan ini. Adapun yang melatar belakangi materi ini adalah :

1. Pembelajaran orang dewasa mengharuskan semua warga belajar untuk saling mendukung dan bekerjasama dalam mencapai tujuan pembelajaran.
2. Perkenalan dan membangun suasana akrab merupakan bagian dari pemecah kekakuan antar peserta, peserta dengan fasilitator dan panitia sehingga tercipta suasana saling pengertian, partisipatif dan dinamis.
3. Suasana yang dinamis antar warga belajar akan menimbulkan proses pembelajaran yang santai, menyenangkan dan efektif untuk mencapai tujuan dari pelatihan itu sendiri.
4. Pelatihan ini adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas peserta dalam peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
5. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan Camat memiliki peran dan kewenangan strategis sebagaimana diamanatkan oleh UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan No 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memastikan efektifitas pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan di wilayah kerjanya.



## 2. TUJUAN

Modul 1, bertujuan untuk membuat peserta BimTek saling mengenal sesama peserta, dengan fasilitator dan penyelenggara pelatihan, serta membangun semangat kekompakan dengan membuat motto/semboyan, selanjutnya dapat menyepakati kepengurusan kelas dan aturan pembelajaran, mengungkapkan harapan dan kontribusi yang diberikan selama belajar, serta memahami latar belakang, tujuan dan proses BimTek.

Tujuan Modul ini akan dicapai melalui pencapaian tujuan pada berbagai materi bahasan modul. Tujuan masing-masing materi bahasan berikut indikator pencapaiannya adalah sebagai berikut:

## Materi Bahasan 1.1

Perkenalan dan Pengorganisasian Peserta

### Tujuan Materi Bahasan

Peserta dapat saling mengenal dan terbentuknya kesepakatan kepengurusan kelas dan aturan main pembelajaran.

### Indikator Pencapaian Tujuan

1. Fasilitator, peserta dan penyelenggara saling mengenal
2. Terciptanya suasana belajar yang;
  - Kondusif
  - Partisipatif
3. Terbangunnya kerjasama antar peserta, fasilitator dan penyelenggara

## Materi Bahasan 1.2

Ungkapan harapan dan kontribusi peserta

### Tujuan Materi Bahasan

Peserta dapat mengungkapkan harapan atas pembelajaran dan berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang mendukung proses dan tujuan pembelajaran, serta membangun semangat kekompakan dengan motto/semboyan dan aturan main pembelajaran.

### Indikator Capaian

1. Peserta lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran BimTek.
2. Peserta mengikuti BimTek dengan serius dan aktif

## Materi Bahasan 1.3

Latar Belakang, Tujuan dan Proses BimTek

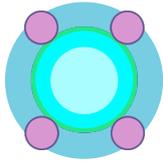
### Tujuan Materi Bahasan

Peserta memahami pentingnya BimTek bagi Camat, tujuannya dan bagaimana proses dan tahapan BimTek yang akan dilaksanakan

### Indikator Capaian

Peserta dapat menjelaskan:

- Pentingnya BimTek.
- Tujuan BimTek
- Proses BimTek



### 3. KERANGKA MATERI MODUL 1



Pembelajaran orang dewasa mensyaratkan semua peserta, pelatih dan penyelenggara harus saling mengenal dengan akrab satu sama lainnya, sehingga akan tercipta suasana belajar yang gembira dan menyenangkan. Pembelajaran orang dewasa harus menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Menghilangkan hambatan dalam pembelajaran orang dewasa adalah dengan membangun komitmen sejak dari mulai awal pembelajaran. Bentuk komitmen yang dihasilkan adalah tersusunnya kepengurusan dan tata tertib kelas.

Aspek lainnya tentang pembelajaran orang dewasa adalah bagaimana orang dewasa mengetahui materi-materi apa yang akan di pelajarnya, selanjutnya akan menilai apakah materi tersebut akan membantu mereka dalam meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kebutuhan akan perbaikan kapasitas tersebut dituangkan dalam bentuk harapan yang didapat pada saat mengikuti pelatihan serta upaya untuk mencapai harapan tersebut dengan memberikan kontribusi dan dukungan untuk proses pembelajaran itu sendiri.





## 4. TAHAP-TAHAP PEMBELAJARAN

Tahapan-tahapan pembelajaran yang akan dialami oleh Peserta adalah sebagai berikut:



Proses lengkap pada setiap tahap pembelajaran adalah sebagai berikut

### TAHAP 1:

#### Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Dan Kerangka Konsep Materi Bahasan

Peserta diajak untuk memahami latar belakang, tujuan dan konsep materi modul 1 yang merupakan bagian yang sangat penting pada awal pembelajaran. Pada tahap ini peserta diajak untuk membangun dinamika kelas yang gembira dan menyenangkan. Untuk itu peserta juga diminta untuk berkomitmen untuk saling belajar dan berbagi pengalaman terhadap semua warga belajar.

### TAHAP 2:

#### Permainan untuk perkenalan dan interaksi peserta

Pada tahapan ini peserta diajak untuk saling berinteraksi diantara peserta, peserta dengan fasilitator dan penyelenggara pelatihan sehingga akan terjadi saling mengenal semua warga belajar. Proses ini dilakukan dengan permainan yang melibatkan semua peserta, fasilitator dan penyelenggara. Perkenalan diharapkan akan mengetahui nama, asal daerah atau lainnya sesuai dengan kesepakatan yang dibangun pada tahap ini.

<p><b>Tujuan Perkenalan</b></p>	<p>Perkenalan pada proses awal BimTek dalam rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Saling mengenal antara peserta dengan peserta, peserta dengan fasilitator atau pelatih, dan peserta dengan panitia penyelenggara.</li> <li>● Menjalin hubungan kekeluargaan dan keakraban di antara peserta, fasilitator dan panitia penyelenggara</li> </ul>
<p><b>Manfaat Perkenalan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Saling mengenal identitas pribadi masing-masing peserta.</li> <li>● Menciptakan keakraban dan kekeluargaan.</li> <li>● Menciptakan suasana gembira.</li> <li>● Mencairkan kekakuan suasana dan perilaku antara peserta.</li> <li>● Menciptakan kerjasama dan saling menghargai</li> </ul>
<p><b>Cara Perkenalan</b></p>	<p>Perkenalan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan berbagai permainan. Hal ini sangat tergantung pada waktu yang tersedia. Makin sempit waktu yang tersedia maka perkenalan perlu dilakukan lebih singkat dan sederhana, demikian juga sebaliknya. Cara perkenalan yang dipraktekkan pada BimTek ini dengan permainan BINGO. Panduan untuk permainan BINGO sebagai berikut</p>
<p><b>Perkenalan dengan permainan BINGO</b></p>	<p>Petunjuk Permainan Bingo</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitator membagikan ke masing-masing peserta satu lembar permainan BINGO</li> <li>b. Fasilitator meminta masing-masing peserta untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mengisi lembar BINGO dengan bertanya kepada temannya apabila kata kata di lembar BINGO sesuai dengan apa yang dimiliki temannya, nama temannya ditulis di lembar BINGO tersebut.</li> <li>● Dilanjut bertanya kepada teman berikutnya agar lembar BINGO diisi nama teman lainnya sehingga terisi penuh secara horizontal, vertikal maupun diagonal</li> <li>● Yang sudah dapat mengisi lembar BINGO baik secara horizontal, atau vertikal maupun diagonal, dianjurkan berteriak BINGO.</li> </ul> </li> <li>c. Permainan selesai apabila semua peserta telah sampai pada tahap BINGO.</li> </ol>

## TAHAP 3:

### **Pengorganisasian peserta**

Pada tahapan ini peserta diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan kepengurusan kelas yang akan bertanggungjawab terhadap pengelolaan kelas selama proses BimTek.

### **Kepengurusan Kelas**

Kepengurusan kelas dipilih dari unsur peserta pelatihan terdiri dari Ketua Kelas, Seksi Evaluasi, Seksi Bina Suasana, Seksi Waktu, dan dapat ditambah seksi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan peserta.

## TAHAP 4:

### **Ungkapan Harapan dan Kontribusi Peserta melalui Pohon Harapan sebagai Alat Evaluasi Pembelajaran dan membuat Komitmen Bersama selama BimTek**

Setiap peserta tentunya memiliki harapan-harapan dalam BimTek ini tetapi juga memiliki pengalaman-pengalaman yang dapat dibagikan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu pada tahap ini masing-masing peserta diminta untuk mengungkapkan harapan dan kontribusi dengan acuan sebagai berikut

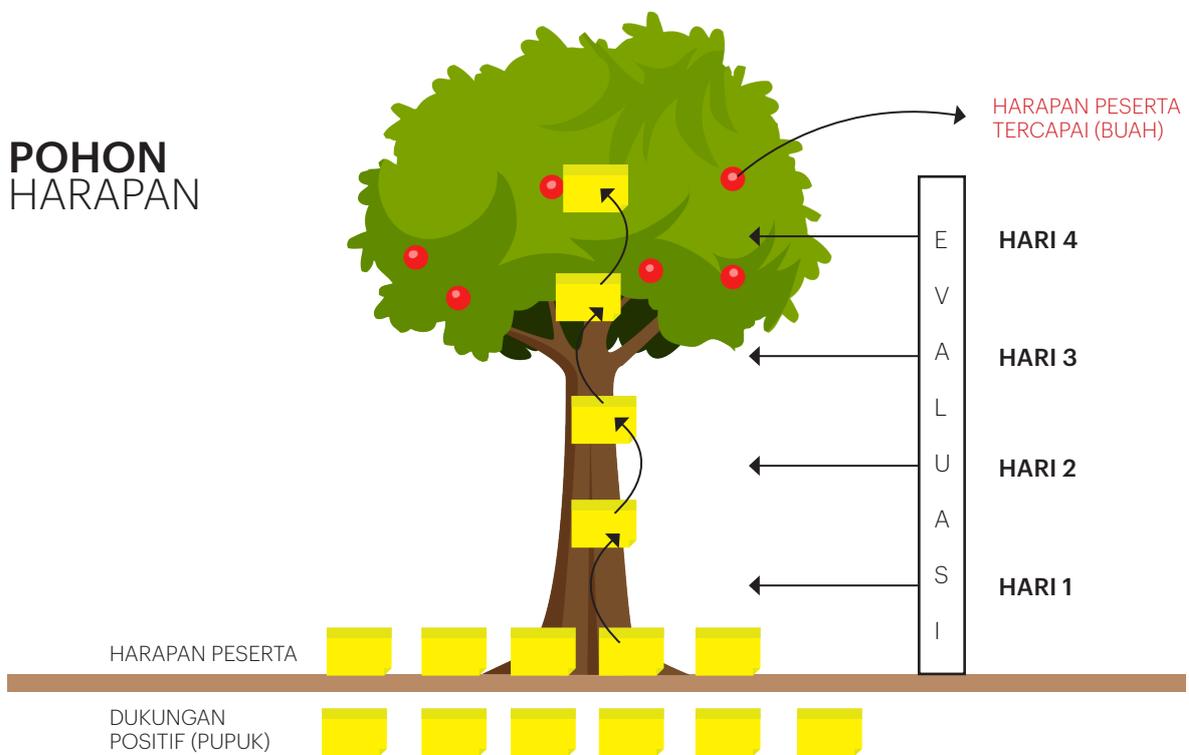
### **PANDUAN POHON HARAPAN**

#### **Pendahuluan**

Harapan yang dimaksud adalah berupa hasil yang dirumuskan oleh para peserta sebagai output dari pelaksanaan kegiatan BimTek, biasanya berupa tambahan pengetahuan, ketrampilan dan sikap sebagai bagian dari peningkatan kualitas diri. Sedangkan kontribusi adalah berupa dukungan terbaik yang bisa diberikan oleh masing-masing peserta selama proses kegiatan BimTek berlangsung, biasanya berupa disiplin, terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan dan lainnya. Harapan dan kontribusi peserta akan di gunakan sebagai salah satu instrumen evaluasi harian yang dilaksanakan rutin setiap hari setelah kegiatan BimTek dilaksanakan dan instrumen evaluasi akhir BimTek.

Harapan dan kontribusi yang telah diungkapkan akan dipakai sebagai alat untuk melakukan evaluasi ini melalui pola partisipatif setiap harinya oleh peserta BimTek dengan menggunakan pohon harapan dengan cara sebagai berikut:

## POHON HARAPAN



### Evaluasi Peserta BimTek

Evaluasi harapan dilakukan setiap hari pada akhir sesi (sore hari) dan difasilitasi oleh pengurus kelas yang telah terpilih dengan cara:

- Semua peserta menilai secara mandiri ketercapaian harapannya masing-masing.
- Semua peserta akan memindahkan harapannya ke bagian atas sesuai dengan tingkat ketercapaiannya masing-masing. Misalnya:
  - Hari pertama, karena pelatihan baru dimulai, namun peserta melihat mulai ada tanda bahwa harapannya akan tercapai, maka harapannya dinaikkan ke batang bagian bawah pohon, kira-kira 10-15 cm dari letak awalnya.
  - Hari kedua, setelah peserta mengevaluasi harapannya, kemudian mereka kembali menaikkan harapannya, sesuai dengan tingkat ketercapaiannya.
  - Hari ketiga, setelah mengevaluasi harapannya, maka peserta akan melakukan hal yang sama seperti hari pertama dan kedua.
  - Hari keempat, peserta juga diminta melakukan evaluasi terhadap harapannya, kemudian mereka kembali menaikkan harapannya, pada tahap ini merupakan hari terakhir pelaksanaan BimTek diharapkan semua harapan yang ada telah berada di area daun (menjadi buah dari pelatihan).
  - Namun demikian, apabila ada diantara harapan yang menurut peserta sama sekali tidak ada tanda pencapaiannya, maka harapan tersebut akan tetap berada akar pohon harapan.

**Evaluasi Dukungan Peserta**

Buatlah penilaian bersama terhadap berbagai kontribusi yang ingin diberikan peserta sesuai dengan apa yang telah mereka tempelkan dibagian tanah pohon harapan. Penilaian tersebut berkaitan dengan hal-hal yang sudah baik dan yang masih perlu ditingkatkan, agar kegiatan belajar mengajar pada hari berikutnya dapat berlangsung dengan baik.

**Komitmen Bersama selama BimTek**

Membuat kesepakatan aturan pelaksanaan BimTek difasilitasi oleh pengurus kelas, dapat berupa komitmen bersama.

Komitmen bersama adalah janji/kesanggupan bersama yang dilandasi oleh :

- Nilai,
- Norma,
- Kendali yang ditentukan bersama dalam mencapai sesuatu yang diinginkan.

**Contoh**

NILAI	NORMA	KONTROL BERSAMA	KOMITMEN
Kejujuran	Tidak mengambil hak orang lain  Berani mengakui kesalahan dan terbuka untuk dikritik	Saling mengingatkan dalam suasana keterbukaan	Dengan semangat kebersamaan yang dilandasi kejujuran dan tanggung jawab,  BimTek Peningkatan Kapasitas Camat Tahun 2018
Kebersamaan	Konsisten terhadap peraturan dan tetap menghormati pendapat orang lain  Meringankan beban bersama dan menjalin keakraban, dgn panggilan yang pantas	Membina jiwa korsa dan dilarang menolak tugas	
Tanggung jawab	Mengetahui, memahami, melaksanakan tugas dan kewajiban tepat waktu serta tepat sasaran  Tertib dan disiplin dalam melaksanakan tugas	Denda Rp. 5.000,- untuk setiap pelanggaran	

## TAHAP 5:

### Penjelasan latar belakang BimTek, tujuan dan proses BimTek di laksanakan

Pada tahap ini peserta akan mendapatkan penjelasan tentang latar belakang, tujuan dan proses BimTek ini akan dilaksanakan. Penjelasan dari fasilitator dapat memberikan pedoman terkait hal-hal dibawah ini sebagai berikut:

#### Latar Belakang BimTek

- Peningkatan kesejahteraan yang diamanatkan dalam RPJMN 2015 – 2019 menjadi prioritas pembangunan pemerintah pusat dan daerah bagi 40% warga miskin dan rentan.
- UU NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan peluang bagi peran baru kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
- Salah satu rekomendasi dari studi tentang kecamatan yang dilakukan oleh KOMPAK di 10 Kabupaten perlu dilakukan penguatan Kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar.
- BimTek berfokus pada 7 Kompetensi Dasar untuk mewujudkan Camat yang Sigap dan Cakap. Tujuh kompetensi dasar tersebut yaitu Koordinasi, Fasilitasi, Akuntabilitas, Pengambilan Keputusan, Membuat Kebijakan, Inovasi dan Kepemimpinan.
- Dalam rangka menggali kesenjangan kompetensi maka dilakukan TNA (*Training Needs Assessment*) partisipatif di 4 provinsi dengan pendekatan 360 derajat untuk menemukan materi dan metode BimTek sebagai dasar untuk mengembangkan modul BimTek.
- BimTek dilaksanakan secara partisipatif, menggunakan pendekatan kombinasi antara pembelajaran orang dewasa (*Andragogy*) dan *Appreciative Inquiry* serta *Experiential Learning Approach* dengan suasana belajar yang nyaman dan santai tapi tetap serius.

#### Tujuan Umum BimTek

Peningkatan kompetensi Camat dalam melaksanakan kewenangan, fungsi dan tugas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dasar berkualitas, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengelolaan kecamatan.

#### Tujuan Khusus BimTek

- Modul 1, saling mengenal sesama peserta, dengan fasilitator dan penyelenggara antara pelatihan, serta membangun semangat kekompakan dengan membuat motto/semboyan, selanjutnya dapat menyepakati kepengurusan kelas dan



aturan pembelajaran, mengungkapkan harapan dan kontribusi yang diberikan selama belajar, serta memahami latar belakang, tujuan dan proses BimTek

- Modul 2, memahami dan berkomitmen mendukung upaya peningkatan kesejahteraan guna menaggulangi kemiskinan dengan mentransformasikan pendekatan hak dalam penyelenggaraan pelayanan dasar, keadilan Jender, dan inklusi serta perlindungan dan peningkatan akses warga miskin dan rentan dalam pelaksanaan kewenangan Camat.
- Modul 3, memahami dan berkomitmen menerapkan gaya kepemimpinan transformatif berbasis hak yang Inklusif dan peka jender dalam mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengambil keputusan untuk mewujudkan Camat yang Sigap dan Cakap dalam penanggulangan kemiskinan
- Modul 4, membuat peserta BimTek dapat memahami konsep pelayanan dasar berbasis hak, serta berkomitmen untuk memastikan pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar.
- Modul 5, memahami dan mampu melakukan identifikasi potensi, serta dapat merumuskan cara mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inovatif.
- Modul 6, meningkatkan pemahaman dan kemampuan para Peserta didalam mengembangkan nilai dan prinsip-prinsip Wawasan Nusantara, Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Nasional serta penghargaan terhadap HAM, Jender dan pembangunan inklusif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Kecamatan.
- Modul 7, peserta memahami kewenangan dan tugas tugas dalam Binwas, dan pentingnya melakukan Binwas dengan pendekatan suportif serta menciptakan mekanisme dan alat BinWas termasuk pelaporan yang transparan dan efektif.
- Modul 8, peserta memahami pentingnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik di kecamatan, pemetaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menyumbang kepada kesejahteraan dan dapat didelegasikan kepada camat, serta optimalisasi dan inovasi pelaksanaan pelayanan terpadu kecamatan.
- Modul 9, peserta memahami pentingnya koordinasi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis hak serta mampu merumuskan mekanisme koordinasi tersebut, dalam rangka menggali potensi yang ada untuk peningkatan kesejahteraan warga di Kecamatan.
- Modul 10, memperkuat komitmen peserta BimTek untuk lebih peka dalam penanggulangan kemiskinan dan mampu untuk menyusun rencana aksi yang melibatkan semua unsur dalam kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

# KERANGKA MODUL BimTek PENINGKATAN KAPASITAS CAMAT DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JAWA TIMUR





## BAHAN BACAAN

### Pembelajaran Orang Dewasa

#### **Makna Pembelajaran Orang Dewasa**

Pada dasarnya “orang dewasa” memiliki banyak pengalaman baik dalam bidang pekerjaannya maupun pengalaman lain dalam kehidupannya.

Tentu saja untuk menghadapi peserta belajar yang pada umumnya adalah “orang dewasa” dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang berbeda dengan “pendidikan dan pelatihan” ala bangku sekolah, atau pendidikan konvensional yang sering disebut dengan pendekatan Pedagogis. Dalam praktek “pendekatan pedagogis” yang diterapkan dalam pendidikan dan pelatihan seringkali tidak cocok. Untuk itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih cocok dengan “kematangan”, “konsep diri” peserta dan “pengalaman peserta”. Di dalam dunia pendidikan, strategi dan pendekatan ini dikenal dengan “Pendidikan Orang Dewasa” (*Adult Education*). Selanjutnya *adult education* sering juga disebut dengan *Andragogy* dimana pertama kali oleh Alexander Kapp (1833) seorang pendidik dari Jerman, kemudian Malcolm Shepherd Knowles (1913 – 1997), seorang pendidik juga dari Amerika.

#### **Pengertian Pembelajaran Orang Dewasa**

*Andragogy* berasal dari bahasa Yunani kuno “*aner*”, dengan akar kata *andr-* yang berarti laki-laki, bukan anak laki-laki atau orang dewasa, dan “*agogos*” yang berarti membimbing atau membina, maka *andragogi* secara harafiah dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar orang dewasa.

Sedangkan istilah lain yang sering dipergunakan sebagai perbandingan adalah “*pedagogi*”, yang ditarik dari kata “*paid*” artinya anak dan “*agogos*” artinya membimbing atau memimpin. Maka dengan demikian secara harafiah “*pedagogi*” berarti seni atau pengetahuan membimbing atau memimpin atau mengajar anak.

#### **Asumsi Pokok dalam Pembelajaran Orang Dewasa**

##### **a. Konsep Diri**

Asumsinya bahwa kesungguhan dan kematangan diri seseorang, bergerak dari ketergantungan total (realita pada bayi) menuju ke arah pengembangan diri

sehingga mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri dan mandiri. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa secara umum konsep diri anak-anak masih tergantung sedangkan pada orang dewasa konsep dirinya sudah mandiri. Karena kemandirian inilah orang dewasa membutuhkan untuk mendapatkan penghargaan orang lain sebagai manusia yang mampu menentukan dirinya sendiri (*Self Determination*) dan mampu mengarahkan dirinya sendiri (*Self Direction*). Apabila orang dewasa tidak menemukan dan menghadapi situasi dan kondisi yang memungkinkan timbulnya penentuan diri sendiri dalam suatu pelatihan, maka akan menimbulkan penolakan atau reaksi yang kurang menyenangkan. Orang dewasa juga mempunyai kebutuhan psikologis agar secara umum menjadi mandiri, meskipun dalam situasi tertentu boleh jadi ada ketergantungan yang sifatnya sementara. Hal ini menimbulkan implikasi dalam pelaksanaan praktek pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan iklim dan suasana pembelajaran dan diagnosa kebutuhan serta proses perencanaan pendidikan.

#### **b. Peranan Pengalaman**

Asumsinya adalah bahwa sesuai dengan perjalanan waktu seorang individu tumbuh dan berkembang menuju ke arah kematangan. Dalam perjalanannya, seorang individu mengalami dan mengumpulkan berbagai pengalaman pahit-getirnya kehidupan, dimana hal ini menjadikan seorang individu sebagai sumber belajar yang kaya, dan pada saat yang bersamaan individu tersebut memberikan dasar yang luas untuk belajar dan memperoleh pengalaman baru. Oleh sebab itu, dalam teknologi pembelajaran orang dewasa, terjadi penurunan penggunaan teknik transmittal seperti yang dipergunakan dalam pelatihan konvensional dan menjadi lebih mengembangkan teknik yang bertumpu pada pengalaman. Dalam hal ini dikenal dengan "*Experiential Learning Cycle*" (Proses Belajar Berdasarkan Pengalaman). Hal ini menimbulkan implikasi terhadap pemilihan dan penggunaan metoda dan teknik pembelajaran. Maka, dalam praktek pelatihan lebih banyak menggunakan diskusi kelompok, curah pendapat, kerja laborator, sekolah lapangan (*field school*), melakukan praktek dan lain sebagainya, yang pada dasarnya berupaya untuk melibatkan peranserta atau partisipasi peserta pelatihan.

#### **c. Kesiapan Belajar**

Asumsinya bahwa setiap individu semakin menjadi matang sesuai dengan perjalanan waktu, maka kesiapan belajar bukan ditentukan oleh kebutuhan atau paksaan akademik ataupun biologisnya, tetapi lebih banyak ditentukan oleh

tuntutan perkembangan dan perubahan tugas dan peranan sosialnya.

Hal ini berbeda pada seorang anak, umumnya seorang anak belajar karena adanya tuntutan akademik atau biologisnya. Tetapi pada orang dewasa, kesiapan belajar ditentukan oleh tingkatan perkembangan mereka yang harus dihadapi dalam peranannya sebagai kader, pekerja, orang tua atau pemimpin organisasi.

Hal ini membawa implikasi terhadap materi pembelajaran dalam suatu pendidikan tertentu. Dalam hal ini tentunya materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan peran sosialnya.

#### **d. Orientasi Belajar**

Asumsinya, pada anak (yang belajar) orientasi belajarnya 'seolah-olah' sudah ditentukan dan dikondisikan untuk memiliki orientasi yang berpusat pada materi pembelajaran (*Subject Matter Centered Orientation*). Sedangkan pada orang dewasa, memiliki orientasi belajar cenderung berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi (*Problem Centered Orientation*). Hal ini dikarenakan belajar bagi orang dewasa merupakan kebutuhan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan keseharian, terutama dalam kaitannya dengan fungsi dan peranan sosial orang dewasa.

Selain itu, perbedaan asumsi ini disebabkan juga karena adanya perbedaan perspektif waktu. Bagi orang dewasa, belajar lebih bersifat untuk dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dalam waktu segera. Sedangkan anak, penerapan apa yang dipelajari masih menunggu waktu hingga dia lulus dan sebagainya. Sehingga ada kecenderungan pada anak, bahwa belajar hanya sekedar untuk dapat lulus ujian dan memperoleh sekolah yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan implikasi terhadap sifat materi pembelajaran atau pelatihan bagi orang dewasa, yaitu bahwa materi tersebut hendaknya bersifat praktis (menjawab kebutuhan) dan dapat segera diterapkan di dalam kenyataan sehari-hari

#### **Langkah-Langkah Pokok Dalam Proses belajar Partisipatif (Andragogi)**

Berdasarkan pada implikasi andragogi untuk praktek dalam proses pembelajaran kegiatan pelatihan, maka perlu ditempuh langkah-langkah pokok sebagai berikut:

##### **a. Menciptakan Iklim Pembelajaran yang Kondusif**

Ada beberapa hal pokok yang dapat dilakukan dalam upaya menciptakan dan

mengembangkan iklim dan suasana yang kondusif untuk proses pembelajaran, yaitu:

#### 1. Pengaturan Lingkungan Fisik

Pengaturan lingkungan fisik merupakan salah satu unsur dimana orang dewasa merasa terbiasa, aman, nyaman dan mudah. Untuk itu perlu dibuat senyaman mungkin:

- Penataan dan peralatan hendaknya disesuaikan dengan kondisi orang dewasa.
- Alat peraga dengar dan lihat yang dipergunakan hendaknya disesuaikan dengan kondisi fisik orang dewasa.
- Penataan ruangan, pengaturan meja, kursi dan peralatan lainnya hendaknya memungkinkan terjadinya interaksi sosial.

#### 2. Pengaturan Lingkungan Sosial dan Psikologis

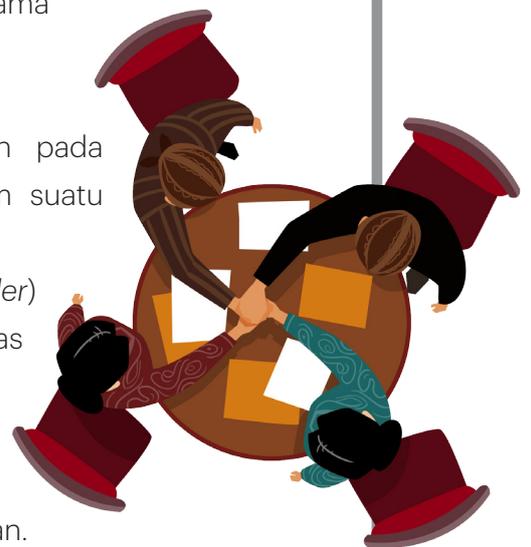
Iklim psikologis hendaknya merupakan salah satu faktor yang membuat orang dewasa merasa diterima, dihargai dan didukung. Untuk itu diperlukan:

- Fasilitator lebih bersifat membantu dan mendukung.
- Mengembangkan suasana bersahabat, informal dan santai.
- Menciptakan suasana demokratis dan kebebasan untuk menyatakan pendapat tanpa rasa takut.
- Mengembangkan semangat kebersamaan.
- Menghindari adanya pengarahannya dari siapapun.
- Menyusun kontrak belajar yang disepakati bersama

### b. Diagnosis Kebutuhan Belajar

Dalam andragogi tekanan lebih banyak diberikan pada keterlibatan seluruh warga/peserta belajar di dalam suatu proses melakukan diagnosis kebutuhan belajarnya:

1. Melibatkan seluruh pihak terkait (*stakeholder*) terutama pihak yang terkena dampak langsung atas kegiatan itu.
2. Membangun dan mengembangkan suatu model kompetensi atau prestasi ideal yang diharapkan
3. Menyediakan berbagai pengalaman yang dibutuhkan.
4. Lakukan perbandingan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang ada, misalkan kompetensi tertentu.



### c. Proses Perencanaan

Dalam perencanaan pendidikan hendaknya melibatkan semua pihak terkait, terutama yang akan terkena dampak langsung atas kegiatan pendidikan tersebut. Tampaknya ada suatu "hukum" atau setidaknya tidaknya suatu kecenderungan dari sifat manusia bahwa mereka akan merasa 'committed' terhadap suatu keputusan apabila mereka terlibat dan berperan serta dalam pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan:

1. Libatkan peserta untuk menyusun rencana pendidikan, baik yang menyangkut penentuan materi pembelajaran, penentuan waktu dan lain-lain.
2. Temuilah dan diskusikanlah segala hal dengan berbagai pihak terkait menyangkut pendidikan tersebut.
3. Terjemahkan kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi ke dalam tujuan yang diharapkan dan ke dalam materi belajar.
4. Tentukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara pihak terkait siapa melakukan apa dan kapan.

### d. Memformulasikan Tujuan

Setelah menganalisis hasil-hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan yang disepakati bersama dalam proses perencanaan partisipatif. Dalam merumuskan tujuan hendaknya dilakukan dalam bentuk deskripsi tingkah laku yang akan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas. Dalam setiap proses belajar, tujuan belajar hendaklah mencakup tiga hal pokok yakni: kognitif, afektif, dan psikomotorik.



### e. Mengembangkan Model Umum

Ini merupakan aspek seni dan arsitektural dari perencanaan pendidikan dimana harus disusun secara harmonis antara beberapa kegiatan belajar seperti kegiatan diskusi kelompok besar, kelompok kecil, urutan materi dan lain sebagainya. Dalam hal ini tentu harus diperhitungkan pula kebutuhan waktu dalam membahas satu persoalan dan penetapan waktu yang sesuai.

#### **f. Menetapkan Materi dan Teknik Pembelajaran**

Dalam menetapkan materi dan metoda atau teknik pembelajaran hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Materi pembelajaran hendaknya ditekankan pada pengalaman-pengalaman nyata dari peserta belajar.
2. Materi belajar hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan berorientasi pada aplikasi praktis. Bukan berarti materi yang disusun hanya bersifat pragmatis.
3. Metoda dan teknik yang dipilih hendaknya menghindari teknik yang bersifat pemindahan pengetahuan dari fasilitator kepada peserta, tetapi akan lebih baik jika bersifat mendorong ketajaman analisis dan metodologi.
4. Metoda dan teknik yang dipilih hendaknya tidak bersifat satu arah namun lebih bersifat partisipatif, atau dalam bahasa Freire "dialogis".

#### **g. Peranan Evaluasi**

Pendekatan evaluasi secara konvensional (pedagogi) kurang efektif untuk diterapkan bagi orang dewasa. Untuk itu pendekatan ini tidak cocok dan tidaklah cukup untuk menilai hasil belajar orang dewasa. Ada beberapa pokok dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar bagi orang dewasa yakni:

1. Evaluasi hendaknya berorientasi kepada pengukuran perubahan perilaku setelah mengikuti proses pembelajaran / pelatihan.
2. Sebaiknya evaluasi dilaksanakan melalui pengujian terhadap dan oleh peserta belajar itu sendiri (*Self Evaluation*).
3. Perubahan positif perilaku merupakan tolok ukur keberhasilan.
4. Ruang lingkup materi evaluasi "ditetapkan bersama secara partisipatif" atau berdasarkan kesepakatan bersama seluruh pihak terkait yang terlibat.
5. Evaluasi ditujukan untuk menilai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program pendidikan yang mencakup kekuatan maupun kelemahan program.
6. Menilai efektifitas materi yang dibahas dalam kaitannya dengan perubahan sikap dan perilaku.

## TAHAP 6:

### Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup

Pada tahap akhir dari pembelajaran modul 1 ini peserta diminta untuk menjawab beberapa hal sebagai berikut:

1. Apakah semua peserta sudah saling mengenal? dan siapa yang bisa menyebutkan nama peserta paling banyak?
2. Apakah telah terjadi suasana belajar yang kondusif?
3. Apakah peserta akan lebih berpartisipasi dalam setiap tahapan pembelajaran BimTek?
4. Apakah peserta akan lebih bersemangat mengikuti BimTek?
5. Apakah peserta dapat menjelaskan pentingnya mengikuti BimTek?

Selanjutnya peserta dan fasilitator secara bersama menyimpulkan pembelajaran pada modul 1 antara lain :

1. Saling mengenal antar peserta dengan peserta, fasilitator dan panitia penyelenggara adalah prasyarat utama untuk keberhasilan BimTek
2. Partisipasi aktif peserta diwujudkan melalui pengelolaan kelas dan aturan yang telah disepakati untuk dijalankan dan ditegakkan akan sangat berkontribusi terhadap tercapainya tujuan BimTek.
3. Konsistensi antara tujuan BimTek dan proses perlu dipegang bersama antara fasilitator dan peserta untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam mencapai tujuan pada setiap modul BimTek.

Proses dan Metode BimTek yang tepat digunakan dalam BimTek ini adalah pendekatan pembelajaran orang dewasa dengan mengutamakan pada experiential learning.

MODUL

02

# PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BERBASIS HAK





### Materi Bahasan:

- 2.1. Konsep peningkatan kesejahteraan berbasis hak dalam peningkatan kapasitas, penyelenggaraan pelayanan dasar, perwujudan keadilan Jender dan inklusi serta pemberian perlindungan dan peningkatan akses warga miskin dan rentan
- 2.2. Penerapan pendekatan hak pada kebijakan peningkatan kesejahteraan di Jawa Timur
- 2.3. Menstransformasikan pendekatan hak dalam peningkatan kapasitas, penyelenggaraan pelayanan dasar, keadilan jender, dan inklusi serta perlindungan dan peningkatan akses warga miskin dan rentan pada pelaksanaan tugas camat dalam upaya peningkatan kesejahteraan



### Kompetensi Dasar:

- A. Kompetensi Pemerintahan:
  1. O.841120.042.01 (Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik)
  2. O.841120.045.01 (Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan)
  3. O.841120.041.01 Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah
- B. KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL:
  1. M.01 (Integritas)
  2. M.05 (Pelayanan Publik)
  3. SK.01(Perekat Bangsa)
- C. KOMPETENSI TEKNIS Terkait pelaksanaan tugas camat, guna mendukung penanggulangan kemiskinan:
  1. Pembuatan Kebijakan
  2. Pengambilan Keputusan
  3. Keadilan Jender dan Inklusi



### Perubahan yang Diharapkan:

#### Peserta BimTek:

1. Berkomitmen untuk mendukung peningkatan kesejahteraan guna menanggulangi kemiskinan di kecamatan melalui upaya peningkatan kapasitas, penyelenggaraan pelayanan dasar, perwujudan keadilan Jender dan inklusi serta pemberian perlindungan dan peningkatan akses warga miskin dan rentan;
2. Berkomitmen untuk mentransformasikan pendekatan hak dalam peningkatan kapasitas, penyelenggaraan pelayanan dasar, keadilan Jender, dan inklusi serta perlindungan dan peningkatan akses warga miskin dan rentan pada pelaksanaan tugas camat dalam upaya peningkatan kesejahteraan



### Waktu:

4 JP ( Jam Pelajaran ) @ 45 menit = 180 menit



## 1. LATAR BELAKANG

Modul ini mengajak Peserta untuk aktif mendukung peningkatan kesejahteraan guna menanggulangi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan hak. Ajakan ini didasari oleh pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Kondisi kemiskinan dan keberadaan warga miskin dan rentan masih menjadi masalah yang terjadi di banyak kecamatan di Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Timur.
2. Kebijakan pembangunan di Indonesia (RPJP, RPJM, dan kebijakan turunan lainnya) mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi kemiskinan.
3. Pendekatan hak merupakan nilai yang paling asasi dalam penanggulangan kemiskinan.
4. Pendekatan hak dalam penanggulangan kemiskinan meliputi peningkatan kapasitas, penyelenggaraan pelayanan dasar, keadilan Jender, inklusi, serta perlindungan dan peningkatan akses bagi warga miskin dan rentan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, camat perlu mentransformasikan pendekatan hak dalam upaya peningkatan kesejahteraan atau penanggulangan kemiskinan.



## 2. TUJUAN

Modul ini bertujuan untuk membuat peserta BimTek memahami dan berkomitmen mendukung upaya peningkatan kesejahteraan guna menanggulangi kemiskinan dengan mentransformasikan pendekatan hak dalam penyelenggaraan pelayanan dasar, keadilan Jender, dan inklusi serta perlindungan dan peningkatan akses warga miskin dan rentan dalam pelaksanaan kewenangan camat.

Tujuan modul ini akan dicapai melalui pencapaian tujuan pada berbagai materi bahasan modul. Tujuan masing-masing materi bahasan berikut indikator pencapaiannya adalah sebagai berikut:

## Materi Bahasan 2.1.

Konsep peningkatan kesejahteraan berbasis hak dalam peningkatan kapasitas, penyelenggaraan pelayanan dasar, keadilan Jender, inklusi, serta pemberian perlindungan dan akses warga rentan

### Tujuan Materi Bahasan:

Membuat peserta memahami konsep kemiskinan, serta konsep penanggulangan kemiskinan berbasis hak

### Indikator Pencapaian Tujuan:

1. Peserta mampu menjelaskan kemiskinan sebagai kondisi tidak terpenuhinya hak warga, terbatasnya kapasitas, ketidakadilan Jender, dan inklusi serta terbatasnya akses dan tidak terlindunginya warga miskin dan rentan
2. Peserta mampu menjelaskan konsep penanggulangan kemiskinan yang memenuhi hak, berkeadilan Jender, inklusif, serta melindungi warga miskin, perempuan dan rentan.

## Materi Bahasan 2.2.

Penerapan pendekatan hak pada kebijakan peningkatan kesejahteraan di Jawa Timur.

### Tujuan Materi Bahasan:

Membuat peserta memahami pendekatan hak dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan (peningkatan kesejahteraan) di Jawa Timur

### Indikator Pencapaian Tujuan:

Peserta mampu menjelaskan terakomodasinya peningkatan kapasitas, pelayanan dasar, keadilan Jender, inklusi serta perlindungan dan peningkatan akses warga miskin dan rentan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur

## Materi Bahasan 2.3.

Menstransformasikan pendekatan hak, peningkatan kapasitas, penyelenggaraan pelayanan dasar, keadilan Jender, inklusi serta perlindungan dan peningkatan akses warga rentan pada pelaksanaan kewenangan Camat

### Tujuan Materi Bahasan:

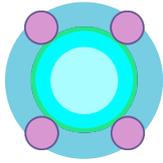
Membuat Peserta memahami:

- Tugas Camat
- Cara mentransformasikan pemenuhan hak, peningkatan kapasitas, pelayanan dasar, keadilan Jender, inklusi serta perlindungan dan peningkatan akses warga miskin dan rentan pada pelaksanaan tugas Camat

### Indikator Pencapaian:

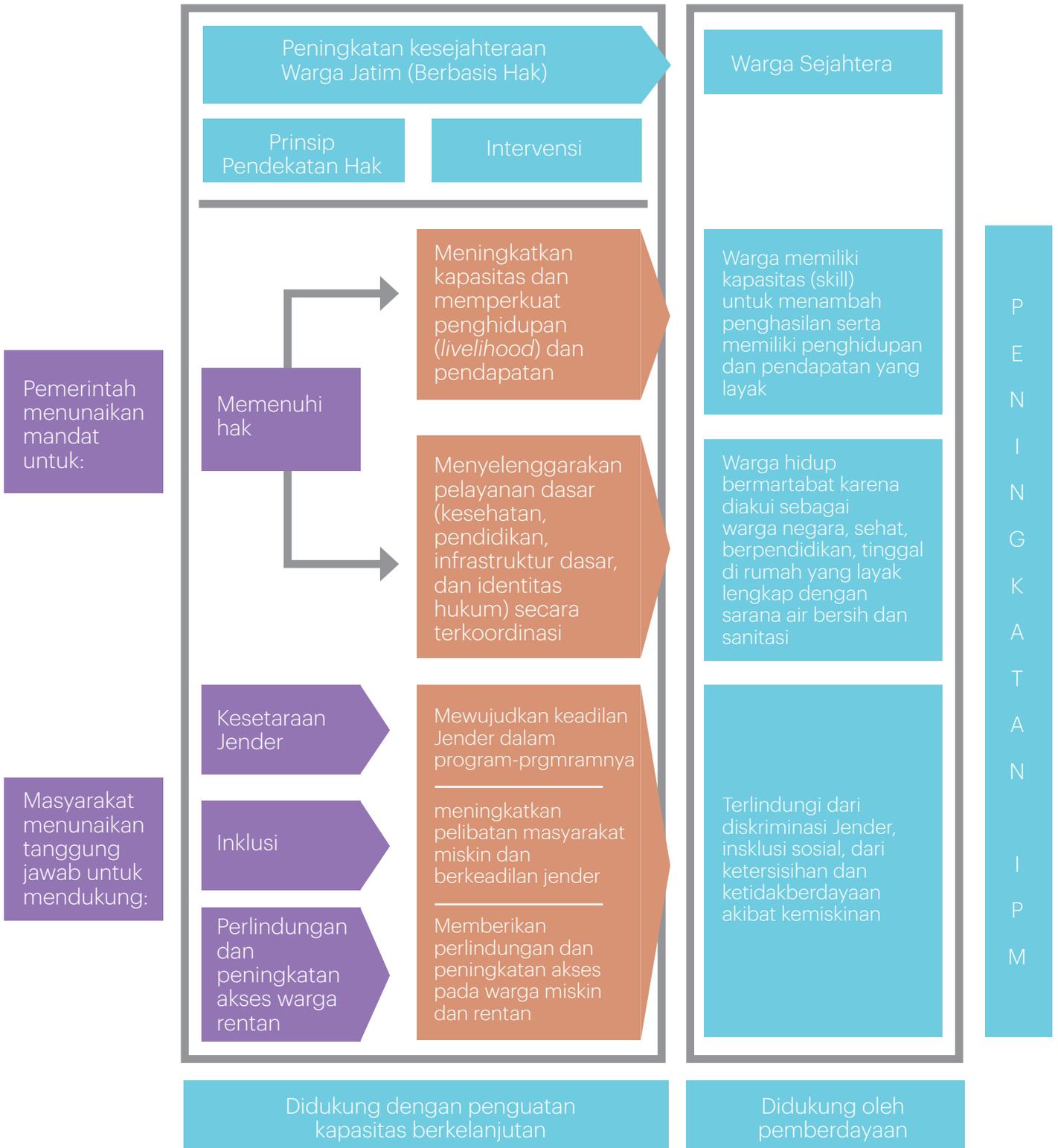
Peserta dapat:

1. menjelaskan tugas camat
2. merumuskan cara mentransformasikan pemenuhan hak, peningkatan kapasitas, pelayanan dasar, keadilan Jender, inklusi serta perlindungan dan peningkatan akses warga miskin dan rentan pada pelaksanaan kewenangan Camat



### 3. KERANGKA MATERI MODUL 2

Materi-materi yang diberikan pada Modul 2 mengikuti kerangka pikir berikut:

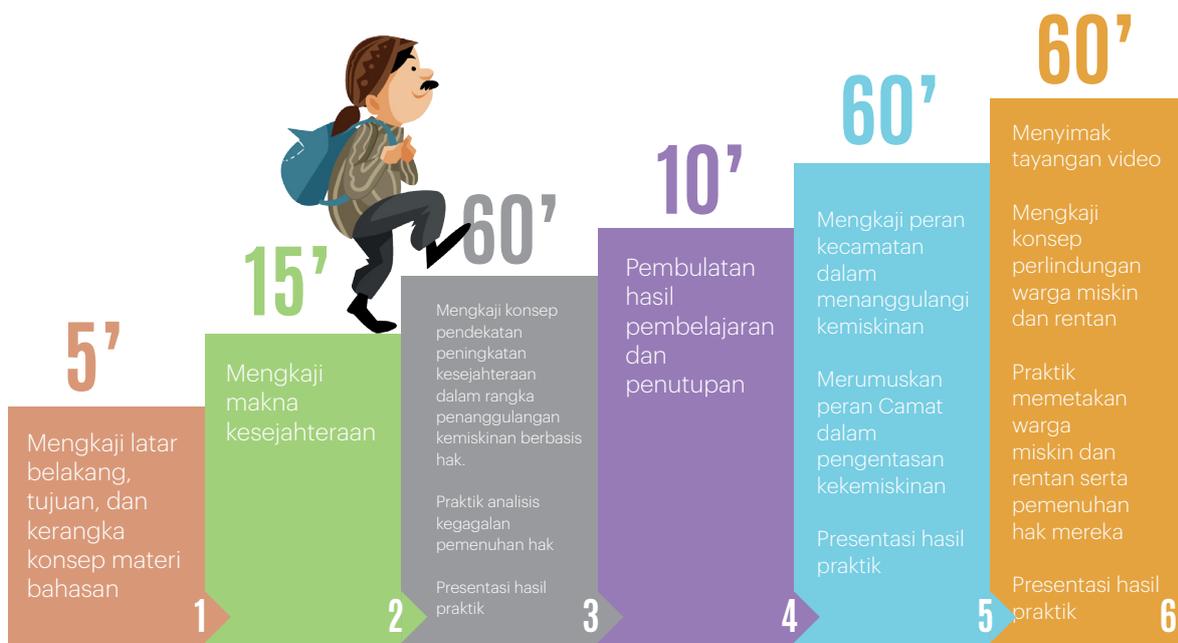


Kerangka ini akan membantu peserta memahami prinsip-prinsip peningkatan kesejahteraan berbasis hak melalui tahapan peningkatan kapasitas, pemberian ruang untuk perbaikan penghidupan, peningkatan pelayanan dasar, pemenuhan hak-hak warga miskin dan rentan serta pemberian perlindungan dan akses. Peserta akan mempelajari bagaimana prinsip pemenuhan hak, kesetaraan Jender, inklusi serta perlindungan terhadap warga miskin dan rentan dalam menanggulangi kondisi kemiskinan. Peserta juga akan mempelajari warga sejahtera yang dicirikan dengan penghidupan yang berkelanjutan, terjaminnya akses ke pelayanan dasar, serta terlindunginya warga miskin dan rentan.



## 4. TAHAP-TAHAP PEMBELAJARAN

Tahapan-tahapan pembelajaran yang akan dialami oleh Peserta adalah sebagai berikut:



Proses lengkap pada setiap tahap pembelajaran adalah sebagai berikut:

## **TAHAP 1 :**

### **Mengkaji Latar Belakang, Tujuan dan Kerangka Konsep Materi Bahasan**

Peserta akan mendapatkan gambaran mengenai latar belakang dan tujuan dari diberikannya materi mengenai peningkatan kesejahteraan dalam rangka untuk penanggulangan kemiskinan berbasis hak.

Dari pemberian gambaran ini, peserta dapat mengkomunikasikan kebutuhan belajarnya terkait topik ini. Peserta dapat menyepakati kerangka substansi materi, dan menyepakati proses pembelajarannya.

## **TAHAP 2 :**

### **Mengkaji Makna Sejahtera**

Pembelajaran pada tahap 2 dimaksudkan untuk menggali pemaknaan dan pengalaman peserta mengenai kesejahteraan. Peserta akan mendiskusikan makna sejahtera. Apakah sejahtera bermakna bahagia? Bermakna memiliki pendapatan yang aman? Bermakna terpenuhinya semua keinginan? Atau bermakna terpenuhinya semua kebutuhan? Pemaknaan dan pengalaman peserta mengenai kesejahteraan ini akan melandasi pemaknaan peserta terhadap kemiskinan, dan melandasi cara peserta akan menanggulangi kemiskinan.

Pemaknaan dan pengalaman peserta mengenai kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan ini akan dibahas lebih lanjut pada tahap 3.

## **TAHAP 3 BAGIAN A:**

### **Mengkaji Konsep Pendekatan Hak Pada Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Warga**

Pembelajaran pada tahap ini dimaksudkan untuk memperkaya pemaknaan peserta mengenai kesejahteraan, kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan atau penanggulangan kemiskinan yang menggunakan pendekatan hak serta penerapannya dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Peserta dapat memperoleh penjelasan lengkap mengenai semua materi ini pada Bahan Bacaan 2.1. Intisari dari Bahan Bacaan 2.1. ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan menjadi tantangan bagi pemenuhan hak warga. Kemiskinan dicirikan oleh kondisi kegagalan warga untuk menikmati hak-hak asasi mereka.
- 2) Penanganan kemiskinan merupakan mandat dari Pemerintah, serta juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Mandat dan tanggung jawab ini diwujudkan dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga.
- 3) Kemiskinan bersifat multi dimensi, sesuai dengan berbagai hak warga yang gagal terhormati, terlindungi, dan terpenuhi. Penanggulangan kemiskinan perlu menjawab semua dimensi ini dengan menjamin pemenuhan hak; mengupayakan pemberdayaan warga untuk mengklaim hak mereka, membangun solidaritas dan toleransi di kalangan warga; melakukan peningkatan kapasitas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak warga secara berkesinambungan; serta memberi perlindungan kepada warga miskin dan rentan.
- 4) Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia juga menerapkan pendekatan hak, dengan berupaya memenuhi hak warga atas pendapatan dan penghidupan yang layak, meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, identitas hukum, dan infrastruktur dasar), serta menyelenggarakan perlindungan sosial bagi warga miskin dan rentan.
- 5) Pemenuhan hak masyarakat merupakan upaya yang nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hak ekonomi sosial masyarakat berupa hal yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan merupakan mandat dari pemerintah untuk mewujudkannya.



## BAHAN BACAAN 2.1.

### Pendekatan Hak pada Pengentasan Kemiskinan

#### **Definisi Kemiskinan**

Kemiskinan adalah tantangan terbesar HAM saat ini. Karena kemiskinan merupakan bentuk pengingkaran yang paling serius terhadap hak warga untuk hidup secara bermakna dan terhormat. Hidup secara terhormat adalah wujud tertinggi kesejahteraan yang menjadi hak warga.

Menurut pendekatan hak, warga hanya dapat hidup secara bermakna dan terhormat jika hak-hak dasar mereka terpenuhi. Ada 10 (sepuluh) hak asasi warga yang diakui oleh masyarakat internasional, dan sudah diakui dalam Undang-Undang RI no. No. 11/2005 tentang Ratifikasi Konvenan Ekonomi, Sosial, Budaya. Kesepuluh hak asasi warga tersebut adalah :

1. Hak atas pangan
2. Hak atas kesehatan
3. Hak atas pendidikan
4. Hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha
5. Hak atas perumahan dan tempat tinggal yang layak
6. Hak atas air bersih dan sanitasi
7. Hak atas tanah
8. Hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup
9. Hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan
10. Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik

Kemiskinan menghalangi warga untuk hidup secara bermakna dan terhormat dengan membatasi kapabilitas (kemampuan) warga untuk menikmati hak asasi mereka. Seorang warga yang kelaparan karena tidak memiliki kemampuan dan pilihan untuk membeli makanan adalah warga yang miskin. Berbeda dengan warga yang kaya tapi memilih untuk berpuasa. Mereka sama-sama lapar, tapi warga miskin lapar karena tidak punya kemampuan dan pilihan.

Dengan demikian kemiskinan tidak bisa dipandang hanya sebagai kondisi kekurangan pendapatan, melainkan kondisi kekurangan kapabilitas dasar untuk menikmati hak-hak asasi mereka. Akibatnya kemiskinan menjadi dicirikan oleh banyak dimensi. Dimensi yang **pertama** adalah dimensi pendapatan. Warga miskin

biasanya memiliki pendapatan yang rendah. Dimensi yang **kedua** adalah dimensi *livelihood* / penghidupan. Warga miskin tidak memiliki aset tanah, aset sumber daya alam, dan aset-aset lain yang memungkinkan mereka melakukan aktivitas ekonomi produktif. Dimensi yang **ketiga** adalah kebutuhan dasar. Warga miskin tidak dapat mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan, sandang, papan, air bersih, dan lain-lain. Dimensi **keempat** adalah dimensi politik. Warga miskin biasanya tidak memiliki banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Mereka sering menjadi korban diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Mereka rentan terhadap tindak kekerasan dan kejahatan. Pendeknya mereka tidak berdaya untuk menikmati hak-hak asasi mereka sendiri.

### ***Hakekat pengentasan kemiskinan***

Pemahaman masyarakat mengenai berbagai dimensi kemiskinan, membuat upaya pembangunan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan. Upaya pembangunan kesejahteraan pernah berfokus pada pembangunan ekonomi.

Pembangunan kesejahteraan dengan fokus ekonomi berfokus pada peningkatan pendapatan dan cara-cara perolehan aset bernilai ekonomi. Pendekatan ini diukur dengan melihat kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan masyarakat di sebuah daerah atau negara. Akibatnya, pendekatan ini sering mengabaikan masalah kesenjangan kesejahteraan antar berbagai kelompok warga.



Pendekatan berikutnya pada pembangunan kesejahteraan adalah **pembangunan berpusat pada manusia** (*human development/people centered development*). Pendekatan ini mengupayakan perbaikan pada berbagai aspek yang menentukan tingkat kesejahteraan warga. Aspek-aspek tersebut misalnya : tingkat pendidikan, kualitas kesehatan, kualitas air bersih dan sanitasi, kualitas lingkungan tempat tinggal, tingkat keamanan pekerjaan serta pendapat, dan lain-lain.

Pendekatan berikutnya pada pembangunan kesejahteraan adalah **pembangunan berkelanjutan**. Pendekatan ini menekankan agar pembangunan ekonomi dan sosial pada saat ini tidak boleh merugikan generasi yang akan datang. Keberlanjutan kesejahteraan secara finansial, sosial, dan lingkungan harus terjamin dalam jangka panjang.

Pendekatan berikutnya pada pembangunan kesejahteraan adalah **pembangunan berkelanjutan berbasis hak**. Pendekatan ini memastikan pembangunan berkelanjutan tetap memenuhi hak-hak asasi warga. Dengan demikian, pendekatan ini mengupayakan perbaikan pada semua dimensi yang mengakibatkan kemiskinan dengan memenuhi hak warga yang terkait pada dimensi-dimensi kemiskinan tadi.

### ***Pentingnya pendekatan hak pada penanggulangan kemiskinan***

Penggunaan pendekatan hak pada pembangunan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan memiliki arti penting karena alasan-alasan berikut:

1. Pendekatan ini ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak, baik pada generasi saat ini maupun untuk generasi berikutnya secara berkelanjutan. Hak itu sendiri didefinisikan dengan membangun kesepakatan dari masyarakat internasional, melalui deklarasi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa).
2. Pendekatan ini menjamin adanya komitmen untuk memenuhi hak warga menegaskan warga negara sebagai pemilik hak (*right holder*), dan Pemerintah bersama unsur-unsur warga yang lain sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak warga (*duty bearer*). Terkait hak, kewajiban dari *duty bearer* adalah menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga.

Menghormati hak warga artinya tidak melakukan sesuatu yang dapat menghalangi warga untuk menikmati hak mereka. Melindungi hak warga artinya mencegah adanya pihak yang menghalangi warga lain untuk menikmati hak mereka. Memenuhi hak warga artinya bersikap aktif mengupayakan warga bisa menikmati hak mereka.

Semua masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga semampu yang mereka bisa lakukan. Jika mereka tidak lagi memiliki kemampuan, maka mereka dapat meminta bantuan warga lainnya, atau menuntut Pemerintah melaksanakan mandat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga. Mandat artinya, kewajiban yang bisa dituntut dan berkonsekuensi hukum jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Contohnya, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka, salah satunya dengan menyekolahkan mereka. Akan tetapi pada saat mereka kesulitan, mereka dapat meminta bantuan saudara atau warga sekitar. Jika warga sekitar gagal membantu, maka orang tua tadi dapat menuntut Pemerintah untuk menjamin pendidikan anak-anak mereka. Jika Pemerintah mengabaikan tuntutan mereka, mereka dapat mengajukan keluhan dan menuntut secara hukum atas abainya Pemerintah.



Dengan demikian, komitmen pemenuhan hak mengakui hak setiap warga, menumbuhkan tanggung jawab pada semua unsur masyarakat, dan juga memandatkan Pemerintah agar bekerja bersama dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga.

3. Pendekatan ini mewujudkan komitmen untuk memenuhi hak warga dengan memandatkan adanya standar dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak. Standar ini harus dinikmati oleh semua warga tanpa terkecuali.
4. Pendekatan ini memandatkan perlunya melindungi warga miskin dan rentan, untuk memastikan mereka dapat menikmati hak mereka. Pemerintah dan masyarakat harus secara bersama-sama berupaya lebih untuk melindungi warga miskin dan rentan.
5. Pendekatan ini memandatkan perlunya pemberdayaan warga, agar mereka mampu mengklaim hak mereka. Pendekatan ini juga memandatkan pemberdayaan kepada masyarakat pada umumnya, untuk semakin mampu menghargai, melindungi, dan memenuhi hak warga. Pemberdayaan ini penting untuk membangun kebebasan yang bertanggung jawab, kesetaraan, solidaritas, dan toleransi di kalangan masyarakat.

6. Pendekatan ini memandatkan perlunya peningkatan kapasitas Pemerintah, agar semakin mampu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga. Pemerintah juga perlu memiliki kapasitas untuk menjamin kebebasan yang bertanggung jawab, kesetaraan, solidaritas, dan toleransi di kalangan Pemerintah dan masyarakat.

### ***Pilar pendekatan hak pada pengentasan kemiskinan***

Pilar-pilar yang mengokohkan pendekatan hak pada penanggulangan kemiskinan adalah kebebasan yang bertanggung jawab, kesetaraan, solidaritas, dan toleransi. Kebebasan penting, karena warga tidak boleh tidak menikmati haknya karena dia tidak memiliki kebebasan memilih akibat tidak mampu atau karena dihalangi oleh pihak lain. Kesetaraan penting karena hak merupakan sesuatu yang dimiliki setiap warga secara lahir, sehingga harus dinikmati oleh semua warga secara setara.

Guna menjamin terwujudnya kebebasan dan kesetaraan tadi, maka diperlukan pilar solidaritas dan pilar toleransi. Dengan solidaritas seluruh warga dapat bekerja bersama melindungi warga yang rentan. Dengan toleransi, seluruh warga dapat menghargai perbedaan dan membantu yang berbeda agar tetap secara setara menikmati hak mereka.

### ***Penerapan pendekatan hak pada kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia***

Pendekatan hak ini ternyata dapat kita temukan pada kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang termuat dalam RPJMN 2014-2019 adalah:

1. Penguatan penghidupan yang berkelanjutan.  
Kebijakan ini terutama dimaksudkan untuk mengatasi masalah kurangnya pendapatan, yang merupakan penyebab kemiskinan. Beberapa kegiatan dalam program ini antara lain penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha guna menjamin warga memiliki pendapatan yang cukup. Dengan demikian program ini berkontribusi pada pemenuhan hak warga atas pekerjaan dan kesempatan berusaha.
2. Penguatan penyelenggaraan pelayanan dasar  
Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin warga menikmati pelayanan kesehatan, pendidikan, identitas hukum, dan infrastruktur dasar yang berkualitas. Artinya kebijakan ini berkontribusi pada pemenuhan hak atas kesehatan, hak

atas pendidikan, hak atas perumahan, hak atas air bersih dan sanitasi. Pelayanan identitas hukum berkontribusi sangat besar pada pemenuhan hak, karena identitas hukum membuat warga diakui kewarganegaraannya, sehingga dapat mengklaim semua haknya.

3. Pemberian Perlindungan dan Peningkatan Akses Warga Miskin dan Rentan  
Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan peningkatan akses kepada warga miskin dan rentan agar terjamin aksesnya ke pelayanan dasar dan penghidupan yang berkelanjutan. Perlindungan sosial merupakan prinsip penting dalam pendekatan hak.



## TAHAP 3 BAGIAN B:

### Praktik analisis pemenuhan hak

Peserta akan mempelajari dan menggunakan instrument kerja IK 2.1, untuk mendiagnosis kegagalan pemenuhan hak di kecamatan. IK 2.1. merupakan Instrument Kerja yang dapat digunakan Camat mendiagnosis pemenuhan hak atas: a) pendapatan dan kesempatan kerja, b) kesehatan; c) pendidikan; d) tempat tinggal yang layak, air bersih dan sanitasi digabungkan menjadi hak atas infrastruktur dasar, serta e) hak atas kepemilikan dokumen akta kelahiran yang menjadi prasyarat bagi pemenuhan semua hak warga.

## INSTRUMENT KERJA (IK) 2.1.

### DIAGNOSIS PEMENUHAN HAK DI KECAMATAN

#### Petunjuk Pengisian:

- Isikan pada baris I, Jumlah warga Anda yang belum sepenuhnya menikmati hak pada kolom (2) sampai (7)

- Isikan pada baris II, faktor-faktor yang menurut Anda menjadi penyebab warga Anda tidak menikmati hak pada kolom (2) sampai (7). Contoh faktor penyebab : warga tidak mampu membayar biaya pelayanan, tidak mampu membayar ongkos transportasi, secara fisik tidak dapat memasuki gedung pelayanan, tidak diberi ijin oleh suami atau keluarga lainnya, dan sebab-sebab lainnya.
- Isikan pada baris III, Langkah apa yang menurut Anda perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tadi. Ketika Anda mengisi baris III, Anda belum perlu memikirkan siapa yang perlu melakukan langkah tersebut.
- Baris IV tidak perlu diisi terlebih dahulu.

(1)	DIAGNOSIS KEGAGALAN MENIKMATI HAK					
	MENDAPATKAN DOKUMEN AKTA LAHIR (2)	KESEHATAN (3)	PENDIDIKAN (4)	INFRASTRUKTUR DASAR		
				PERUMAHAN (5)	AIR BERSIH (6)	SANITASI (7)
(I) Jumlah warga Anda yang belum sepenuhnya menikmati hak pada kolom (2) sampai (7)						
(II) Apa penyebab*) mereka mereka gagal menikmati hak pada kolom (2) sampai (7)?						
(III) Langkah apa yang menurut Anda perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tadi?						
IV Dengan memperhatikan kewenangan Camat, dukungan apa yang bisa Camat lakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab warga tidak menikmati hak warga?						

## TAHAP 4 BAGIAN A:

### Perlindungan dan Peningkatan Akses Warga Miskin dan Rentan

Pembelajaran pada tahap 4A ini dimaksudkan untuk memperkaya pemahaman peserta mengenai prinsip perlindungan dan peningkatan akses warga miskin dan rentan pada pendekatan hak. Peserta akan mempelajari mengapa perlindungan dan peningkatan akses warga miskin dan rentan ini penting, serta siapa saja warga miskin dan rentan dengan menyaksikan tayangan video. Fasilitator akan memberikan penjelasan lebih dalam mengenai berbagai bentuk perlindungan sosial dan peningkatan akses bagi warga miskin dan rentan. Peserta juga dapat bertukar pengalaman dengan peserta lain, mengenai keberadaan penduduk miskin dan rentan, serta sejauh mana mereka sudah terlindungi.

Peserta dapat mempelajari Bahan Bacaan 2.2. untuk mendapatkan penjelasan mengenai perlindungan warga miskin dan rentan.

## BAHAN BACAAN 2.2.

### Perlindungan dan Peningkatan Akses Warga Miskin dan Rentan

#### *Pentingnya prinsip perlindungan warga miskin dan rentan*

Perlindungan dan peningkatan akses terhadap warga miskin dan rentan merupakan prinsip penting dalam pengentasan kemiskinan berbasis hak. Karena tidak semua warga memiliki kapasitas dan kemampuan yang sama untuk menikmati hak mereka. Warga yang kurang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menikmati hak asasi mereka, dikenal sebagai warga yang rentan.

#### *Definisi warga rentan*

Warga rentan adalah warga yang: sangat mudah untuk terimbas resiko untuk tidak menikmati hak mereka, kurang memiliki kemampuan untuk menghadapi resiko tersebut, serta kurang memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai dampak negatif dari resiko tersebut. Mereka adalah:

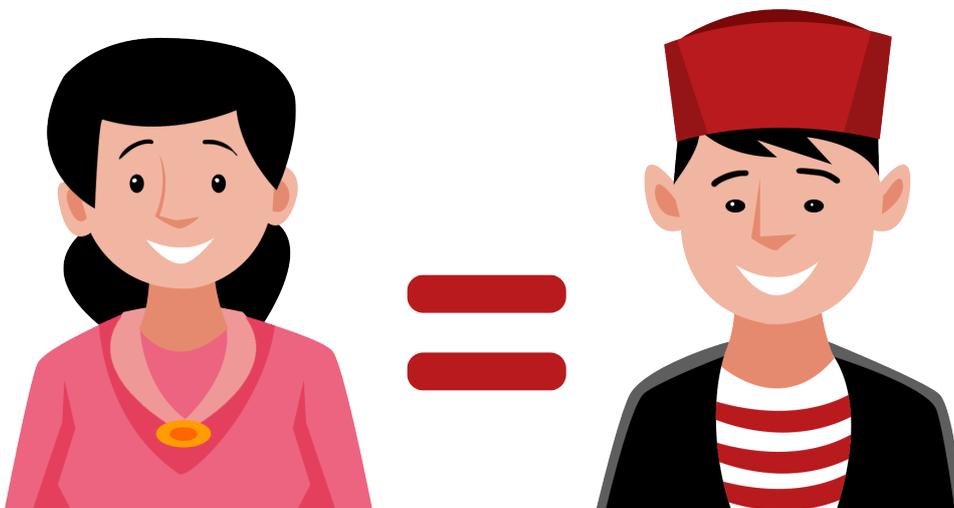
1. Warga yang mengalami kemiskinan kronis
  - Warga yang tidak mampu bekerja
  - Kelompok etnis/ agama minoritas yang sulit mengakses pekerjaan formal



- Petani tak bertanah/ buruh tani
  - Nelayan yang tidak memiliki perahu dan alat tangkap
  - Dan lain-lain
2. Warga yang rentan secara ekonomi
- Petani berlahan sempit, yang hasil taninya hanya cukup untuk keperluan sendiri (subsisten)
  - Pekerja informal berpendapatan rendah
  - Janda kepala keluarga
  - Anak yatim piatu
3. Kelompok warga lainnya yang tersisihkan atau mengalami kekerasan secara sosial
- Beberapa contoh kelompok ini adalah: kelompok etnis minoritas, kelompok agama minoritas, warga difabel, perempuan pada beberapa kelompok masyarakat, dan kelompok lainnya yang tersisihkan.

### ***Mengapa Jender menyumbang pada kerentanan***

Kesenjangan Jender dapat membuat salah satu kelompok warga (laki-laki atau perempuan) menjadi rentan. Jender adalah peran sosial yang dilekatkan oleh masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Sejatinya, laki-laki dan perempuan hanya berbeda dari sisi jenis sex nya secara fisik. Akan tetapi, masyarakat lalu mengembangkan *stereotype/* karakteristik kepribadian dan peran sosial yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap lebih emosional, kurang rasional, tidak mampu untuk melakukan pekerjaan kasar, tidak mampu memimpin, dan lain-lain.



Pembedaan kepribadian dan peran sosial yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan ini ternyata mempengaruhi akses dan kontrol mereka pada faktor-faktor yang akan menentukan tingkat kesejahteraan mereka.

Contohnya jika dalam sebuah keluarga hanya ayah yang boleh bekerja di kantor dan mendapatkan penghasilan tetap. Ibu tidak boleh bekerja dan hanya menerima sebagian penghasilan suaminya. Pemberian jatah pendapatan itu hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tidak ada uang tersisa untuk ibu, agar bisa berpakaian lebih layak, atau pergi berobat ketika sakit. Sisa penghasilan suaminya digunakan sendiri oleh suaminya tanpa sepengetahuan istri. Dalam kondisi ini, tingkat kesejahteraan ayah dan ibu yang tinggal di rumah yang sama ini ternyata berbeda.

Contoh lain :

Dalam sebuah keluarga hanya anak laki-laki yang boleh sekolah sampai SMA. Anak perempuan dianggap cukup lulus SMP, agar bisa dinikahkan cepat-cepat. Tingkat kesejahteraan anak laki-laki dan perempuan yang tinggal pada keluarga yang sama ini ternyata berbeda.

Pemenuhan hak secara setara menuntut terwujudnya kesetaraan Jender, agar laki-laki dan perempuan dapat secara setara menikmati hak-hak asasi mereka. Hal ini antara lain dilakukan dengan memberi perlindungan sosial kepada kelompok warga yang tersisihkan oleh isu jender.

### ***Inklusi sosial untuk mewujudkan kesetaraan pemenuhan hak***

Penghalang kedua yang menyumbang pada kerentanan pemenuhan hak adalah apa yang dinamakan sebagai inklusi sosial. Inklusi sosial adalah proses di mana seorang warga atau sekelompok warga tidak lagi dapat berpartisipasi aktif dalam aspek-aspek kemasyarakatan yang penting bagi kehidupan mereka. Misalnya, anak tuna netra tidak diterima sekolah, sekelompok petani miskin tidak lagi dapat menghadiri rapat-rapat warga, dan lain-lain. Proses ini disebut proses inklusi sosial.

Pemenuhan hak secara setara menuntut terjadinya inklusi sosial. Inklusi sosial adalah proses dimana masyarakat mengupayakan semua warga dari semua latar belakang dapat berpartisipasi aktif dalam aspek-aspek kemasyarakatan yang penting bagi kehidupan mereka. Misalnya, sekolah melakukan berbagai pelayanan khusus, untuk memungkinkan siswa tuna netra dapat mengikuti pelajaran di sekolah mereka. Artinya, sekolah telah melakukan upaya khusus untuk memberikan perlindungan sosial kepada kelompok difabel tuna netra.

### **Bentuk-bentuk perlindungan sosial**

Pemerintah memiliki mandat dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial kepada kelompok-kelompok rentan ini. Perlindungan tidak diberikan untuk mempertahankan mereka terus menerus dalam kerentanan. Sebaliknya, perlindungan diberikan untuk membebaskan mereka dari kerentanan, agar mereka pada akhirnya dapat secara mandiri menikmati hak mereka.

Bentuk-bentuk perlindungan sosial yang umum digunakan adalah:

#### **1. Bantuan Sosial**

Bantuan sosial diberikan kepada warga yang sangat rentan, untuk memenuhi secara langsung hak para warga ini. Contoh bantuan sosial adalah bantuan makanan, tunjangan kecacatan, tunjangan keluarga dengan orang tua tunggal, dan program bantuan sejenis.

#### **2. Asuransi Sosial**

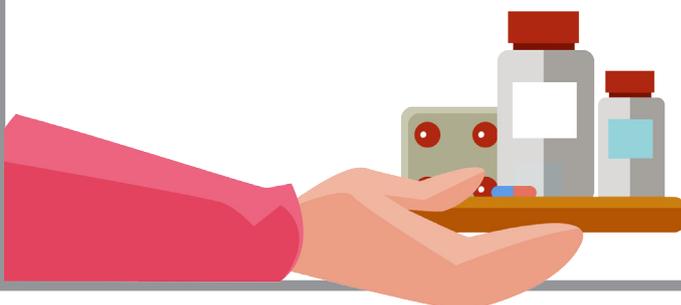
Asuransi sosial adalah bantuan iuran yang diberikan pada program yang memberikan jaminan kesejahteraan pada seluruh warga. Program jaminannya sendiri merupakan program untuk seluruh warga dengan menghimpun iuran dari seluruh warga. Akan tetapi khusus untuk warga rentan, pemerintah membayarkan iuran mereka agar mereka mendapatkan jaminan yang sama dengan warga lainnya. Contoh asuransi sosial adalah bantuan iuran BPJS, bantuan iuran Asuransi Jaminan Hari Tua, dan program sejenis lainnya.

#### **3. Pelayanan Sosial**

Program ini merupakan program untuk memberikan pelayanan tertentu kepada warga rentan. Misalnya Panti Jompo untuk memberikan pelayanan kepada warga usia lanjut yang tidak mendapat perawatan dari keluarganya. Contoh lain adalah Panti Asuhan, untuk merawat anak-anak yang tidak memiliki orang tua.

#### **4. Program Pemberdayaan Transformatif**

Program ini diberikan pada kelompok rentan untuk meningkatkan kemampuan mereka menghadapi resiko tidak ternikmatinya hak di kemudian hari. Contoh program ini adalah bantuan usaha, agar kelompok rentan ini memiliki tambahan pendapatan. Contoh lainnya adalah program pemberdayaan agar warga rentan mampu berpartisipasi dalam forum musyawarah dengan pemerintah.



## TAHAP 4 BAGIAN B:

### Pemetaan Perlindungan dan Peningkatan Akses Warga Miskin dan Rentan

Pada tahap 4 bagian B ini peserta akan mempraktikkan konsep mengenai perlindungan sosial dan peningkatan akses bagi warga miskin dan rentan dengan menggunakan Instrument Kerja (IK) 2.2. IK 2.2. dapat membantu peserta untuk memetakan penduduk rentan di wilayahnya, berikut kebutuhan perlindungan untuk mereka.

#### **INSTRUMENT KERJA (IK) 2.2. PEMETAAN WARGA MISKIN DAN RENTAN SERTA PERLINDUNGAN YANG MEREKA BUTUHKAN**

Pada IK 2.2. Anda akan diminta untuk mengidentifikasi warga miskin dan rentan dalam menikmati hak mereka. IK ini juga membantu Anda untuk merumuskan cara memberi perlindungan pada warga miskin dan rentan.

#### **Petunjuk pengisian:**

- Isikan pada baris V, kelompok rentan yang mana yang belum menikmati hak pada kolom (2) sampai (7). Anda bisa menggunakan referensi mengenai jenis-jenis kelompok rentan pada Kotak 2.1. berikut:

Box 2.1.

#### **Jenis-Jenis Kelompok Rentan**

1. Warga yang mengalami kemiskinan kronis
  - Warga yang tidak mampu bekerja
  - Kelompok etnis/ agama minoritas yang sulit mengakses pekerjaan formal
  - Petani tak bertanah
  - Nelayan yang tidak memiliki perahu dan alat tangkap
  - Dan lain-lain
2. Warga yang rentan secara ekonomi
  - Petani berlahan sempit, yang hasil taninya hanya cukup untuk keperluan sendiri
  - Pekerja informal berpendapatan rendah
  - Janda kepala keluarga
  - Anak yatim piatu
3. Kelompok warga lainnya yang tersisihkan atau mengalami kekerasan secara sosial. Beberapa contoh kelompok ini adalah: kelompok etnis minoritas, kelompok agama minoritas, warga difable, perempuan pada beberapa kelompok masyarakat, dan kelompok lainnya yang tersisihkan.

- Isikan pada baris VI, perlindungan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok rentan itu agar tetap dapat menikmati hak (2) sampai (7)? Anda bisa menggunakan referensi mengenai jenis-jenis perlindungan sosial bagi kelompok rentan pada Kotak 2.2. berikut:

Box 2.2.

### **Bentuk-bentuk perlindungan sosial**

#### 1. Bantuan Sosial

Bantuan sosial diberikan kepada warga yang sangat rentan, untuk memenuhi secara langsung hak para warga ini. Contoh bantuan sosial adalah bantuan makanan, tunjangan kecacatan, tunjangan keluarga dengan orang tua tunggal, dan program bantuan sejenis.

#### 2. Asuransi Sosial

Asuransi sosial adalah bantuan iuran yang diberikan pada program yang memberikan jaminan kesejahteraan pada seluruh warga. Program jaminannya sendiri merupakan program untuk seluruh warga dengan menghimpun iuran dari seluruh warga. Akan tetapi khusus untuk warga rentan, Pemerintah membayarkan iuran mereka agar mereka mendapatkan jaminan yang sama dengan warga lainnya. Contoh asuransi sosial adalah bantuan iuran BPJS, bantuan iuran Asuransi Jaminan Hari Tua, dan program sejenis lainnya.

#### 3. Pelayanan Sosial

Program ini merupakan program untuk memberikan pelayanan tertentu kepada warga rentan. Misalnya Panti Jompo untuk memberikan pelayanan kepada warga usia lanjut yang tidak mendapat perawatan dari keluarganya. Contoh lain adalah Panti Asuhan, untuk merawat anak-anak yang tidak memiliki orang tua.

#### 4. Program Pemberdayaan Transformatif

Program ini diberikan pada kelompok rentan untuk meningkatkan kemampuan mereka menghadapi resiko tidak ternikmatinya hak di kemudian hari. Contoh program ini adalah bantuan usaha, agar kelompok rentan ini memiliki tambahan pendapatan. Contoh lainnya adalah program pemberdayaan agar warga rentan mampu berpartisipasi dalam forum musyawarah dengan Pemerintah.

- Baris VII tidak perlu diisi terlebih dahulu.

(1)	DIAGNOSIS KEGAGALAN MENIKMATI HAK					
	MENDAPATKAN DOKUMEN AKTA LAHIR (2)	KESEHATAN (3)	PENDIDIKAN (4)	INFRASTRUKTUR DASAR		
				PERUMAHAN (5)	AIR BERSIH (6)	SANITASI (7)
(I) Jumlah warga Anda yang belum sepenuhnya menikmati hak pada kolom (2) sampai (7)						
(II) Apa penyebab*) mereka mereka gagal menikmati hak pada kolom (2) sampai (7)?						
(III) Langkah apa yang menurut Anda perlu dilakukan untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tadi?						
IV Dengan memperhatikan kewenangan Camat, dukungan apa yang bisa Camat lakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab warga tidak menikmati hak warga?						

## TAHAP 5 BAGIAN A:

### Rumusan Potensi Dukungan Camat pada Upaya Peningkatan Kesejahteraan

Pembelajaran pada tahap 5A ini dimaksudkan untuk memperkaya pemahaman peserta mengenai kewenangan Camat, dan potensi dukungan Camat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan atau penanggulangan kemiskinan.

Peserta dapat mempelajari Bahan Bacaan 2.3. yang memuat tugas camat.

## BAHAN BACAAN 2.3.

### Tugas dan Kewenangan Camat

Pasal 225 UU 23/2014 menyatakan bahwa tugas Camat adalah:

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 226 UU 23/2014 menyatakan bahwa:

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan

## TAHAP 5 BAGIAN B

### Praktik Perumusan Dukungan Camat untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan

Pembelajaran pada tahap 5B ini dimaksudkan untuk mengasah keterampilan peserta dalam memenuhi hak warga, dengan melindungi warga miskin dan rentan. Peserta akan mengisi baris IV pada IK 2.1.; dan baris VII pada IK 2.2.

- Isikan pada baris IV pada IK 2.1, langkah apa yang dapat dilakukan Camat untuk mengatasi masalah adanya warga Anda yang belum menikmati hak.
- Isikan pada baris VII pada IK 2.2, langkah apa yang dapat dilakukan Camat untuk melindungi warga miskin dan rentan, agar mereka tetap dapat memenuhi hak mereka.

Peserta dapat merujuk Bahan Bacaan 2.3. tentang tugas Camat.

## TAHAP 6:

### Pembulatan hasil pembelajaran dan Penutupan

Peserta dan fasilitator akan bersama-sama menyimpulkan poin-poin penting dari keseluruhan Modul 2 ini. Peserta akan mendapatkan penjelasan dari fasilitator mengenai keterkaitan dari semua Instrument Kerja yang dipraktikkan dalam Modul 2.

Peserta diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan evaluatif dari fasilitator sebagai berikut:

1. Apa dimensi-dimensi kemiskinan ditinjau dari perspektif pemenuhan hak warga?
2. Apa bentuk-bentuk penanggulangan kemiskinan dari perspektif pemenuhan hak warga?
3. Siapa saja kelompok miskin dan rentan yang perlu dilindungi?
4. Apa saja bentuk-bentuk perlindungan sosial guna melindungi warga miskin dan rentan?
5. Bagaimana cara menerapkan penanggulangan kemiskinan berbasis hak dalam pelaksanaan tugas camat?

Pada bagian akhir tahap 6 ini, Peserta dan fasilitator akan merumuskan berbagai point penting dari materi pada Modul 2. Alternatif kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya untuk memenuhi hak warga, agar mereka hidup sejahtera dan bermartabat.
2. Prinsip-prinsip penanggulangan kemiskinan berbasis hak adalah: a) memenuhi hak; b) peningkatan kapasitas; c) peningkatan pelayanan dasar; d) berkeadilan Jender; e)

- inklusi; serta f) perlindungan dan peningkatan akses warga miskin dan rentan.
3. Instrumen Kerja 2.1. membantu penggunaannya untuk memetakan adanya warga yang miskin karena gagal menikmati hak atas: a) pendapatan dan kesempatan berusaha; b) kesehatan; c) pendidikan; d) perumahan, air bersih dan sanitasi (infrastruktur dasar); serta e) kepemilikan dokumen akta kelahiran sebagai salah satu dokumen kependudukan.
  4. Instrumeng Kerja 2.2. membantu penggunaannya untuk memetakan keberadaan warga rentan serta perlindungan sosial yang mereka butuhkan.
  5. Instrumen 2.3. membantu penggunaannya untuk merumuskan cara Camat untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan perlindungan warga rentan.
  6. Instrumen Kerja 2.1; 2.2.; dan 2.3 dapat digunakan secara bersama-sama untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi pemenuhan hak kesejahteraan warga; memetakan warga miskin dan rentan serta kebutuhan perlindungan sosial warganya; serta merumuskan cara Camat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan atau penanggulangan kemiskinan dan perlindungan warga rentan.





MODUL

03

# KEPEMIMPINAN CAMAT SIGAP DAN CAKAP





### Materi Bahasan:

- 3.1. Kepemimpinan Transformatif yang *Governmental Entrepreneurship*)
- 3.2. Menjadi Camat Sigap dan Cakap (*smart leadership*)
- 3.3. Mentransformasikan nilai nilai Hak, Jender dan Inklusi Dalam Koordinasi, Fasilitasi dan Pengambilan Keputusan



### Kompetensi Dasar:

#### A. KOMPETENSI PEMERINTAHAN:

1. O.841120.034.01: Melakukan Diagnosis Organisasi
2. O.841120.031.01 : Menjalani Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan
3. O.841120.041.01: Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah

#### B. KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL:

1. M.01: Integritas
2. M.02: Kerjasama
3. M.04: Orientasi pada Hasil
4. M.05: Pelayanan Publik
5. M.08: Pengambilan Keputusan

#### C. KOMPETENSI TEKNIS Terkait pelaksanaan tugas camat, guna mendukung penanggulangan kemiskinan :

1. Kepemimpinan Transformatif
2. Keadilan Jender dan Inklusi
3. Fasilitasi
4. Koordinasi



### Perubahan yang Diharapkan:

#### Peserta BimTek:

- (a) Lebih Sigap dan Cakap dalam penanggulangan kemiskinan/ peningkatan kesejahteraan
- (b) Selalu memprioritas pemenuhan hak hak kelompok miskin dan rentan.



### Waktu:

4 JP (Jam Pelajaran) @ 45 menit = 180 menit



## 1. LATAR BELAKANG

Pentingnya modul ini adalah untuk menjawab berbagai hal yang menyangkut tentang pentingnya kepemimpinan seorang Camat yang memiliki peran sentral dan strategis sehingga:

1. Efektifitas pelaksanaan program pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan sangat membutuhkan seorang pemimpin sekaligus seorang manajer yang transformatif dengan mengedepankan nilai nilai dan visi pembangunan yang berpihak pada pemenuhan hak, inklusi sosial dan berkeadilan Jender untuk menjadikan Camat yang Sigap dan Cakap.
2. Dalam mentransformasikan nilai nilai dan visi pendekatan pembangunan berbasis hak untuk keadilan jender dan inklusi sosial memerlukan gaya kepemimpinan camat yang transformatif. Camat harus mampu mentransformasikan nilai nilai dan visi tersebut kepada seluruh pemangku tanggungjawab dan kepentingan agar dapat menghargai, melindungi dan memenuhi hak warga dalam mewujudkan kesejahteraan yang bermartabat.
3. Camat diharapkan dalam menjalankan kewenangannya baik sebagai pemimpin maupun sebagai manajer makin efektif dalam melaksanakan peran kuncinya sebagai koordinator, fasilitator dan pengambil keputusan, dengan selalu mengedepankan keberpihakannya kepada masyarakat miskin dan rentan.



## 2. TUJUAN

Setelah mengikuti sesi ini Peserta dapat :

Memahami dan berkomitmen menerapkan Gaya Kepemimpinan Transformatif berbasis hak yang Inklusif dan peka Jender dalam mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengambil keputusan untuk mewujudkan Camat yang Sigap dan Cakap dalam penanggulangan kemiskinan. Meningkatkan kompetensi dalam menjalin hubungan dengan lembaga, teknik komunikasi, negosiasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

Tujuan Modul ini akan dicapai melalui pencapaian tujuan pada berbagai materi bahasan modul. Tujuan masing-masing materi bahasan berikut indikator pencapaiannya adalah sebagai berikut:

### **Tujuan Materi Bahasan 3.1: Kepemimpinan Transformatif yang *Governmental Entrepreneurship***

Setelah Proses pembelajaran peserta dapat memahami:

- (a) Perbedaan antara pemimpin dan manajer serta relevansinya dengan peran Camat
- (b) Kepemimpinan Camat Transformatif yang Sigap dan Cakap
- (c) Kepemimpinan Transformatif yang *smart leadership* dan *Governmental Entrepreneurship*

#### **Indikator Capaian**

- (a) Peserta dapat menjelaskan minimal 3 perbedaan kunci antara pemimpin dan manajer yang erat hubungannya dengan kewenangannya sebagai Camat.
- (b) Peserta meyakini gaya kepemimpinan transformatif lebih sesuai diterapkan Camat dalam penanggulangan kemiskinan

### **Tujuan Materi Bahasan 3.2: Menjadi Camat Sigap dan Cakap (*smart leadership*)**

Setelah Proses Pembelajaran Peserta dapat:

- (a) Memahami arti pentingnya Konsep Camat Sigap dan Cakap.
- (b) Mengintegrasikan sikap dan perilaku Sigap dan Cakap dalam mengelola kecamatannya.

#### **Indikator Capaian**

Peserta memahami teknik membangun hubungan antar lembaga dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

### **Tujuan Materi Bahasan 3.3: Koordinasi, Fasilitasi dan Pengambilan Keputusan**

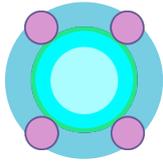
Setelah Proses Pembelajaran Peserta dapat:

- (a) Memahami pentingnya visi dan nilai-nilai sikap dan perilaku Sigap dan Cakap diterapkan dalam berkoordinasi, Memfasilitasi dan Pengambilan Keputusan.
- (b) Menerapkan nilai-nilai serta visi Sigap dan Cakap dalam mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengambil Keputusan pemecahan masalah. Peserta memahami teknis koordinasi, persuasif skill dalam menyampaikan pesan dan keputusan.

#### **Indikator Capaian**

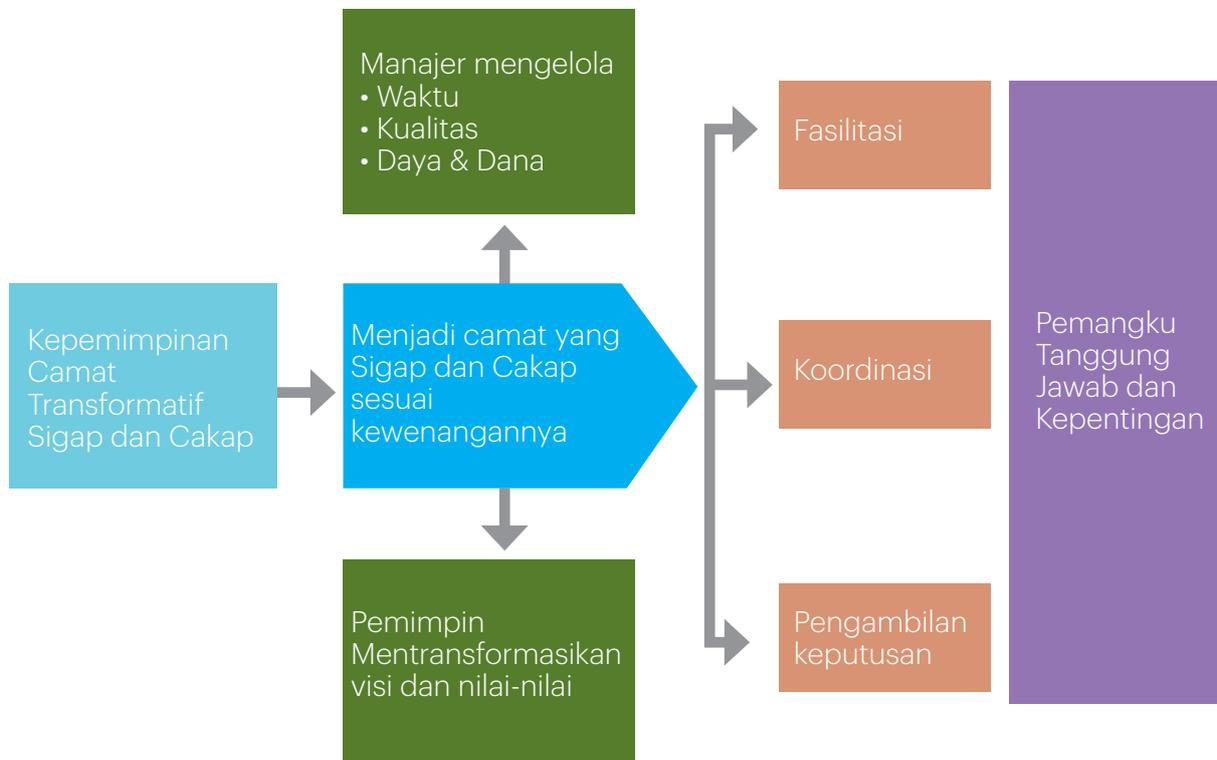
Peserta dapat mempraktekan sikap dan perilaku Sigap dan Cakap dalam membahas kasus pembangunan.

Peserta dapat memahami dan nantinya mempraktekan Kepemimpinan Transformatif yang *smart leadership* dan *Governmental Entrepreneurship*



### 3. KERANGKA MATERI MODUL 3

Materi-materi yang diberikan pada Modul 3 mengikuti kerangka pikir berikut:

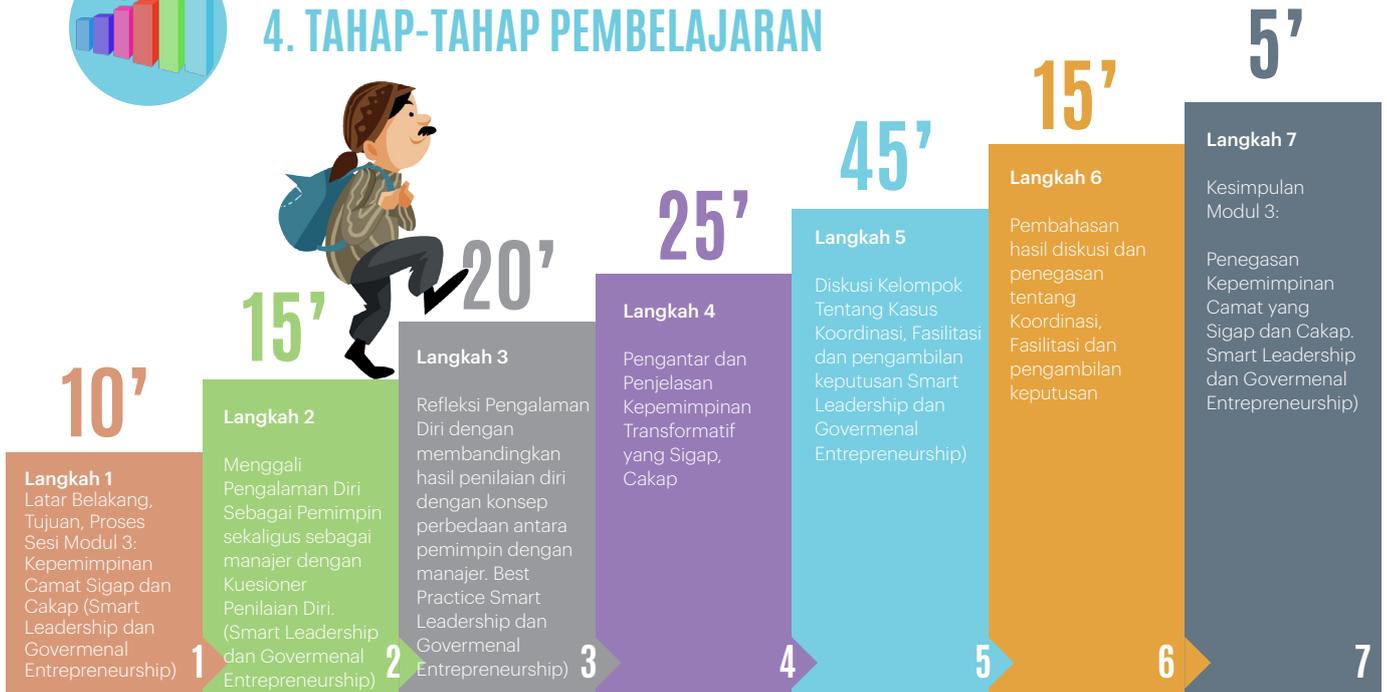


#### Penjelasan Konsep Materi Modul 3:

Dalam modul ini, peserta akan secara aktif bersama sama mempelajari tentang kepemimpinan Camat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Seorang Camat diharapkan dapat menerapkan kepemimpinan transformatif dalam mengelola program dan kegiatan pembangunan di kecamatannya. Dalam menjalankan tugasnya baik yang bersifat atributif maupun delegatif, mereka memiliki peran ganda sebagai pemimpin dan manajer. Sebagai pemimpin yang transformatif Camat menginspirasi perubahan positif kepada para pemangku tanggungjawab dan kepentingan dalam melayani warga miskin, melalui visi dan nilai-nilai sikap dan perilaku Sigap dan Cakap. Sedangkan Sebagai Manajer dalam mengelola program dan kegiatan di kecamatannya selalu berfokus memastikan tujuan dan hasil yang ingin dicapai, tepat waktu, sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dengan penggunaan sumber daya dan dana yang efisien. Dalam menerapkan peran gandanya, Camat dapat menyesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhannya dalam melakukan koordinasi, memfasilitasi dan mengambil keputusan dalam menghadapi hambatan dan tantangan program kegiatan penanggulangan kemiskinan bersama dengan para pemangku tanggungjawab dan kepentingan.



## 4. TAHAP-TAHAP PEMBELAJARAN



Proses lengkap pada setiap tahap pembelajaran adalah sebagai berikut:

### TAHAP 1:

#### **Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Dan Kerangka Konsep Materi Bahasan**

Pada langkah awal, peserta melalui proses interaktif membahas dan memahami bersama tentang: (a) Latar Belakang, Tujuan, Proses Sesi Modul 3: Kepemimpinan Camat Sigap dan Cakap (*Smart Leadership* dan *Governemal Entrepreneurship*), (b) tujuan yang ingin dicapai dalam modul 3 melalui konsep materi yang ditawarkan dan proses serta tahapan tahapan sebagaimana yang dipaparkan pada halaman sebelumnya.

### TAHAP 2:

#### **Menggali Pengalaman Diri Sebagai Pemimpin sekaligus sebagai manajer dengan Kuesioner Penilaian Diri (Smart Leadership dan Governemal Entrepreneurship)**

Pada langkah ini, peserta bersama sama melakukan refleksi terhadap apa yang telah dilakukan selama ini dalam mengelola dan memimpin kecamatannya.



Langkah ini dimulai dengan setiap peserta mengisi Lembar Kerja 2.1 “ Penilaian Mandiri ” dengan serius sesuai petunjuk berikut:

- (a) Pilih pernyataan yang paling dekat yang menggambarkan kebiasaan anda selama menjalankan tugas di kecamatan.
- (b) Semua Pernyataan adalah benar tidak ada yang salah, hanya pilih satu yang paling mendekati kebiasaan anda dengan melingkari huruf (a) atau (b)
- (c) Semua 10 topik wajib dipilih jawabannya dalam waktu mengerjakan 10 menit.

**Instrumen Kerja 3.1: Penilaian mandiri tentang kebiasaan sehari hari dalam mengelola dan memimpin kecamatan / Distrik/ anda masing-masing.**

**Pernyataan 1: Fokus utama**

Dalam menjalankan kewenangan, peran serta tugas sebagai camat, fokus utama Saya adalah untuk menjaga stabilitas kecamatan.

Membuat perubahan perubahan di kecamatan adalah menjadi fokus utama Saya sebagai camat dalam melaksanakan peran dan tugas yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

**Pernyataan 2 : Menyikapi Aturan yang ada**

Bagi Saya aturan adalah sebagai salah satu dasar dalam menjalankan tugas, oleh karena itu agar lebih efektif Saya lebih memilih membuat aturan yang diperlukan terlebih dahulu di kecamatan.

Saya meyakini aturan sebagai salah satu dasar dalam menjalankan tugas, namun apabila ada hal hal yang tidak sesuai maka Saya melanggar aturan tersebut untuk sesuatu tujuan yang lebih baik.

**Pernyataan 3. Pendekatan**

Dalam mengelola dan memimpin Kecamatan, Saya lebih mementingkan membuat perencanaan secara rinci untuk kemudian dilaksanakan sebaik baiknya oleh karyawan.

Saya cukup dengan menentukan dan memberikan arah kebijakan pokok dalam mengelola dan memimpin kecamatan kepada semua karyawan, kemudian selanjutnya mereka melaksanakan sesuai dengan kreatifitasnya.

**Pernyataan 4: Budaya Organisasi**

Setiap kecamatan telah terbentuk budaya dan kebiasaan organisasinya, oleh karena itu Saya merasa berkewajiban untuk mengikutinya sebaik baiknya

Melakukan sebuah perubahan dengan membentuk budaya atau kebiasaan baru di Kecamatan adalah merupakan salah satu tugas Saya sebagai Camat.

**Pernyataan 5: Menyikapi Konflik**

Konflik dalam wilayah kecamatan seringkali terjadi, maka Saya cenderung berupaya menghindari jangan sampai terjadi Konflik.

Saya sebagai Camat saat terjadi konflik, lebih cenderung memanfaatkan Konflik untuk melakukan suatu perubahan / perbaikan di Kecamatan.

**Pernyataan 6: Memberikan pengarahan**

Pengarahan dengan berdasarkan pada pedoman dan mengikuti cara cara yang telah ditentukan maka Saya yakin tujuan yang telah ditentukan dan disepakati di kecamatan dapat tercapai dengan lebih efektif.

Agar tujuan yang telah ditentukan dan disepakati di kecamatan dapat tercapai, maka dibutuhkan arahan kepada staf dan mitra kerja lain di kecamatan dengan cara cara yang baru yang lebih efektif.

### Pernyataan 7: Penghargaan

Penghargaan baik dari atasan, mitra kerja maupun bawahan untuk sebuah prestasi adalah kebutuhan setiap orang, sehingga apabila kecamatan berprestasi maka Camatlah yang paling berhak mendapatkannya.

Memberikan penghargaan pada staff dan mitra kerja lain yang telah sungguh sungguh berhasil dan berprestasi dalam kerjanya, adalah sebuah keharusan bagi seorang camat.

### Pernyataan 8: Pengambilan Keputusan

Sebagai Camat, Saya segera mengambil keputusan atas masalah yang terjadi, karena saya yang berwenang dan wajib untuk memecahkan setiap masalah yang terjadi.

Ketika ada masalah maka Saya berperan memfasilitasi atau mempermudah proses pengambilan keputusan agar solusi yang dipilih adalah yang terbaik.

### Pernyataan 9. Visi Kecamatan

Saya menjelaskannya kepada semua pemangku kepentingan agar mereka paham dan mau menjalankan Visi dan Misi yang dimiliki Kecamatan.

Visi dan Misi Kecamatan sangat penting untuk di promosikan dan dijual kepada seluruh pemangku kepentingan agar mereka mau memilikinya dan menjalankan.

### Pernyataan 10. Gaya Kepemimpinan

Yang menjadikan pertimbangan utama Saya dalam menciptakan dan memelihara hubungan baik adalah dengan selalu mempertimbangkan tentang apa yang akan saya peroleh terhadap apa yang akan / telah saya berikan kepada mereka.

Hubungan baik akan terwujud dan terpelihara melalui interaksi efektif dengan seluruh pemangku kepentingan dengan mentransformasikan nilai nilai positif kepada mereka.

---

Dikembangkan oleh I Made Sutarna, dari Sumber: Scott Williams (Oct 2011)

---

## TAHAP 3:

### Refleksi Pengalaman Diri dengan membandingkan hasil penilaian diri dengan konsep perbedaan antara pemimpin dengan manajer. *Best Practice Smart Leadership dan Governemal Entrepreneurship*)

Pada langkah ini peserta diberikan waktu untuk mengemukakan alasannya mengapa memilih (a) atau (b), kemudian memahami perbedaan peran sebagai pemimpin dan manajer serta menyimpulkan jawaban mana yang lebih menggambarkan seorang pemimpin dan mana sebagai seorang manajer.

- 3.1. Setelah seluruh peserta mengisi kuesioner penilaian mandiri, maka masing masing peserta menjumlahkan jawabannya: Jawaban (a) =.....? Jawaban (b)= ..... ?
- 3.2. Bagi peserta dengan jawaban (a) lebih banyak berkumpul menjadi kelompok A dan bagi yang jumlah jawaban (b) lebih banyak berkumpul menjadi kelompok B
- 3.3. Masing masing anggota kelompok menjelaskan alasan mengapa mereka memilih pernyataan A atau B?
- 3.4. Kemudian peserta mencermati Perbedaan Manajer dengan Pemimpin dengan 10 aspek perilaku kunci sebagai mana **bahan bacaan** berikut:



- a. Konsentrasi atau fokus utama Camat dalam menjalankan perannya sebagai: **Manajer** = “*Stability*”, yaitu menjaga stabilitas dan menghindari terjadi konflik, sedangkan sebagai **Pemimpin**=“*Change*” = Membuat perubahan perubahan
- b. Sikap Camat terhadap aturan aturan Kecamatan. Sebagai **Manajer** = “*Make it*”= Membuat aturan aturan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, sedangkan sebagai **Pemimpin** = “*Break it*” = Melanggar aturan aturan / kebiasaan kurang baik untuk tujuan yg lebih baik.
- c. Pendekatan Camat dalam menjalankan kegiatan Kecamatan: sebagai **Manajer** =“*Plan detail*” = Membuat perencanaan secara rinci yang kemudian diikuti oleh bawahan, sedangkan sebagai **Pemimpin** = “*Sets Direction*” = Menentukan arah tujuan yang ingin dicapai, selanjutnya para pengikut menterjemahkan cara menjalankannya.
- d. Sikap Camat terhadap budaya organisasi, sebagai seorang **Manajer** = “*Execute*” = Menjalankan dan mengikuti Budaya yang sudah ada, sedangkan sebagai **Pemimpin** = “*hape*” = Membentuk / mempengaruhi ke hal hal yang positif dengan Visi dan nilai nilai positif yang baru.
- e. Prilaku Camat dalam menghadapi Konflik, sebagai **Manajer** cenderung “*Avoid*” = Menghindari konflik sedangkan sebagai **Pemimpin** = “*Use*” yaitu memanfaatkannya untuk melakukan perubahan dan perbaikan.
- f. Bagaimana Camat Dalam memberikan arahan: sebagai **Manajer** = “*Existing Roads*” = Berjalan sesuai dengan jalan dan cara yang telah ditentukan atau aturan dan kesepakatan. Sedangkan sebagai **Pemimpin** = “*New Roads*” = Mencari jalan atau cara cara yang baru yang lebih baik.
- g. Dalam hal penghargaan terhadap prestasi di Kecamatan, sebagai **Manajer** = “*Take*” = Camat cenderung mengambil penghargaan atas keberhasilan/ prestasinya , sedangkan sebagai seorang **Pemimpin** = “*Give*” = Tidak untuk mencari penghargaan namun lebih banyak memberikan penghargaan atas keberhasilan bawahan dan orang lain.
- h. Prilaku Camat dalam Proses pengambilan keputusan, sebagai **Manajer** = “*Makes*” = Membuat keputusan, sedangkan sebagai **Pemimpin** = “*Facilitates*” = Memfasilitasi/

- mempermudah terjadinya proses pengambilan keputusan bersama.
- i. Sikap Camat terhadap Visi dan Misi Kecamatan, sebagai **Manajer** “Tell” = Menjelaskannya dan menyuruh untuk direalisasikan, sedangkan sebagai **Pemimpin** = “Sell” = Dia menjual dengan meyakinkan dan mempengaruhi agar orang lain mau memilikinya dan merealisasikannya.
  - j. Gaya Camat dalam berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Sebagai **Manajer** akan cenderung “Transactional” yaitu mempertimbangkan apa yang akan diperoleh terhadap apa yang telah dia diberikan. Sedangkan sebagai **Pemimpin** lebih “Transformative” = Mentransformasi nilai nilai dan visi positif kepada seluruh pemangku kepentingan dan pemangku kewajiban.
- 3.5. Setelah penjelasan perbedaan Camat sebagai Manajer dan Pemimpin, mereka bersama sama diajak menentukan kelompok jawaban mana (a) atau (b) yang cenderung melaksanakan peran sebagai manajer dan yang mana sebagai pemimpin.
- 3.6. Selanjut peserta bersama menyimpulkan makna Perbedaan antara pemimpin dengan manajer sebagai materi **bahan bacaan** berikut:
- a. Camat dalam menjalankan tugas kewenangannya mereka melakukan dua peran kunci yaitu sebagai **Pemimpin** dan juga sebagai **Manajer** yang disesuaikan dengan situasi dan kondisinya serta kebutuhannya.
  - b. Sebagai manajer berfokus mengelola target **waktu**, batasan atau **standar kualitas hasil**, alokasi dan distribusi sumber daya dan dana yang efisien serta sebagian **bagaimana caranya**, oleh karena itu dibutuhkan kecerdasan bagi seorang camat dalam memilih kapan berperan sebagai Pemimpin dan Kapan Sebagai Manajer.
  - c. Dalam rangka mengemban tugas penanggulangan kemiskinan maka gaya **kepemimpinan transformatif** adalah yang lebih tepat, karena membutuhkan keberpihakan dan mempengaruhi para pihak untuk menolong sesama dengan tulus bukan menolong atas dasar mendapatkan imbalan atau transaksional.

## TAHAP 4:

### Pengantar dan Penjelasan Kepemimpinan transformatif yang Sigap dan Cakap

Oleh karena Kepemimpinan Transformatif yang lebih tepat, maka pada tahapan ini peserta membahas tentang kepemimpinan transformatif yang Sigap dan Cakap kemudian membuat komitmen untuk mewujudkannya dengan menandatangani.

- 4.1. Pertama tama, peserta mencermati dan memahami apa yang dimaksudkan dengan kepemimpinan transformatif melalui **bahan bacaan** berikut:

- a. **Pengertian kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang menginspirasi perubahan positif pada mereka yang mengikutinya.**

Melalui kekuatan visi dan kepribadiannya, pemimpin transformasional mampu menginspirasi dan memengaruhi pengikutnya untuk mengubah harapan, persepsi, dan motivasi untuk bekerja menuju tujuan bersama yang lebih baik.

- b. Komponen Kepemimpinan transformatif adalah:

1. **Stimulasi Intelektual** - Pemimpin transformasional tidak hanya menantang status quo; mereka juga mendorong dan memacu kreativitas para pengikutnya dengan selalu memberikan ruang dan tantangan untuk berkreasi dan berinovasi.
2. **Pertimbangan Individual** - Pemimpin transformasional selalu mempertimbangkan kemampuan dan memahami kondisi pengikutnya dengan selalu terlibat aktif untuk menawarkan dukungan dan mendorong kepada setiap pengikut individu agar selalu berkembang sesuai dengan kemampuan dan kondisinya.
3. **Seorang Motivator yang Inspiratif** - Pemimpin transformasional memiliki nilai nilai dan visi yang jelas dan mereka mampu mengartikulasikan dan menjelaskan dengan menarik dan meyakinkan kepada pengikutnya sehingga mereka menjadi paham dan termotivasi untuk mewujudkan visi visinya.
4. **Mempengaruhi dengan idealismenya** - Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang selalu dipengaruhi oleh idealismenya untuk melakukan sesuatu yang terbaik oleh karena mereka menyadari bahwa dirinya berperan sebagai “**model**” bagi para pengikutnya.

Sumber: By Kendra Cherry, Updated April 20, 2016

4.2. Dalam penanggulangan kemiskinan dibutuhkan komitmen seorang camat untuk merealisasikan kepemimpinan transformatif kedalam wujud sikap dan perilaku kunci **Sigap dan Cakap** serta selalu meningkatkan kompetensinya untuk mewujudkannya. Selanjutnya, seluruh peserta **membaca dan memahami** Instrumen Kerja 3.2 **konsep Camat Sigap dan Cakap** dengan mendiskusikannya dalam kelompok, kemudian menanyakan hal hal yang belum jelas kepada fasilitator hal hal sebagai berikut:



### Instrumen Kerja 3.2

#### Komitmen untuk menjadi “Camat yang Sigap dan Cakap”

##### Saya adalah Camat yang **SIGAP** karena Saya:

1. Memiliki **kepekaan** terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan warga terutama yang miskin dan rentan (jender dan inklusi), dan mampu **mendeteksi potensi** masalah sejak dini, serta **proaktif** untuk mengupayakan masuknya program-program penanggulangan kemiskinan ke wilayahnya.
2. Mengutamakan pelayanan publik dengan memprioritaskan dalam **menghargai, melindungi dan memenuhi hak** warga terutama warga miskin dan rentan antara lain melalui **koordinasi dan fasilitas** seluruh instansi terkait.
3. Melaksanakan semua kewenangan camat yang diberikan **secara prima**, berkeadilan jender dan inklusif.
4. Memastikan pelaksanaan kewenangan camat khususnya penyelenggaraan layanan berdasarkan **data yang akurat dan andal**.

##### Selain Sigap Saya juga Camat yang **CAKAP** karena Saya:

1. Mampu menerapkan kewenangan dan tugas **secara efektif**, mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan instansi sektoral terkait, serta senantiasa **meningkatkan kompetensi** guna menyelesaikan masalah lebih baik.
2. Mampu mengelola keuangan secara **efektif, efisien, transparan dan akuntabel** dalam menjawab permasalahan warga miskin dan rentan sesuai aturan.
3. Mampu **memetakan masalah** yang menghambat pelayanan dasar dan perekonomian bagi warga miskin dan rentan; serta **mengatasi masalah** secara **terintegrasi dan berkelanjutan** serta **inovatif** sesuai SPM dan SOP
4. Mampu secara **terus menerus berinovasi** secara cepat dan tepat dengan menggunakan data yang valid dan andal sesuai kewenangannya.

##### Dengan ini Saya Sepakat dan berjanji untuk *mewujudkannya* Camat Sigap dan Cakap dengan sebaik baiknya

Nama Lengkap : .....  
Jabatan dan Lokasi : Camat, .....  
Tanggal : .....

##### Dengan ini Saya Sepakat dan berjanji untuk mendukung Camat *mewujudkan Sigap dan Cakap* dengan sebaik baiknya.

Nama Lengkap : .....  
Jabatan dan Lokasi : SekCam, .....  
Tanggal : .....

4.3. Setelah semua peserta memahami masing masing sikap dan perilaku kunci kemudian mereka berkomitmen untuk mewujudkannya dengan membubuhkan tandatangan nya dalam lembar yang telah disediakan di atas !

4.4. Sebagai akhir dari langkah ini, peserta mencermati kembali kata kata kunci yang ada di dalam sikap dan perilaku Camat Sigap dan Cakap, dengan media tayangan berikut:

### KATA KUNCI SIKAP DAN PERILAKU CAMAT SIGAP DAN CAKAP

										<b>B</b>
									<b>K</b>	<b>E</b>
			<b>M</b>						<b>O</b>	<b>R</b>
		<b>M</b>	<b>E</b>	<b>M</b>					<b>M</b>	<b>K</b>
	<b>M</b>	<b>E</b>	<b>M</b>	<b>E</b>					<b>P</b>	<b>E</b>
	<b>E</b>	<b>L</b>	<b>E</b>	<b>L</b>					<b>E</b>	<b>L</b>
<b>P</b>	<b>N</b>	<b>I</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>M</b>				<b>T</b>	<b>A</b>
<b>R</b>	<b>D</b>	<b>N</b>	<b>A</b>	<b>Y</b>	<b>E</b>				<b>E</b>	<b>N</b>
<b>O</b>	<b>E</b>	<b>D</b>	<b>H</b>	<b>A</b>	<b>N</b>				<b>N</b>	<b>J</b>
<b>A</b>	<b>T</b>	<b>U</b>	<b>K</b>	<b>N</b>	<b>G</b>				<b>&amp;</b>	<b>U</b>
<b>K</b>	<b>E</b>	<b>N</b>	<b>A</b>	<b>I</b>	<b>E</b>		<b>E</b>		<b>B</b>	<b>T</b>
<b>T</b>	<b>K</b>	<b>G</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	<b>L</b>		<b>F</b>		<b>E</b>	<b>A</b>
<b>I</b>	<b>S</b>	<b>I</b>	<b>M</b>	<b>E</b>	<b>O</b>		<b>E</b>		<b>R</b>	<b>N</b>
<b>F</b>	<b>I</b>	<b>&amp;</b>	<b>A</b>	<b>N</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>K</b>		<b>I</b>	<b>&amp;</b>
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>G</b>	<b>A</b>	<b>E</b>	<b>T</b>		<b>N</b>	<b>T</b>
<b>A</b>	<b>I</b>	<b>E</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>I</b>		<b>O</b>	<b>E</b>
<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>L</b>	<b>N</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>F</b>		<b>V</b>	<b>R</b>
<b>S</b>	<b>I</b>	<b>G</b>	<b>A</b>	<b>P</b>	<b>&amp;</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>K</b>	<b>A</b>	<b>P</b>
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>H</b>	<b>R</b>		<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
<b>K</b>	<b>O</b>	<b>O</b>	<b>D</b>	<b>I</b>		<b>R</b>	<b>I</b>	<b>O</b>	<b>I</b>	<b>D</b>
<b>A</b>	<b>T</b>	<b>R</b>	<b>E</b>	<b>M</b>		<b>A</b>	<b>L</b>	<b>R</b>	<b>T</b>	<b>U</b>
<b>P</b>	<b>E</b>	<b>M</b>	<b>N</b>	<b>A</b>		<b>E</b>	<b>I</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>&amp;</b>
<b>P</b>	<b>N</b>	<b>A</b>	<b>G</b>	<b>H</b>		<b>F</b>	<b>T</b>	<b>I</b>	<b>R</b>	<b>D</b>
<b>E</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>A</b>	<b>A</b>		<b>E</b>	<b>A</b>	<b>N</b>	<b>U</b>	<b>A</b>
<b>K</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>N</b>	<b>K</b>		<b>K</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>T</b>
<b>A</b>	<b>M</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>W</b>		<b>T</b>	<b>I</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>A</b>
	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>N</b>	<b>A</b>		<b>I</b>	<b>A</b>	<b>I</b>	<b>E</b>	<b>A</b>
	<b>S</b>	<b>K</b>	<b>O</b>	<b>R</b>		<b>F</b>	<b>K</b>		<b>N</b>	<b>K</b>
	<b>A</b>	<b>W</b>	<b>V</b>	<b>G</b>			<b>T</b>		<b>E</b>	<b>U</b>
	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>			<b>I</b>		<b>R</b>	<b>R</b>
	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>T</b>				<b>F</b>		<b>U</b>	<b>A</b>
	<b>H</b>	<b>G</b>	<b>I</b>						<b>S</b>	<b>T</b>
		<b>A</b>	<b>F</b>							

## TAHAP 5:

### Diskusi Kelompok Tentang Kasus Koordinasi, Fasilitasi dan pengambilan keputusan

Setelah seluruh peserta memahami dan berkomitmen untuk mewujudkan nilai nilai kunci dalam sikap dan perilaku yang diharapkan, maka pada tahapan ini peserta diharapkan dapat menerapkan prinsip prinsip tersebut melalui diskusi kelompok (5 – 7 anggota) membahas kasus pembangunan diwilayah kecamatannya.

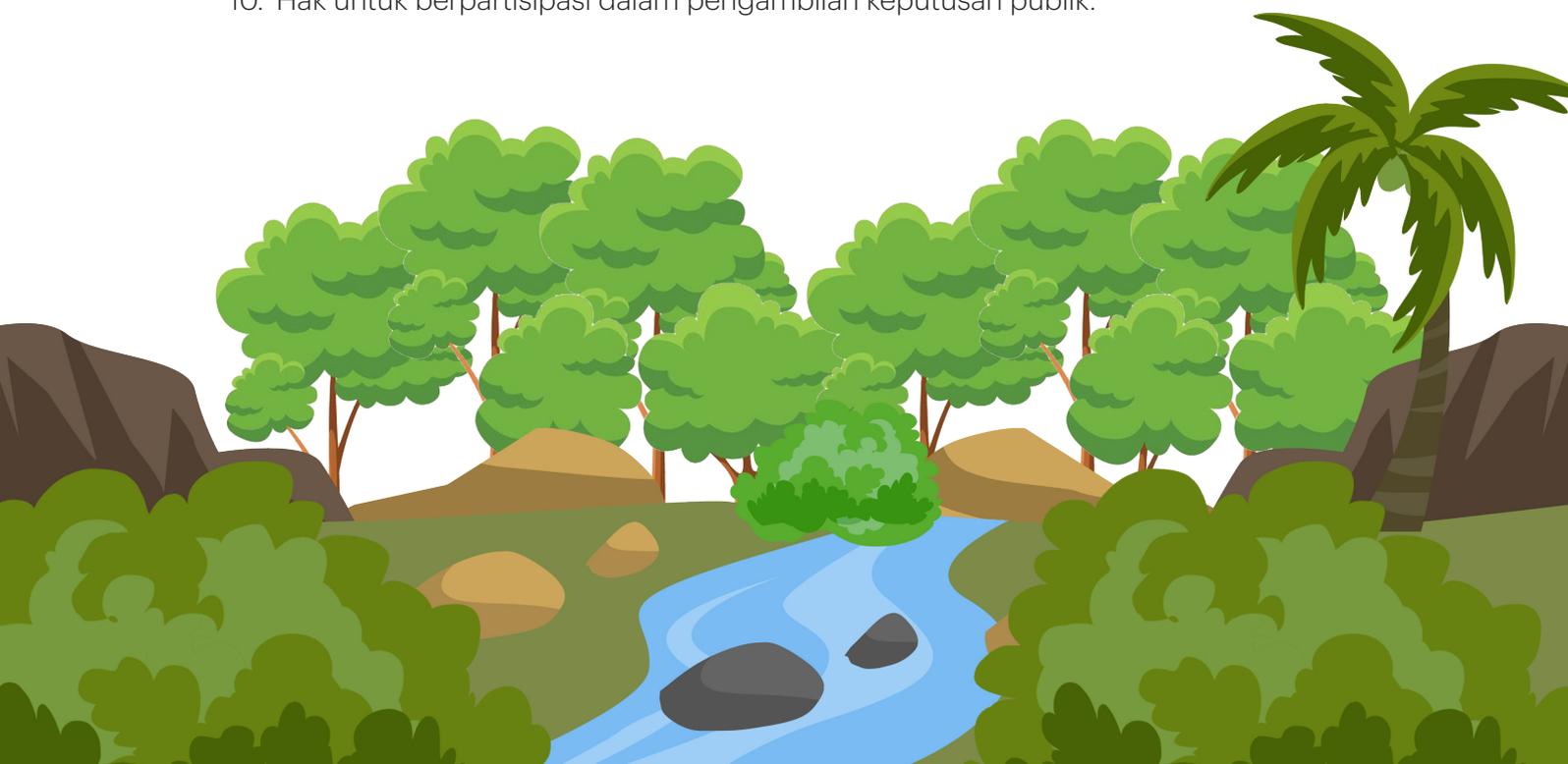
5.1 Namun sebelumnya peserta diingatkan kembali tentang hal hal berikut:

(a) Pengertian Pembangunan berbasis hak : Pembangunan Berbasis Hak, adalah proses pembangunan yang menempatkan

1. Pemenuhan hak asasi manusia sebagai tujuan pembangunan, melalui
2. kerangka kerja yang mengintegrasikan norma-norma, prinsip-prinsip dan standardar serta tujuan dari sistem HAM ke dalam perencanaan dan proses pembangunan.
3. dengan karakter metodologi dan pendekatan serta kegiatannya dijiwai oleh atau berusaha merealisasikan sistem HAM.

(b) Sepuluh Jenis Hak Hak Dasar Warga Negara menurut UU 11 / 2005 yaitu :

1. Hak atas pangan.
2. Hak atas kesehatan.
3. Hak atas pendidikan.
4. Hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha.
5. Hak atas perumahan dan tempat tinggal yang layak.
6. Hak atas air bersih dan sanitasi.
7. Hak atas tanah.
8. Hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup.
9. Hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan.
10. Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik.



5.2 Peserta dengan seksama membaca dan memahami masalah pembangunan pada kembar kasus sebagai berikut:

**Instrumen Kerja 3.3**  
**Lembar Kasus**  
**Jalan Poros, Akses Poros Tengah Pamulihan-Kamalu**  
**putus dan tidak kunjung diperbaiki**

Dampak intensitas hujan lebat akhir-akhir minggu ini, tepatnya ruas jalan poros tengah di Desa Pamulihan – Kamalu (Kecamatan Larang Banget) putus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Salah satu warga setempat Bambang Gerhana (27) mengatakan, bahwa jalan longsor itu berbahaya dan tidak diporbolehkan untuk dilewati.

Jalan poros tersebut menghubungkan dua desa sekaligus juga merupakan jalan satu satunya menuju kota kecamatan dan kota kabupaten. Dimana kedua desa tersebut merupakan sumber lalu lintas roda perekonomian dan akses satu satu untuk mendapatkan pelayanan umum di kota kecamatan dan kabupaten.

Sudah empat minggu belum ada tanda-tanda jalan tersebut akan diperbaiki oleh yang berwenang, sehingga anak sekolah banyak yang membolos akibat terlalu jauh jalan kaki melalui jalan setapak dan melingkar, begitu juga kegiatan Posyandu tidak dapat dilaksanakan sehingga jadwal imunisasi dan pemberian Vit A tidak dapat dilaksanakan. Pengiriman bahan makanan pokok ke kota Kecamatan dan Kabupaten terhenti, begitu juga sebaliknya barang barang kebutuhan pokok dari kota tidak dapat dikirim ke desa desa Pamulihan dan sekitarnya. Pembagian jatah bulanan untuk keluarga miskin berupa beras juga terhambat.

Apabila jembatan tersebut tidak segera diperbaiki maka pelayanan terhadap masyarakat akan terhambat secara total. “Sudah disampaikan kepada pihak terkait, melalui Camat Larang Banget, bahkan sudah ada yang meninjau, tapi kapan di perbaikinya, kami belum tahu,” terangnya.

Seorang Perwakilan komunitas Bapak Bukari juga telah menyampaikan perihal ini kepada Plt. Bupati Brebesandi lewat media sosial namun belum juga ada tanda tanda upaya perbaikan. Mereka hanya dapat berharap “ semoga cepat diperbaiki dan berharap Plt Bupati untuk memerintahkan kepada OPD pengampu untuk segera mengecek langsung lokasi dan menjadi prioritas perbaikan,” segera tandasnya.

5.3 Tugas: Setelah membaca dan memahami isi kasus tersebut di atas, maka peserta melakukan diskusi kelompok dengan acuan pertanyaan pertanyaan sebagai berikut:

- (a) Apa pokok permasalahannya? Hak-hak apa yang belum dinikmati oleh masyarakat ?
- (b) Apa dampaknya terhadap pelayanan dasar dan kegiatan ekonomi apabila jalan tersebut tidak segera diperbaiki dan akhirnya putus?
- (c) Identifikasikan alternatif pemecahan masalahnya!
- (d) Dari alternatif yang ada, pilihlah salah satu yang paling sesuai yang telah mempertimbangkan penerapan nilai sikap dan perilaku kunci Sigap dan Cakap. (Lihat komitmen terhadap nilai –nilai yang telah anda tanda tangani di atas).

## **TAHAP 6:**

### **Pembahasan hasil diskusi dan penegasan tentang Koordinasi, Fasilitasi dan pengambilan keputusan**

#### **Langkah 6: Pembahasan hasil diskusi dan penegasan tentang koordinasi, fasilitasi dan pengambilan keputusan**

Pada tahapan ini, masing masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya untuk melihat sejauh mana peserta mampu menerapkan nilai nilai sikap dan perilaku Sigap dan Cakap dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam menjalankan tugasnya sebagai koordinator, fasilitator dan pengambil keputusan.

- 6.1. Untuk mencermati penilaiannya terhadap hasil kelompok, peserta dalam melakukan penilaian menggunakan Instrumen Kerja 3.4 berikut ini yang memuat tentang nilai nilai sikap dan perilaku kunci sebagai seorang Camat Sigap dan Cakap:



**Instrumen Kerja 3.4: Penilaian hasil diskusi Kelompok tentang Aplikasi Sikap dan Perilaku Sigap dan Cakap.**

No	Apakah Aspek Penilaian berikut telah diterapkan dalam membahas kasus tersebut ?	Hasil Penilaian		KOMENTAR DAN MASUKAN
		YA	TDK	
1	Mencerminkan Sikap <b>Peka dan Proaktif</b> dalam memfasilitasi pemecahan masalahnya?			
2	<b>Menghargai, Melindungi dan Memenuhi</b> Hak hak Warga?			
3	Akan melakukan <b>Koordinasi dan memfasilitasi</b> dengan efektif?			
4	Solusi yang dipilih mencerminkan pelayanan secara <b>prima, berkeadilan jender dan inklusif</b> ?			
5	Pemilihan pemecahan masalah berdasarkan <b>data yang akurat dan andal.</b>			
6	Pemecahan Masalah yang dipilih Inovatif, <b>Terpadu dan Berkelanjutan</b> ?			

## TAHAP 7:

### Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup

Langkah ini adalah langkah terakhir dari modul 3, dimana peserta melakukan peninjauan kembali tentang sejauh mana tujuan dalam modul ini telah dicapai, melalui proses tahapan yang telah dilalui dan materi yang diberikan dan dibahas bersama serta menyimpulkan hal hal penting yang didapatkan dari modul 3 Kepemimpinan Camat yang Sigap dan Cakap.

- 7.1 Peserta, melihat kembali latar belakang modul 3 dan konsep materinya, mencermati kembali dan melakukan klarifikasi tentang hal hal yang belum dipahami dengan jelas dengan pertanyaan kunci sebagai berikut apakah Saya telah dapat:
- Menjelaskan minimal 3 perbedaan kunci antara pemimpin dan manajer yang erat hubungannya dengan kewenangannya anda sebagai camat?

- (b) Menerapkan gaya kepemimpinan transformatif sigap dan cakap dalam mengatasi permasalahan atau mewujudkan visi visi dan luaran yang diharapkan dalam penanggulangan kemiskinan?
- (c) Merasakan manfaat, bila seorang camat telah menerapkan perilaku Sigap dan Cakap dalam memimpin dan mengelola kecamatannya?
- (d) Meyakini dapat menerapkan nilai nilai kunci sikap dan perilaku Sigap dan Cakap dalam cara cara berkoordinais, memecahkan masalah dan mengambil keputusan?

7.2 Sebagai tahap akhir pada modul ini peserta menyimpulkan pesan inti dari modul 3 : Kepemimpinan Camat Sigap dan Cakap, sebagai berikut:

- (a) Camat dalam menjalankan kewenangannya dapat melakukan peran baik sebagai Pemimpin maupun Manajer, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhannya.
- (b) Sebagai seorang manajer camat hanya dapat mengontrol 3-hal yaitu target waktu, standar mutu dan sumber daya dan dana yang dialokasikan sedangkan diluar ketiga hal tersebut seorang Camat berperan sebagai seorang Pemimpin yang transformatif.
- (c) Sebagai Pemimpin Camat diharapkan dapat mengaplikasikan kepemimpinan transformatif yang Sigap dan Cakap yang memiliki kepekaan dan proaktif dalam pembangunan pelayanan inklusif, berkeadilan Jender dan berbasis pada Hak.
- (d) Dalam melakukan tugas keseharian, camat diharapkan memiliki kemampuan inovatif dalam hal memecahkan masalah masalah yang ada, melalui fasilitasi dan koordinasi serta mengambil keputusan secara cepat dan tepat.



MODUL

04

# PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR BERBASIS HAK





### **Materi Bahasan:**

- 4.1. Konsep pelayanan dasar berbasis hak dan implikasinya pada penye-lenggaraan pelayanan dasar
- 4.2. Pemantauan pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar



### **Kompetensi Dasar:**

1. Pembuatan kebijakan
2. Pengambilan keputusan
3. Koordinasi
4. Fasilitasi
5. Akuntabilitas



### **Perubahan yang Diharapkan:**

#### **Peserta BimTek:**

1. Peka terhadap adanya kondisi tidak terpenuhinya hak warga atas pelayanan dasar
2. Mau dan mampu menggali masalah pemenuhan hak atas pelayanan dasar



### **Waktu:**

4 JP ( Jam Pelajaran ) @ 45 menit = 180 menit



## 1. LATAR BELAKANG

Modul ini diharapkan dapat mendorong Peserta untuk aktif memantau sejauh mana pemenuhan pelayanan dasar terhadap hak warga. Harapan ini didasari oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan dasar di tingkat kecamatan, belum optimal karena sector terkait belum melibatkan Camat secara signifikan.
2. Camat memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan, serta Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. Penugasan ini membuat Camat dapat memberi dukungan lebih besar pada penyelenggaraan pelayanan dasar.
3. Dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar, Camat memerlukan instrument kerja yang mampu memantau pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar.



## 2. TUJUAN

Modul ini bertujuan untuk membuat peserta BimTek dapat memahami konsep pelayanan dasar berbasis hak, serta berkomitmen untuk memantau pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar.

Tujuan Modul ini akan dicapai melalui berbagai materi bahasan modul. Tujuan masing-masing materi bahasan berikut indicator pencapaiannya adalah sebagai berikut:

### **MATERI BAHASAN 4.1.**

Konsep Pelayanan Dasar Berbasis Hak dan Implikasi pada Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

#### **Tujuan Materi Bahasan:**

Membuat peserta dapat memahami:

- a. pentingnya pendekatan hak pada penyelenggaraan pelayanan dasar.
- b. implikasi pendekatan hak pada penyelenggaraan pelayanan dasar
- c. relevansi pemantauan pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar dengan tugas camat

**Indikator Pencapaian Tujuan:**

- a. Peserta dapat menjelaskan manfaat pendekatan hak pada penyelenggaraan pelayanan dasar.
- b. Peserta dapat mengidentifikasi ketersediaan berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan dasar yang mencerminkan pemenuhan hak warga.
- c. Peserta meyakini relevansi pemantauan pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar dengan tugas camat

**MATERI BAHASAN 4.2**

Pemantauan Pemenuhan Hak Warga atas Pelayanan Dasar

**Tujuan Materi Bahasan:**

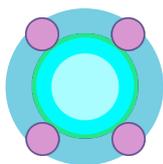
Membuat peserta dapat:

- a. Mengenal instrument pemantauan pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar
- b. Mengisi instrumen untuk memantau pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar di kecamatan

**Indikator Pencapaian Tujuan:**

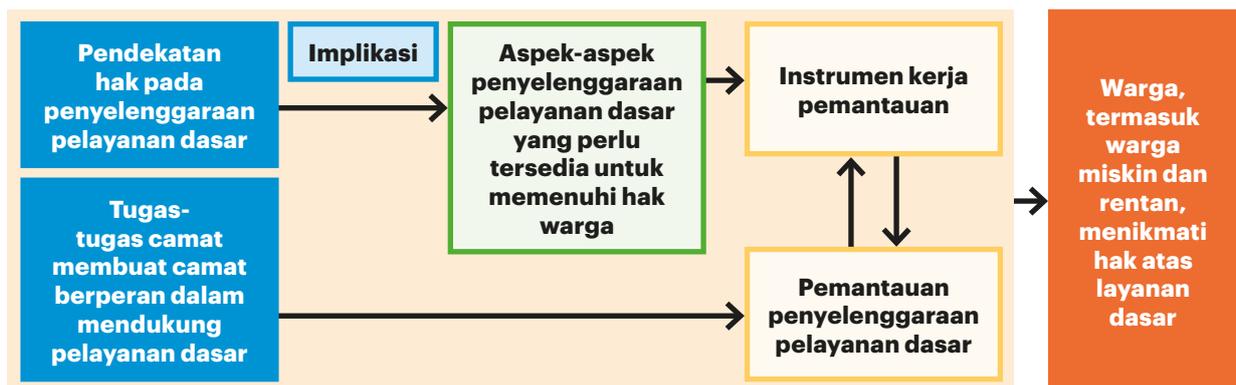
Peserta mampu :

- a. menganalisis : pemenuhan hak warga melalui penyelenggaraan pelayanan dasar di kecamatan.
- b. merujuk SPM bidang kesehatan pada saat menganalisis aspek kualitas pada layanan kesehatan



**3. KERANGKA MATERI MODUL 4**

Materi-materi yang diberikan pada Modul 4 mengikuti kerangka pikir berikut:

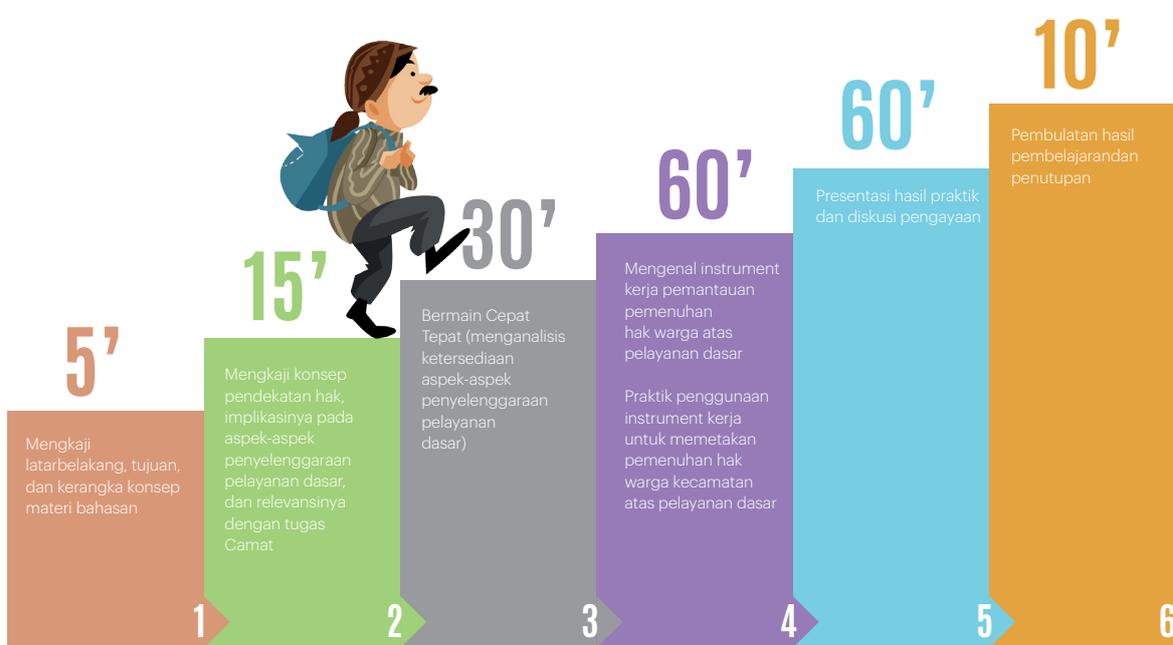


Kerangka ini akan membantu Peserta memahami pendekatan hak pada penyelenggaraan pelayanan dasar. Pendekatan hak membuat penyelenggaraan pelayanan dasar perlu menyediakan berbagai aspek pelayanan. Melalui pelaksanaan tugas mendukung pelayanan dasar, Camat dapat memantau ketersediaan berbagai aspek pelayanan tadi. Pemantauan dari Camat akan berkontribusi pada pemenuhan hak warga, termasuk warga kurang sejahtera atas pelayanan dasar.



## 4. TAHAP-TAHAP PEMBELAJARAN

Tahapan-tahapan pembelajaran yang akan dialami oleh Peserta adalah sebagai berikut:



Proses lengkap pada setiap tahap pembelajaran adalah sebagai berikut:

### TAHAP 1:

#### Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Dan Kerangka Konsep Materi Bahasan

Pembelajaran pada tahap ini bertujuan membuat peserta mendapatkan gambaran mengenai latar belakang dan tujuan dari diberikannya materi mengenai penyelenggaraan pelayanan dasar berbasis hak. Latar belakang dan tujuan pemberian materi dapat dilihat pada bagian 1 dan 2 Modul ini. Kerangka materi modul dapat dilihat pada bagian 3 Modul ini.

## TAHAP 2:

### **Mengkaji konsep pendekatan hak, implikasinya pada aspek penyelenggaraan pelayanan dasar, dan relevansinya dengan tugas Camat**

Peserta akan mendengarkan penjelasan singkat dari fasilitator mengenai: 1) pendekatan hak pada penyelenggaraan pelayanan dasar; 2) aspek-aspek yang perlu tersedia dalam menerapkan pendekatan hak pada penyelenggaraan pelayanan dasar; dan 3) relevansi pemantauan hak warga atas pelayanan dasar dengan tugas camat. Ringkasan penjelasan fasilitator dapat dilihat pada **Box 4.1**.

#### **Box 4.1 Ringkasan Penjelasan Fasilitator Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Berbasis Hak**

##### **Hak asasi warga**

Terdapat 10 hak dasar warga negara yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU 11/2005 Ratifikasi Konvenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kesepuluh hak dasar tersebut adalah:

1. Hak atas pangan.
2. Hak atas kesehatan.
3. Hak atas pendidikan.
4. Hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha.
5. Hak atas perumahan dan tempat tinggal yang layak.
6. Hak atas air bersih dan sanitasi.
7. Hak atas tanah.
8. Hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup.
9. Hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan.
10. Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

##### **Pelayanan Dasar Sebagai Urusan Wajib Pemerintahan Konkuren**

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas.
6. Sosial

## Sumbangan pelayanan dasar pada pemenuhan hak warga

1. Pelayanan identitas hukum merupakan pengakuan Negara atas kewarga negaraan setiap warga, serta prasyarat untuk mengakses pemenuhan hak lainnya
2. Pelayanan kesehatan menyediakan berbagai fasilitas, barang, dan jasa yang penting bagi pemenuhan hak kesehatan warga.
3. Pelayanan pendidikan menyediakan fasilitas, barang dan jasa yang penting bagi pemenuhan hak pendidikan warga.
4. Pelayanan/ penyediaan infrastruktur dasar berkontribusi pada pemenuhan hak atas pemukiman dan air bersih serta sanitasi termasuk pemenuhan perumahan yang layak.

Agar dapat memenuhi hak, penyelenggaraan pelayanan dasar perlu menyediakan berbagai komponen berikut:

## Aspek penyelenggaraan pelayanan dasar yang memenuhi hak

ASPEK PELAYANAN	CIRI KETERSEDIAAN ASPEK PELAYANAN YANG MEMENUHI HAK
Ketersediaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berfungsinya fasilitas-fasilitas pelayanan</li><li>• Terselenggaranya kegiatan pelayanan</li></ul>
Akses	Pelayanan terselenggara dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak diskriminatif</li><li>• Dapat diakses secara fisik</li><li>• Biaya pelayanan terjangkau</li><li>• Informasi mengenai pelayanan dapat terakses</li></ul>
Penerimaan	Pelayanan terselenggara dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Menghormati dan mematuhi etika pelayanan</li><li>• Menghormati dan menyesuaikan dengan budaya lokal</li><li>• Sensitif terhadap usia dan Jender</li></ul>
Kualitas	Pelayanan diberikan dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>• sesuai standar kualitas yang disepakati</li><li>• berorientasi pada kepuasan pengguna layanan</li><li>• menjamin terjadinya dampak positif pada warga</li></ul>
Penguatan pelibatan/ engagement antara warga dan pemerintah	Pelayanan terselenggara disertai dengan upaya untuk memberdayakan warga, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"><li>• penguatan partisipasi warga dalam perencanaan layanan</li><li>• penguatan partisipasi warga dalam pelaksanaan layanan</li><li>• penguatan partisipasi warga dalam pengawasan pelayanan</li></ul>
Akuntabilitas dan penanganan keluhan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kinerja layanan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pengguna</li><li>• Keluhan didengar dan diatasi</li></ul>
Koordinasi lintas pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksana layanan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mencapai hasil layanan yang baik</li></ul>
Kecukupan anggaran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anggaran cukup untuk menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas</li><li>• Pengelolaan anggaran terbuka dan dipertanggungjawabkan</li></ul>

---

Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pelayanan

- SDM pemberi layanan ditingkatkan terus menerus
- Organisasi pemberi pelayanan dibenahi terus menerus

---

Melindungi warga miskin dan rentan

- Warga miskin dan rentan diprioritaskan dan dibantu untuk mendapat pelayanan
- 

### Tugas Camat

Tugas camat untuk:

- Mengkoordinasikan penegakkan Perda/ Perkada
- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh perangkat daerah di Kecamatan
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Membina dan mengawasi kegiatan di desa
- Mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota

Dengan tugas tersebut diatas maka Camat dapat turut memantau pemenuhan hak warga dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

## TAHAP 3:

### Bermain Cepat Tepat

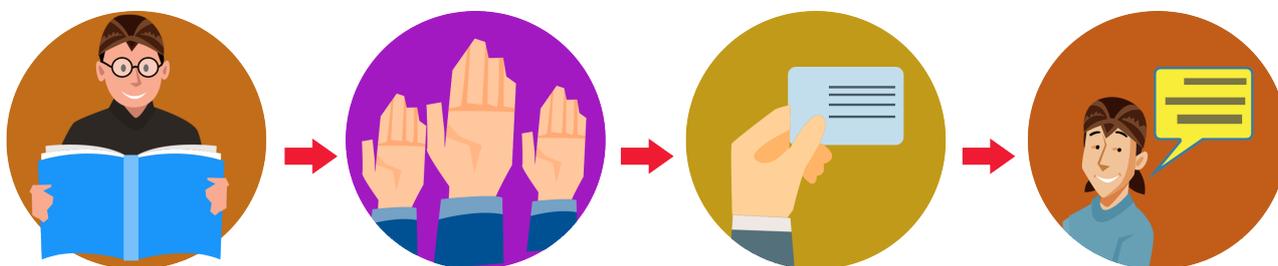
(Menganalisis ketersediaan aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan dasar)

Peserta akan mempelajari contoh-contoh ketersediaan aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan dasar melalui permainan cepat tepat. Tergantung pada jumlah peserta, peserta akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan menerima 10 lembar kartu, yang masing-masing memuat aspek penyelenggaraan pelayanan dasar (**lihat Box 4.1**, pada bagian Aspek penyelenggaraan pelayanan dasar yang memenuhi hak).

Tugas dari kelompok adalah mempelajari aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan dasar yang tertulis dalam kartu. Setiap kelompok harus membagi tanggung jawab kepada anggota kelompok untuk menguasai salah satu atau beberapa aspek penyelenggaraan pelayanan dasar. Hal ini perlu dilakukan, agar kelompok siap menjawab aspek pelayanan

apa yang tidak memenuhi hak warga, pada kasus-kasus yang akan dibacakan fasilitator pada permainan cepat tepat.

Selama permainan cepat tepat, peserta harus menyimak kasus yang dibacakan fasilitator. Kasus yang dibacakan menggambarkan ketidaktersediaan berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan dasar. Peserta yang memegang kartu bertuliskan aspek yang sesuai, harus mengangkat tangan, menyatakan bahwa kasus berkaitan dengan kartu yang dipegangnya. Peserta tersebut kemudian harus menerangkan mengapa dia menganggap kasus tertentu mencerminkan keridaktersediaan aspek pelayanan yang tertulis dalam kartunya.



## TAHAP 4:

### Praktik analisis pemenuhan hak atas pelayanan dasar di kecamatan

Peserta akan mempelajari 2 hal:

1. Mengkaji instrument kerja pemantauan pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar
2. Praktik penggunaan instrument kerja untuk memetakan pemenuhan hak warga kecamatan atas pelayanan dasar

Instrument kerja pemantauan pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar dapat dilihat pada IK 1. IK 1 merupakan instrument kerja yang dapat digunakan camat untuk memantau sejauh mana pelayanan dasar telah terselenggara dengan menyediakan berbagai aspek layanan yang menjamin pemenuhan hak warga. IK 1 fokus pada 4 layanan dasar: 1) pelayanan kesehatan, 2) pelayanan pendidikan, 3) pelayanan identitas hukum, dan 4) pembangunan/ pemeliharaan infrastruktur dasar.

Peserta akan terbagi menjadi 5 kelompok:

1. Kelompok yang akan fokus pada pelayanan kesehatan
2. Kelompok yang akan fokus pada pelayanan pendidikan
3. Kelompok yang akan fokus pada pelayanan administrasi kependudukan
4. Kelompok yang akan fokus pada infrastruktur dasar
5. Kelompok yang akan fokus pada aspek kualitas pelayanan kesehatan

Walaupun duduk dalam kelompok, akan tetapi peserta yang tergabung dalam Kelompok 1 sampai 4 akan bekerja secara individual, dengan mengisi IK 4.1. Peserta pada Kelompok 5, akan bekerja dalam kelompok. Kelompok 5 akan fokus menganalisis aspek kualitas pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dengan merujuk pada SPM Bidang Kesehatan. Kelompok 5 hanya akan mengisi aspek 4 pada IK 4.1.

Sebelum peserta mulai mengerjakan tugas-tugas dalam kelompok, peserta akan terlebih dahulu mendengarkan penjelasan fasilitator mengenai SPM. Box 4.2. memperlihatkan poin-poin penting dari penjelasan fasilitator.

**Box 4.2.**  
**Penjelasan Ringkas Fasilitator**  
**Standar Pelayanan Minimal untuk Pelayanan Dasar di Indonesia**

<i>Kaitan SPM dengan aspek pelayanan untuk memenuhi hak warga</i>	<p>Salah satu aspek penyelenggaraan layanan yang harus ada agar memenuhi hak warga adalah aspek kualitas. Pemenuhan terhadap aspek kualitas membuat penyelenggaraan pelayanan harus sesuai dengan standar pelayanan.</p> <p>Di Indonesia, salah satu kebijakan mengenai standar pelayanan yang penting adalah kebijakan mengenai SPM (Standar Pelayanan Minimum). Standar lainnya adalah antara lain Standar Pelayanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012. BimTek ini akan fokus pada pembahasan mengenai SPM.</p>
<i>Definisi SPM</i>	<p>UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan SPM (Standar Pelayanan Minimal) sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal (pasal 1 point 17).</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM masih dalam tahap perumusan. Saat ini kebijakan SPM yang sudah ada adalah SPM bidang Kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016).</p>

<p><i>Bagaimana SPM dalam menjaga kualitas pelayanan</i></p>  	<p>Menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2016, SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dengan aturan SPM ini, Pemerintah Kabupaten/ Kota akan mengetahui jenis pelayanan apa yang harus diberikan sesuai dengan standar yang diatur. Ada 12 jenis pelayanan kesehatan, yang standarnya diatur oleh Permenkes ini.</p> <p>Jenis pelayanan ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kesehatan ibu hamil</li> <li>2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin</li> <li>3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir</li> <li>4. Pelayanan kesehatan balita</li> <li>5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</li> <li>6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif</li> <li>7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut</li> <li>8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi</li> <li>9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus</li> <li>10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</li> <li>11. Pelayanan kesehatan orang dengan TB</li> <li>12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV</li> </ol> <p>Pada masing-masing jenis pelayanan tadi, Permenkes telah mengatur kepada siapa pelayanan yang harus diberikan, tindakan apa yang harus diberikan, kapan, seberapa banyak, dan lain-lain aspek mutu layanan lainnya.</p>
<p><i>Bagaimana SPM kesehatan menjamin hak warga atas kesehatan</i></p>	<p>Dengan mengatur jenis dan mutu layanan kesehatan, SPM Kesehatan menjamin pemenuhan hak warga atas kesehatan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejauh mana Pemda dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM, akan menjadi indikator kinerja Kepala Daerah</li> <li>2. Ada konsekuensi tertentu atas tercapai/tidaknya indikator-indikator SPM Kesehatan</li> <li>3. Memperkuat pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja. Kebijakan SPM Kesehatan akan membuat Pemda memprioritaskan belanja kesehatan daerah untuk mencapai SPM bidang kesehatan.</li> <li>4. Memperkuat sisi promosi kesehatan/ peningkatan, dan bukan hanya pengobatan.</li> <li>5. Mendorong koordinasi semua stakeholder kesehatan untuk bersama-sama mendorong pencapaian SPM.</li> </ol>

Peran Kecamatan dalam mendorong Pencapaian SPM

Penghitungan kinerja pencapaian SPM pada umumnya diukur di tingkat Puskesmas/ fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan. Contoh: Standar pemberian pelayanan K4 kepada ibu hamil diukur dengan formula berikut:

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	X	100%
Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama		

Contoh Penghitungan

Di Kabupaten "A" terdapat 4000 ibu hamil. Adapun rincian yang berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sasaran Ibu Hamil	Jumlah yang Mendapat Pelayanan K4
(a)	(b)	(c)
Puskesmas A	1000	950
Puskesmas B	1000	1000
Puskesmas C	1000	1000
Puskesmas D	1000	900
Jumlah	4000	3850

Hasil rekapitulasi pada tahun itu, ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sebanyak 3850 orang. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten "A" dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah  $3850/4000 \times 100\% = 96,2\%$ .

Contoh perhitungan di atas memperlihatkan bahwa Camat dapat mengikuti pencapaian SPM di Puskesmas di wilayahnya. Camat memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh perangkat daerah di wilayahnya. Dengan demikian, Camat dapat mendorong Puskesmas untuk meningkatkan pencapaian SPM Kesehatan di tingkat Puskesmas.



Setelah mendengarkan penjelasan fasilitator, Peserta yang tergabung dalam Kelompok 1 sampai 4 akan mulai mengerjakan IK 4.1. secara individual. Mereka akan duduk dalam kelompok, akan tetapi mengisi instrument berdasarkan kondisi di kecamatan mereka masing-masing. Format IK 4.1. untuk Kelompok 1 sampai 4 adalah sebagai berikut:

## INSTRUMENT KERJA (IK) 4.1.

### ANALISIS PEMENUHAN HAK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR DI KECAMATAN

Petunjuk Pengisian Tabel:

Tabel ini merupakan instrument kerja yang dapat membantu Anda menganalisis masalah pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar di kecamatan Anda. Ada 4 jenis pelayanan yang akan Anda cermati:

- 1) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)/ Identitas Hukum
- 2) Pelayanan kesehatan
- 3) Pelayanan pendidikan
- 4) Infrastruktur dasar

Pada keempat pelayanan tadi, Anda diminta untuk menuliskan masalah dan penyebab masalah terkait 10 aspek pelayanan yang dimandatkan harus ada oleh pendekatan hak. Kesepuluh aspek tersebut adalah: 1) Ketersediaan; 2) Akses; 3) Penerimaan; 4) Kualitas; 5) Keterlibatan dan keberdayaan warga; 6) Akuntabilitas dan penanganan keluhan; 7) Koordinasi lintas pelayanan; 8) Kecukupan anggaran; 9) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pelayanan; 10). Perlindungan warga miskin dan rentan

Contoh:

Nama Kecamatan: Kecamatan Belimbing

Pelayanan: Kesehatan

ASPEK PELAYANAN YANG DIMANDATKAN OLEH PENDEKATAN HAK		MASALAH	PENYEBAB MASALAH
Aspek	Ciri aspek yang memenuhi hak		
8. Kecukupan anggaran	Pelayanan disertai dengan adanya pengalokasian anggaran yang memadai, serta disertai dengan upaya monitoring terus menerus terhadap pengelolaan anggaran	Anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana Posyandu kurang.	Kader Posyandu belum terampil menghitung kebutuhan biaya pengadaan sarana dan prasarana Posyandu.

Nama Kecamatan: .....

Pelayanan: Kesehatan/ Pendidikan/ Dukcapil/ Infrastruktur Dasar

(lingkari pelayanan yang menjadi fokus Anda)

ASPEK PELAYANAN YANG DIMANDATKAN OLEH PENDEKATAN HAK		MASALAH	PENYEBAB MASALAH
Aspek	Ciri aspek yang memenuhi hak		
1. Ketersediaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berfungsinya fasilitas-fasilitas pelayanan</li> <li>▪ Terselenggaranya kegiatan pelayanan</li> </ul>		
2. Akses	Pelayanan terselenggara dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak diskriminatif</li> <li>▪ Dapat diakses secara fisik oleh semua</li> <li>▪ Biaya pelayanan terjangkau</li> <li>▪ Informasi mengenai pelayanan dapat terakses oleh semua</li> </ul>		
3. Penerimaan	Pelayanan terselenggara dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menghormati dan mematuhi etika pelayanan</li> <li>▪ Menghormati dan menyesuaikan dengan budaya lokal</li> <li>▪ Sensitif terhadap usia dan Jender</li> </ul>		
4. Kualitas	Pelayanan diberikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sesuai standar kualitas yang disepakati. Contoh: SPM (Standar Pelayanan Minimal).</li> <li>▪ berorientasi pada kepuasan pengguna layanan</li> <li>▪ menjamin terjadinya dampak positif pada warga</li> </ul>		
5. Keterlibatan dan keberdayaan warga	Pelayanan terselenggara disertai dengan upaya untuk pemberdayaan warga, antara lain melalui penguatan partisipasi warga dalam perencanaan, pelaksanaan, serta M&E pelayanan		
6. Akuntabilitas dan penanganan keluhan	Pelayanan terselenggara disertai dengan upaya untuk memperkuat akuntabilitas, serta penanganan keluhan		
7. Koordinasi lintas pelayanan	Pelayanan disertai upaya untuk mengkordinasikan pelayanan dengan sektor lain		

ASPEK PELAYANAN YANG DIMANDATKAN OLEH PENDEKATAN HAK		MASALAH	PENYEBAB MASALAH
Aspek	Ciri aspek yang memenuhi hak		
8. Kecukupan anggaran	Pelayanan disertai dengan adanya pengalokasian anggaran yang memadai, serta disertai dengan upaya monitoring terus menerus terhadap pengelolaan anggaran		
9. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pelayanan	Pelayanan disertai dengan upaya peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pelayanan.		
10. Perlindungan warga kurang sejahtera	Pelayanan disertai dengan upaya mengatasi berbagai hambatan yang dapat dihadapi oleh warga kurang sejahtera, agar kelompok ini tetap terjamin haknya.		

Kelompok 5 hanya akan mengisi aspek kualitas pada pelayanan kesehatan, sebagai berikut:

## IK 4.1. ASPEK 4 (KUALITAS)

ASPEK PELAYANAN YANG DIMANDATKAN OLEH PENDEKATAN HAK		Standar pada SPM yang dianggap penting untuk dipantau oleh Camat	Rumusan cara Camat untuk Mendorong Pencapaian SPM Kesehatan di Puskesmas di Kecamatan
Aspek	Ciri aspek yang memenuhi hak		
4. Kualitas	Pelayanan diberikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sesuai standar kualitas yang disepakati. Contoh: SPM (Standar Pelayanan Minimal).</li> <li>▪ berorientasi pada kepuasan pengguna layanan</li> <li>▪ menjamin terjadinya dampak positif pada warga</li> </ul>		

Untuk mengisi ini, Peserta diminta fasilitator untuk mencermati 12 kartu yang memuat jenis dan standard layanan pada SPM Kesehatan. Tugas untuk Kelompok 5 adalah:

- Mencermati berbagai standar pada SPM Bidang Kesehatan.
- Memilih standar pelayanan yang dianggap penting untuk dipantau oleh camat
- Merumuskan cara Camat untuk mendorong pencapaian spm kesehatan di puskesmas di kecamatan

Pada saat presentasi dan diskusi pengayaan, peserta akan saling belajar mengenai aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan dasar pada jenis pelayanan yang berbeda, dan di kecamatan yang berbeda.

## **TAHAP 5:**

### **Presentasi Hasil Praktik dan Diskusi Pengayaan**

Beberapa peserta akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil analisis pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar di Kecamatan peserta. Peserta akan dibantu fasilitator untuk memperkaya analisis, membandingkan analisis dan temuan pada sektor layanan yang berbeda, serta membandingkan perbedaan kondisi antar kecamatan.

## **TAHAP 6:**

### **Pembulatan hasil pembelajaran dan Penutupan**

Peserta bersama fasilitator akan membulatkan dan menyimpulkan intisari dari seluruh materi yang diberikan pada modul ini. Peserta diharapkan dapat menjawab beberapa pernyataan evaluatif dari fasilitator sebagai berikut:

1. Apa manfaat dari penggunaan pendekatan hak pada penyelenggaraan pelayanan dasar?
2. Apa saja aspek pelayanan yang harus tersedia, agar penyelenggaraan pelayanan dasar dapat memenuhi hak warga?
3. Apa tugas Camat yang relevan dengan upaya pemantauan pemenuhan hak pada penyelenggaraan pelayanan dasar di Kecamatan?
4. Seberapa besar kesempatan dan potensi yang dimiliki Camat untuk dapat memantau penyelenggaraan pelayanan dasar, dengan menggunakan IK 4.1.? Apa saja kondisi yang mendukung dan menghambat upaya Camat untuk memantau pelayanan dasar di Kecamatan?

Peserta dan fasilitator kemudian akan bersama-sama menyimpulkan intisari materi pada modul ini. Alternatif kesimpulan materi dapat dilihat pada Box 4.2. berikut:

**Box 4.3.****KESIMPULAN**

1. Pendekatan hak pada penyelenggaraan pelayanan dasar dapat mengungkapkan seberapa jauh hak warga terpenuhi oleh upaya penyelenggaraan pelayanan dasar.
2. Pendekatan hak mengamanahkan ketersediaan aspek-aspek layanan: 1) ketersediaan; 2) akses; 3) penerimaan; 4) kualitas; 5) keterlibatan dan keberdayaan warga; 6) akuntabilitas dan penanganan keluhan; 7) koordinasi lintas pelayanan; 8) kecukupan anggaran; 9) peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pelayanan; dan 10) perlindungan warga miskin dan rentan.
3. Tugas-tugas Camat memungkinkan Camat untuk turut memantau pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar.
4. Camat dapat menggunakan IK 4.1. untuk memantau pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar.



MODUL

05

# PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT





### **Materi Bahasan:**

- 5.1. Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 5.2. Identifikasi kebutuhan dan cara mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.



### **Kompetensi Dasar:**

- A. KOMPETENSI PEMERINTAHAN:
  1. O.841120.045.01 (Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan)
  2. O.841120.031.01 (Menjalin Hubungan dengan Pemangku Kepentingan)
  3. O.841120.061.01 (Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat)
  4. O.841120.066.01 (Mengimplementasikan Kemitraan Dalam Kordinasi Program Pembangunan Masyarakat)
- B. KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL:
  1. M.01 (Integritas)
  2. M.04 (Orientasi pada Hasil)
  3. M.06 (Pengembangan diri dan Orang Lain)
  4. SK.01 (Perekat bangsa)
- C. KOMPETENSI TEKNIS Terkait pelaksanaan tugas camat, guna mendukung penanggulangan kemiskinan :
  1. Pembuatan Kebijakan
  2. Pengambilan Keputusan
  3. Keadilan Jender dan Inklusi



### **Perubahan yang Diharapkan:**

#### **Peserta BimTek:**

- (a) Peserta mampu mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayahnya.
- (b) Peserta mampu memfasilitasi dan mengoordinasikan peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.



### **Waktu:**

4 JP ( Jam Pelajaran ) @ 45 menit = 180 menit



## 1. LATAR BELAKANG

Modul ini diharapkan dapat mendorong camat untuk aktif memberdayakan ekonomi masyarakat di wilayahnya. harapan ini didasari oleh hal-hal berikut:

1. Di kecamatan masih terdapat warga pendapatannya kurang layak, usaha kecil dan menengah yang kurang berkembang, semangat kewirausahaan belum tumbuh dikalangan warga, kerjasama ekonomi antar desa belum banyak dilakukan, investasi belum banyakyang masuk ke wilayah kecamatan, infrastruktur ekonomi belum banyak terbangun serta sumber daya alam belum dikelola secara optimal.
2. Camat mempunyai mandat dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat (UU 23/2014). Salah satu komponen pemberdayaan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Camat dapat memfasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain dengan memastikan usulan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di bahas dan diputuskan dalam Musrembang Kecamatan di wilayahnya untuk diusulkan ke OPD Teknis melalui Musrembang Kabupaten. Camat diharapkan bisa berperan dalam memberi perijinan usaha, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi masyarakat.



## 2. TUJUAN

Setelah BimTek Peserta dapat:

Memahami dan mampu melakukan identifikasi potensi, serta dapat merumuskan cara mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inovatif.

Tujuan Modul ini akan dicapai melalui pencapaian tujuan pada berbagai materi bahasan modul. Tujuan masing-masing materi bahasan berikut indikator pencapaiannya adalah sebagai berikut:

### **Tujuan Materi Bahasan 5.1 : Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat.**

Setelah Proses pembelajaran, Peserta mampu memahami konsep dan komponen pemberdayaan ekonomi masyarakat

## Indikator Capaian

Peserta dapat menjelaskan:

1. Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Komponen pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan.
3. Kompeten dalam mengkoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat, sinkronisasi program kerja, dan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat.

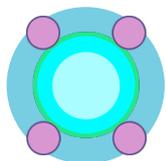
## Tujuan Materi Bahasan 5.2: Identifikasi kebutuhan dan cara mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Setelah proses pembelajaran, Peserta mampu menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## Indikator Capaian

Peserta mampu:

1. Memprioritaskan komponen dan menentukan kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat
2. Menemukan dan memilih cara mendukung peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Memprioritaskan koordinasi partisipasi masyarakat, sinkronisasi program kerja dan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat.



## KERANGKA MATERI MODUL 5:



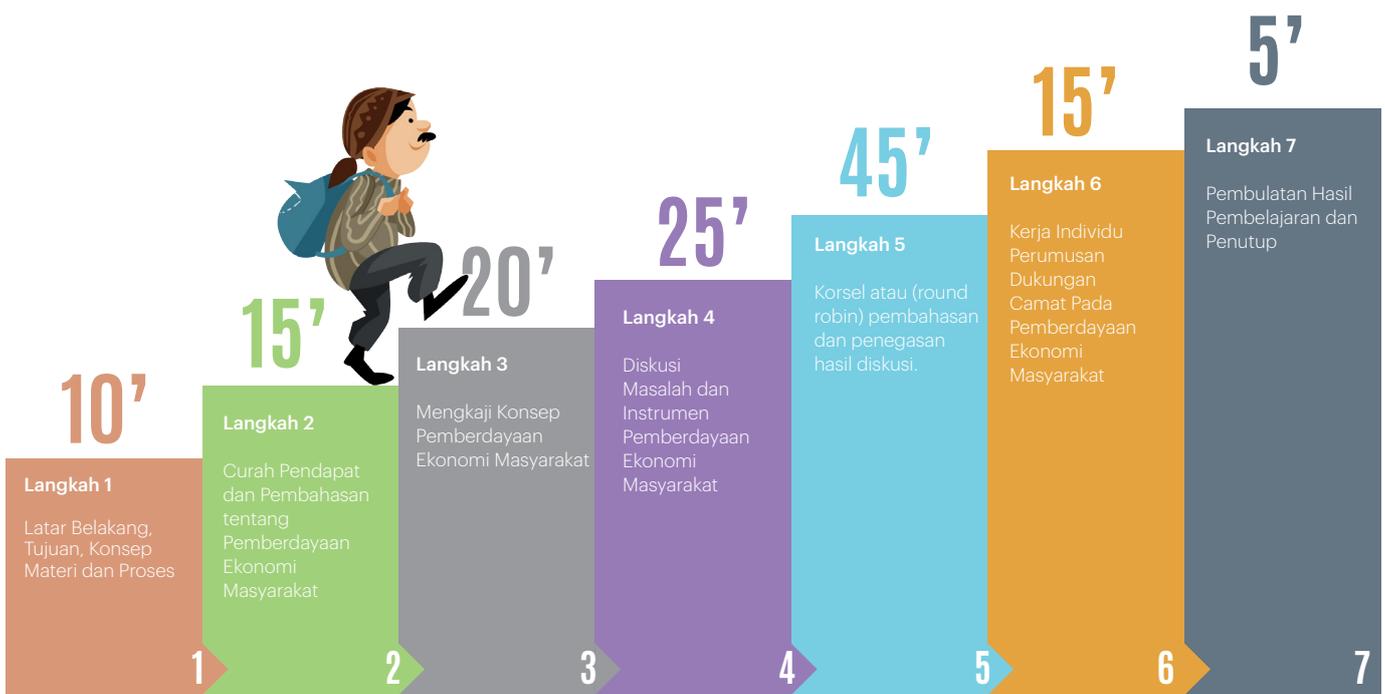
Kerangka ini akan membantu peserta dalam menjelaskan tentang konsep Pemberdayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM). PEM terdiri dari 6 komponen, yaitu (1) Pelaku dan Organisasi Usaha, (2) Tenaga Kerja, (3) Iklim Kewirausahaan, (4) Investasi, (5) Infrastruktur Ekonomi, dan (6) Sumber Daya Alam. Camat dapat memberdayakan ekonomi masyarakat melalui perijinan, rekomendasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan.

Dalam melakukan hal tersebut, camat diharapkan untuk memprioritaskan dan melindungi warga miskin dan rentan.



## 4. TAHAP-TAHAP PEMBELAJARAN

Pada langkah-langkah pokok penyajian, peserta akan mendapatkan gambaran tentang alur tahapan apa yang akan dilakukan pada setiap langkah untuk berapa lama dan seterusnya sebagaimana diilustrasikan berikut:



## TAHAP 1:

### Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, dan Kerangka Konsep Materi Bahasan

Pada langkah awal Modul 5 ini, secara interaktif peserta diajak untuk mempelajari Latar Belakang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Tujuan yang ingin dicapai juga Konsep Materi yang ditawarkan dan pada kesempatan ini peserta juga dapat mendiskusikan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan

## TAHAP 2:

### Curah Pendapat dan Pembahasan tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pada tahapan ini peserta akan diajak memahami konsep materi pemberdayaan masyarakat dan pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui curah pendapat. Peserta akan mendapatkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa pengertian pemberdayaan?
2. Apa pengertian pemberdayaan masyarakat?
3. Apa pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat?

Peserta akan mendapatkan pembulatan konsep materi pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dari fasilitator.

## TAHAP 3:

### Mengkaji Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Peserta akan mendapatkan penjelasan dari fasilitator mengenai konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat dan komponennya. Peserta dapat melihat ringkasan penjelasan dari fasilitator pada box 5.1

#### Box 5.1

#### Ringkasan Penjelasan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian  
Pemberdayaan  
Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan otonomi dan kemampuan, agar masyarakat dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkannya secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat umumnya **empat jenis kekuatan mencakup:**

- 1. Pemberdayaan politik:** memberdayakan masyarakat agar mampu terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
- 2. Pemberdayaan ekonomi:** memberdayakan warga untuk mengakses sumber-sumber barang dan jasa, menguasai faktor-faktor produksi, menguasai distribusi dan pemasaran, atau mengakses gaji/upah yang memadai.
- 3. Pemberdayaan sosial:** memberdayakan warga untuk mampu berelasi secara sosial, toleran, dan membangun modal sosial yang kuat.
- 4. Pemberdayaan psikologis:** membuat masyarakat percaya pada kemampuan dirinya, serta mampu mengoptimalkan potensi dirinya. (Keempat jenis pemberdayaan ini merujuk pada penjelasan Friedman, 1992; disertai dengan beberapa penyesuaian).

**Box 5.1**  
**Ringkasan Penjelasan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat**

<p>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</p>	<p>Pemberdayaan ekonomi merupakan pemberdayaan yang penting. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri maupun aspek kebijakannya.</p>
<p>6 Komponen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku dan organisasi usaha Pelaku dan organisasi usaha adalah perorangan atau organisasi yang melakukan usaha ekonomi produktif.</li> <li>2. Tenaga kerja Tenaga kerja adalah warga pada usia kerja yang siap untuk bekerja dan menerima upah dari pekerjaan tersebut.</li> <li>3. Iklim kewirausahaan Adalah kondisi atau lingkungan yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengembangkan ide dan mengubahnya menjadi kegiatan usaha.</li> <li>4. Investasi Adalah modal yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka</li> <li>5. Infrastruktur ekonomi Adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. misalnya jalan, jembatan, listrik air dan lain sebagainya</li> <li>6. Sumber daya alam (SDA) Adalah sumber-sumber yang disediakan oleh alam yang jika diolah akan menciptakan nilai tambah dan pendapatan bagi pelaku usaha.</li> </ol>
<p>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat harus Memprioritaskan serta Melindungi Warga Miskin dan Rentan</p>	<p>Pendekatan hak pada pembangunan kesejahteraan/pengentasan kemiskinan memandang dilindunginya warga miskin dan rentan. Dalam konteks PEM, mandat ini dipenuhi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan perlu difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan.</li> <li>2. Masyarakat yang memiliki pekerjaan akan tetapi berpendapat kurang perlu difasilitasi untuk mengakses kesempatan berusaha. Termasuk pada kelompok ini adalah para petani gurem serta nelayan kecil yang pendapatannya tidak layak.</li> <li>3. UKM (Usaha Kecil dan Menengah) perlu diperkuat, agar bertransformasi menjadi lembaga usaha yang kuat dan sehat</li> <li>4. Koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan perlu diperkuat agar menjadi lembaga yang kuat dan sehat.</li> <li>5. Pelaku usaha perempuan sering mengalami hambatan akses kepada modal dan kesempatan berusaha. Upaya afirmatif perlu dilakukan untuk memberdayakan para pelaku usaha perempuan.</li> <li>6. Penyandang disabilitas sering sulit mengakses pekerjaan dan kesempatan berusaha. Usaha afirmatif juga diperlukan bagi mereka.</li> <li>7. BUMDes dan kerja sama antar desa perlu didorong untuk memperkuat perekonomian desa, serta menghilangkan kesenjangan dengan perekonomian kota.</li> </ol>



## TAHAP 4:

### Diskusi Masalah dan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Peserta akan mengkaji masalah dan instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui diskusi di dalam 6 kelompok. Keenam kelompok ini adalah:

**Kelompok 1:** Pelaku dan organisasi usaha

**Kelompok 2:** Tenaga kerja

**Kelompok 3:** Iklim kewirausahaan

**Kelompok 4:** Investasi

**Kelompok 5:** Infrastruktur ekonomi

**Kelompok 6:** Sumber daya alam (SDA)

Tugas masing-masing kelompok adalah:

1. Mencermati bahan bacaan mengenai masalah dan instrumen pemberdayaan masing-masing komponen pemberdayaan ekonomi.
2. menyepakati kecamatan mana diantara peserta yang akan diangkat menjadi kasus pada diskusi kelompok masing-masing.
3. Mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi di kecamatan yang disepakati tadi serta instrumen pemberdayaan apa yang sudah dilakukan dan oleh siapa yang melakukannya.



**Bahan Bacaan Untuk Kelompok 1  
Pelaku dan Organisasi Usaha**

<p>Masalah</p>	<p>Biasanya Pelaku dan Organisasi Usaha, memiliki permasalahan</p> <p><b>1. Modal:</b> Kendala utama yang dihadapi UKM adalah modal. Karena masih berstatus bisnis mikro dan kecil, terkadang mereka tak dilirik lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.</p> <p><b>2. Manajemen:</b> Hambatan lain yang sering menjadi kendala para UKM adalah manajemen administrasi. Pelaku UKM banyak yang belum mengerti disiplin administrasi. Selain tak tahu cara membuat laporan keuangan, mereka malah mencampuradukkan antara pengeluaran pribadi dan perusahaan.</p> <p><b>3. Teknologi:</b> Masalah lain yang dihadapi oleh pelaku UKM adalah pemanfaatan teknologi. Teknologi dan penelitian biasanya dilakukan oleh kalangan perguruan tinggi. UKM baiknya bersinergi dengan perguruan tinggi sehingga hasil teknologi dan penelitian bisa dimanfaatkan secara maksimal.</p>
	<p><b>4. Birokrasi Perizinan</b> Sudah rahasia umum, masalah perizinan menjadi salah satu momok dalam dunia investasi. Proses dan waktu pengurusan perizinan sangat berpengaruh dalam perputaran roda perusahaan. Proses berbelit dan waktu yang lama akan sangat menghambat laju usaha.</p> <p><b>5. Daya beli masyarakat</b> Masalah lain yang tak kalah merisaukan adalah daya beli masyarakat. Hal ini berkaitan dengan masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 7,02 juta sampai Maret 2016. Daya beli masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha.</p>
<p><i>Instrumen Pemberdayaan Untuk Mengatasi Masalah Pelaku dan Organisasi Usaha</i></p> 	<p>Instrumen Pemberdayaan Pelaku Usaha adalah dengan memberikan layanan/program yang khas, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunjungan bisnis untuk belajar tentang kebutuhan bisnis, kekhawatiran dan masalah.</li> <li>2. Bantuan dengan pengadaan atau kontrak dengan pemerintah.</li> <li>3. Bantuan teknis untuk produksi, pengelolaan limbah dan kebutuhan serupa.</li> <li>4. Menyediakan rujukan ke program bantuan bisnis regional yang ditargetkan.</li> <li>5. Promosi perbaikan infrastruktur dan layanan publik sesuai kebutuhan untuk menangani masalah bisnis.</li> <li>6. Advokasi mengenai dampak keputusan perizinan dan peraturan.</li> <li>7. Keterlibatan dalam kualitas hidup masyarakat untuk meningkatkan daya tarik masyarakat/daerah sebagai tempat tinggal dan berbisnis.</li> <li>8. Bantuan dalam mendapatkan insentif atau pemberian pinjaman.</li> <li>9. Fasilitasi program pelatihan dan pendidikan untuk manajemen dan pekerja.</li> <li>10. Pengakuan untuk kontribusi pengusaha yang ada terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.</li> </ol>

Lembar Kerja Diskusi Kelompok 1  
 Komponen Pelaku dan Organisasi Usaha  
 Kecamatan.....

Masalah Pelaku dan Organisasi Usaha yang Terjadi di Kecamatan	:		
Instrumen Pemberdayaan Pelaku dan Organisasi Usaha yang Dilaksanakan di Kecamatan	Jenis Instrumen	Pelaksanaan	Hasil

**Bahan Bacaan Untuk Kelompok 2**  
**Tenaga Kerja**

*Masalah*

Masalah yang terjadi dalam ketenaga kerjaan antara lain:

**1. Jumlah Angkatan Kerja Tidak Sebanding dengan Jumlah Kesempatan Kerja**

Jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya akan mengakibatkan besarnya jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja yang besar apabila dimanfaatkan dengan baik maka akan meningkatkan kegiatan perekonomian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun apabila jumlah kesempatan kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, maka hal ini merupakan penyebab utama dari masalah pengangguran yang menjadi beban dalam pembangunan ekonomi.

**2. Mutu Tenaga Kerja yang Relatif Rendah**

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia selanjutnya adalah mutu atau kualitas tenaga kerja yang relatif rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi mutu tenaga kerja di Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para tenaga kerja menyebabkan minimnya penguasaan terhadap pengetahuan dan teknologi yang mengakibatkan rendahnya jumlah produksi yang dihasilkan, sedangkan biaya dalam memproduksinya tinggi.

**3. Persebaran Tenaga Kerja yang Tidak Merata**

Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di pulau Jawa. Sementara di daerah lain yang secara geografis wilayahnya lebih luas, masih kekurangan tenaga kerja, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hal ini mengakibatkan banyaknya jumlah pengangguran di pulau Jawa. Sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal.

**4. Rendahnya Upah yang Diterima Oleh Tenaga Kerja**

Rendahnya upah yang diterima oleh para tenaga kerja merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang sampai saat ini bisa dikatakan belum tuntas sepenuhnya. Hal ini dikarenakan jumlah tenaga kerja Indonesia yang ada sangat banyak, sedangkan ketersediaan kesempatan kerja sangat terbatas. Dengan banyaknya jumlah tenaga kerja dan sedikitnya lapangan kerja, apabila dilihat secara ekonomi berarti penawaran tenaga kerja tinggi dan permintaan tenaga kerja rendah, sehingga upah tenaga kerja juga akan rendah.

**5. Kemampuan Tenaga Kerja Kurang Sesuai dengan Pekerjaannya**

Seharusnya seseorang itu bekerja sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Jika seseorang melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, maka ia dapat bekerja secara efektif dan efisien. Sehingga dirinya dapat mencapai kualitas dan kuantitas kerja yang tinggi. Di negeri ini, seringkali terjadi seseorang yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki, sehingga pekerjaan yang dilakukannya tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

<p><i>Instrumen Pemberdayaan Untuk Mengatasi Masalah Tenaga Kerja</i></p>	<p>Instrumen Pemberdayaan Pelaku Usaha adalah dengan memberikan layanan/ program yang khas, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan studi kesiapan tenaga kerja (termasuk Jender dipilah) untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan tenaga kerja industri saat ini dan masa depan.</li> <li>2. Mempromosikan kolaborasi yang lebih baik antara sektor pendidikan dan komunitas bisnis, termasuk mempromosikan prakarsa pembelajaran pengalaman.</li> <li>3. Membina investasi pengusaha dalam pelatihan tenaga kerja.</li> <li>4. Mengadakan proses konsultasi tripartit mengenai masalah tenaga kerja.</li> <li>5. Bekerja dengan institusi pendidikan lokal untuk menilai kapasitas dan kemampuan sektor pendidikan pasca sekolah menengah dan kejuruan untuk lebih mencocokkan kemampuan semua pekerja lokal (terlepas dari jenis kelamin) dengan perubahan keterampilan yang dibutuhkan dalam ekonomi.</li> <li>6. Mempromosikan prakarsa pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesional di Kecamatan.</li> <li>7. Menarik pekerja terampil</li> <li>8. Berpartisipasi dalam perencanaan tenaga kerja.</li> </ol>
---	--

### Lembar Kerja Diskusi Kelompok 2

#### Komponen Tenaga Kerja

Kecamatan.....

<p>Masalah Tenaga Kerja yang Terjadi di Kecamatan</p>	<p>:</p>		
<p>Instrumen Pemberdayaan Tenaga Kerja yang Dilaksanakan di Kecamatan</p>	<p>Jenis Instrumen</p>	<p>Pelaksanaan</p>	<p>Hasil</p>

Bahan Bacaan Untuk Kelompok 3  
Iklim Kewirausahaan

<p><i>Masalah</i></p>	<p>Kewirausahaan adalah proses menciptakan sebuah ide dan mengubahnya menjadi bisnis. Kegiatan wirausaha menciptakan lapangan kerja, menciptakan usaha baru, mendiversifikasi peluang dan mempercepat proses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Permasalahan dalam kewirausahaan adalah iklim berusaha yang belum membaik.</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah diminta untuk dapat menciptakan iklim kewirausahaan yang baik guna mengembangkan kondisi berbisnis yang semakin mudah agar pengembangan aktivitas perekonomian di daerah-daerah juga menjadi semakin baik.</p> <p>Bahwa tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia yang saat ini berada pada peringkat ke-109 dari 189 negara sebagaimana survei yang dilakukan oleh Bank Dunia. Posisi Indonesia tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara Asean lainnya seperti Singapura pada posisi 1, Malaysia pada posisi 18, Thailand di posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam posisi 90 dan Filipina posisi 103. Untuk itu, ia mengemukakan agar pemerintah daerah harus melakukan sejumlah perbaikan dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesi, terutama bagi UMKM, juga semakin meningkat. Pemda perlu merevitalisasi peran Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), menciptakan efisiensi pada proses berusaha pengurusan izin, percepatan dalam hal waktu, kemudahan dalam syarat/prosedur dan biaya yang proporsional.</p> <p>Indonesia tengah mengalami yang namanya krisis wirausaha, di mana jumlah pengusaha di dalam negeri hanya berkisar 1,5 persen dari total penduduk yang ada. Keterbatasan jumlah pengusaha akan menimbulkan dampak serius bagi perekonomian bangsa. Banyak generasi muda usia produktif yang terpaksa menjadi pengangguran yang ujung-ujungnya menjadi beban negara dan menghambat kemajuan perekonomian Negara.</p>
<p><i>Instrumen Pemberdayaan Untuk Mengatasi Masalah Iklim Kewirausahaan</i></p>	<p>Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk mengatasi masalah adalah dengan memberikan Layanan/Program Pengembangan Wirausaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konseling langsung untuk memulai usaha baru sehubungan dengan: identifikasi kesempatan, identifikasi pasar, analisis kelayakan dan perencanaan bisnis; manajemen/ bantuan organisasi; merencanakan sumber daya manusia; peraturan dan perizinan; advokasi/akses terhadap program / layanan khusus.</li> <li>2. Menargetkan dan mendukung usaha kewirausahaan secara langsung dari anggota masyarakat yang rentan atau kehilangan hak (pemuda, penyandang cacat) dan segmen ekonomi lokal di mana perwakilan seimbang tidak mudah terlihat (perempuan).</li> <li>3. Membina/mempromosikan akses terhadap benih/modal ventura.</li> <li>4. Pendidikan/pelatihan wirausaha berkenaan dengan penyelenggaraan lokakarya/seminar untuk pengusaha baru atau memfasilitasi partisipasi wirausaha baru di berbagai jaringan pendukung kewirausahaan.</li> <li>5. Bantuan dengan fasilitas dan peralatan khusus dengan menyediakan fasilitas inkubator bersubsidi atau fasilitas layanan bisnis.</li> <li>6. Inisiatif penting lainnya seperti mendukung melalui dialog atau saran pengusaha baru dalam usaha mengkomersilkan teknologi terpilih</li> </ol>

Lembar Kerja Diskusi Kelompok 3

Komponen Iklim Kewirausahaan

Kecamatan.....

Masalah Iklim Iklim Kewirausahaan yang Terjadi di Kecamatan	:		
Instrumen Pemberdayaan Iklim Kewirausahaan di Kecamatan	<b>Jenis Instrumen</b>	<b>Pelaksanaan</b>	<b>Hasil</b>

*Masalah*

Daya tarik bisnis dan investasi pernah dianggap sebagai fungsi utama dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama terkait dengan pemasaran, daya tarik investasi dan bantuan pemilihan lokasi. Permasalahan umum mengenai investasi adalah:

**1. Masalah dan hambatan birokrasi**

Sudah bukan rahasia umum rentang birokrasi di daerah yang terlalu panjang, ini telah mengakibatkan biaya yang mahal serta terbuka peluang korupsi atau pungutan liar yang dapat mengakibatkan buruknya iklim investasi di Indonesia.

**2. Ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi otonomi daerah.**

Permasalahan dimaksud banyak terkait dengan masalah pajak dan retribusi daerah yang mengakibatkan kegiatan investasi menjadi *unpredictable*. Jika permasalahan ini terus berlanjut, maka daya saing investasi akan selalu menurun karena rendahnya minat investor untuk berinvestasi di daerah.

**3. Sumber daya manusia dan permasalahan kebijakan ketenagakerjaan**

Penerapan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang tidak transparan telah mengakibatkan kondisi ketenagakerjaan menjadi kurang produktif, tenaga kerja yang tidak terampil, etos kerja yang lemah, kenaikan upah minimum yang terlalu cepat, dan maraknya demo dan pemogokan serta kasus-kasus perburuhan yang membuat investor melakukan relokasi usahanya ke beberapa negara tetangga yang lebih kondusif.

**4. Tingkat korupsi yang masih tinggi**

Pelaksanaan otonomi daerah yang masih menunjukkan berbagai kelemahan bahkan makin merebakkan praktek korupsi dan pungutan liar ke daerah-daerah. Dalam praktek dilapangan banyak yang menggunakan instrumen regulasi sebagai justifikasinya.

**5. Kurangnya insentif bidang pajak maupun non pajak**

Dalam implementasinya di daerah, skema insentif yang diatur dalam berbagai aturan ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga kebijakan investasi yang di tetapkan oleh pemerintah tidak sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya oleh investor.

**6. Lemahnya penegakan dan kepastian hukum**

Munculnya berbagai kasus menunjukkan bahwa penegakan hukum khususnya hukum kontrak masih lemah. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan pada akhirnya mengurangi daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi.

**7. Lemahnya koordinasi antar kelembagaan**

Ketidakjelasan tupoksi dari lembaga pemerintahan telah menimbulkan koordinasi yang tidak harmonis dalam konteks kegiatan investasi. Terlebih kondisi di daerah kerap terjadi saling lempar tanggung jawab antar dinas. Koordinasi yang kurang terjadi oleh adanya pertimbangan subyektif yang berlatar belakang kepentingan suatu kelompok (politik) maupun ekonomi.

<p><i>Instrumen Pemberdayaan Untuk Mengatasi Masalah Investasi</i></p>	<p>Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk mengatasi masalah adalah dengan memberikan Layanan Investasi yang khas untuk investasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memelihara dan memperbaiki secara teratur "informasi paket situs terpilih".</li> <li>2. Mengidentifikasi peluang spesifik untuk perluasan bisnis dan industri yang ada.</li> <li>3. Memulai dan melakukan diskusi dan negosiasi dengan sektor swasta dan publik mengenai prakarsa pembangunan ekonomi, termasuk penjualan tanah dan penyediaan layanan Kecamatan yang memfasilitasi usaha dan pengembangan usaha.</li> <li>4. Konsultasikan dengan bisnis baru atau yang diusulkan mengenai rencana bisnis dan informasi pemasaran.</li> <li>5. Memfasilitasi tur ke dan untuk delegasi perdagangan internal dan eksternal.</li> <li>6. Secara teratur menilai "kesiapan investasi" masyarakat dan melakukan/ mempromosikan prakarsa yang meningkatkan kesiapan secara keseluruhan.</li> <li>7. Identifikasi dan konfirmasi peluang untuk mempromosikan bisnis baru dan atau peluang industri.</li> <li>8. Merancang, menerapkan dan berpartisipasi secara aktif dalam inisiatif pemasaran masyarakat (misalnya pameran dagang) dan mengejar prospek dan prospek yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Terus menindaklanjuti.</li> <li>9. Bertindak sebagai kontak awal dengan pengembang dan bisnis dari luar komunitas untuk kunjungan lapangan dan penyediaan data.</li> </ol>
--	--

Lembar Kerja Diskusi Kelompok 4  
Komponen Investasi

Kecamatan.....

<p>Masalah Iklim Investasi yang Terjadi di Kecamatan</p>	:		
<p>Instrumen Pemberdayaan Investasi di Kecamatan</p>	<p><b>Jenis Instrumen</b></p>	<p><b>Pelaksanaan</b></p>	<p><b>Hasil</b></p>

Bahan Bacaan Untuk Kelompok 5  
 Insfrastruktur Ekonomi

<p>Masalah</p>	<p>Peran pemimpin dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah memastikan bahwa lokasi bisnis memiliki koneksi transportasi yang layak sehingga pebisnis dapat memindahkan dan memperoleh faktor-faktor produksi dengan mudah. Dalam ekonomi global. Demikian juga dengan telekomunikasi dengan biaya rendah serta berkualitas sangatlah penting untuk memperoleh informasi tentang produk dan pasar. Sehingga infrastruktur ekonomi yang baik sangatlah dibutuhkan bagi pengembangan ekonomi masyarakat.</p> <p>Masalah umum adalah masih adanya wilayah yang belum memiliki fasilitas infrastruktur yang baik di Indonesia memang bukan hal yang baru lagi. Kita semua tahu akan hal itu. Tentu saja, pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia memang bisa dibilang tidak cepat atau cenderung lambat. Hal ini juga mengakibatkan tidak meratanya pembangunan infrastruktur tersebut. Ada banyak hal yang menjadi hambatan, misalnya saja sumber daya manusia yang tidak sesuai, pendanaan atau finansial, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun, perlahan-lahan sistem dan kebijakan sudah mulai dibenahi dengan mencari solusi dari setiap hambatan yang ada dalam pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Indonesia.</p>
<p>Instrumen Pemberdayaan Untuk Mengatasi Masalah Infrastruktur Ekonomi</p>	<p>Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk mengatasi masalah infrastruktur ekonomi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung pembukaan dan persiapan lokasi pengembangan kegiatan ekonomi/properti:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menyediakan database properti.</li> <li>b) Mendukung pengembangan taman bisnis dan tempat baru untuk memenuhi kebutuhan bisnis.</li> </ol> </li> <li>2. Menyediakan dan mengelola akomodasi untuk bisnis (misalnya inkubator bisnis).</li> <li>3. Memprioritaskan pengembangan layanan lingkungan lokal (misalnya peningkatan persediaan air, pengolahan air limbah dan pengumpulan limbah).</li> <li>4. Meningkatkan layanan lingkungan setempat dapat membantu:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Mempercepat pengembangan lokasi bisnis yang tidak terpakai.</li> <li>b) Meningkatkan jumlah start up bisnis di suatu lokasi tertentu.</li> </ol> </li> <li>5. Mendukung pengembangan infrastruktur untuk usaha yang lebih baik, seperti: jalan dan angkutan umum, gas, listrik dan telekomunikasi.</li> </ol>

Lembar Kerja Diskusi Kelompok 5  
 Komponen Infrastruktur Ekonomi

Kecamatan.....

Masalah Infrastruktur Ekonomi yang Terjadi di Kecamatan	:		
Instrumen Pemberdayaan untuk Mengatasi Masalah Intrastruktur Ekonomi di Kecamatan	Jenis Instrumen	Pelaksanaan	Hasil

Bahan Bacaan Untuk Kelompok 6  
Sumber Daya Alam

<p><i>Masalah</i></p>	<p>Dari perspektif kelestarian lingkungan, tantangan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah bagaimana menemukan cara untuk mengamankan pekerjaan dan pendapatan bagi penduduk lokal tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Diakui bahwa masalah sosial, ekonomi dan lingkungan (sumber daya alam) saling terkait dan perlu menggabungkan masing-masing aspek ini agar berhasil dalam jangka panjang. Permasalahan pengelolaan sumber daya alam menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang. Di lain pihak sumber daya alam tersebut telah banyak mengalami kerusakan-kerusakan, terutama berkaitan dengan cara-cara eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi. Dalam laporan PBB pada awal tahun 2000, telah diidentifikasi 5 jenis kerusakan ekosistem yang terancam mencapai limitnya, yaitu meliputi ekosistem kawasan pantai dan sumberdaya bahari, ekosistem lahan pertanian, ekosistem air tawar, ekosistem padang rumput dan ekosistem hutan.</p> <p>Kerusakan-kerusakan sumberdaya alam di dalam ekosistem-ekosistem tersebut terjadi terutama karena kekeliruan dalam pengelolaannya. Sehingga mengalami kerusakan yang disebabkan terjadinya perubahan besar, yang mengarah kepada pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Padahal sumber daya tersebut merupakan pendukung utama bagi kehidupan manusia. Menjadi sangat penting terkait kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mengarah kepada kecenderungan pengurasan (<i>depletion</i>) dan degradasi (<i>degradation</i>). Kecenderungan ini baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya dan terjadi di hampir semua kawasan, baik terjadi di negara-negara maju maupun negara berkembang atau miskin.</p>
<p><i>Instrumen Pemberdayaan Untuk Mengatasi Masalah Sumber Daya Alam.</i></p>	<p>Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk mengatasi masalah adalah mengintegrasikan kelestarian lingkungan ke dalam setiap aktivitas fungsional ekonomi lokal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat dan mengembangkan kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal dengan memasukkan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tujuan lingkungan jangka panjang;</li> <li>b) target jangka pendek dan menengah</li> </ol> </li> <li>2. Perencanaan Tata Ruang:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) persyaratan lahan untuk mendukung infrastruktur/ layanan lingkungan yang diperlukan;</li> <li>b) infrastruktur/layanan yang dibutuhkan untuk mendukung penggunaan lahan yang telah ditentukan.</li> </ol> </li> <li>3. Pengadaan dan operasi internal, menetapkan baseline lingkungan, menentukan peluang untuk memperbaiki kinerja lingkungan dan mengidentifikasi peluang terkait pemberdayaan ekonomi lokal.</li> <li>4. Penyampaian layanan, menetapkan standar dan metode lingkungan dan kinerja untuk penyampaian jasa lingkungan, pertimbangkan pemberdayaan ekonomi lokal dan keuntungan lain dari partisipasi sektor swasta.</li> <li>5. Pembiayaan modal dan operasi, menetapkan anggaran modal dan operasi untuk menangani prioritas kelestarian lingkungan dan mengidentifikasi mekanisme pembiayaan dan mekanisme pemulihan biaya.</li> <li>6. Kesadaran dan pendidikan publik, menetapkan pesan kunci untuk mendukung kelestarian lingkungan, tujuan keseluruhannya adalah untuk membangun dukungan masyarakat untuk meningkatkan kelestarian lingkungan</li> </ol>

Lembar Kerja Diskusi Kelompok 6  
 Komponen Sumber Daya Alam  
 Kecamatan.....

Masalah Sumber Daya Alam yang Terjadi di Kecamatan	:		
Instrumen Pemberdayaan untuk Mengatasi Sumber Daya Alam di Kecamatan	Jenis Instrumen	Pelaksanaan	Hasil

## TAHAP 5:

### **Korsel atau (*round robin*) pembahasan dan penegasan hasil diskusi.**

Setelah diskusi untuk mengisi lembar kerja, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dengan metode korsel atau *round robin* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masing-masing kelompok mempersiapkan beberapa orang juru bicara (minimal 6 orang) untuk menjelaskan hasil diskusi kepada “tamunya” mereka.
2. Masing-masing juru bicara akan menjadi tuan rumah bagi kelompok lain yang datang berkunjung
3. Para tamu akan bergiliran datang setiap 5 menit sesuai dengan tanda yang diberikan oleh fasilitator. Setiap tamu baru yang datang, juru bicara kelompok harus berganti.
4. Pada 5 menit pertama, anggota kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2, anggota kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3, anggota kelompok 3 berkunjung ke kelompok 4, anggota kelompok 4 berkunjung ke kelompok 5, anggota kelompok 5 berkunjung ke kelompok 6, dan anggota kelompok 6 berkunjung ke kelompok 1.
5. Setelah 5 menit selanjutnya masing-masing anggota kelompok bergeser ke kelompok lainnya lagi, yaitu kelompok 1 berkunjung ke kelompok 3, kelompok 2 berkunjung ke kelompok 4, kelompok 3 berkunjung ke kelompok 5, kelompok 4 berkunjung ke kelompok 6, kelompok 5 berkunjung ke kelompok 1, dan kelompok 6 berkunjung ke kelompok 2; waktu kunjungan selama 5 menit.
6. Demikian seterusnya sampai semua kelompok terkunjungi.

Setelah semua kelompok terkunjungi, selanjutnya peserta dan fasilitator bersama-sama akan membulatkan hasil diskusi pada sesi ini.

## TAHAP 6:

### **Kerja Individu Identifikasi Kebutuhan dan Rumusan Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pada tahap ini setiap anggota pada semua kelompok akan bekerja secara individual untuk merumuskan dukungan camat pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perumusan dukungan camat ini didahului dengan memetakan masalah terkait setiap komponen pemberdayaan ekonomi, memetakan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang sudah dilaksanakan oleh berbagai lembaga berikut hasilnya.

## Lembar Tugas Individu

### Perumusan Dukungan Camat Pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Komponen PEM	Masalah yang dihadapi di Kecamatan	Apa yang sudah dilakukan oleh Lembaga Terkait		Hasil	Potensi dukungan inovatif yang dapat dilakukan Kecamatan
		Jenis Kegiatan	Pelaksanaan		
Pelaku dan Organisasi Usaha					
Tenaga Kerja					
Iklim Kewirausahaan					
Investasi					
Infra Struktur Ekonomi					
Sumber Daya Alam					

## TAHAP 7:

### Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup

Pada langkah akhir dalam modul ini, peserta akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang akan diberikan sebagai berikut:

1. Apa pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat?
2. Apa saja komponen pemberdayaan ekonomi masyarakat?
3. Bagaimana memprioritaskan komponen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mampu menentukan kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat?
4. Bagaimana menemukan dan memilih cara mendukung peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat?

Selanjutnya, peserta bersama fasilitator menyimpulkan pesan-pesan kunci, dari modul 5 tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, sebagai berikut:

1. Bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan kemampuan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) terdiri dari 6 komponen, yaitu (1) Pelaku dan Organisasi Usaha, (2) Tenaga Kerja, (3) Iklim Kewirausahaan, (4) Investasi, (5) Infrastruktur Ekonomi, dan (6) Sumber Daya Alam.
3. Peran Camat/Kecamatan dalam mengatasi kesenjangan adalah dengan mendukung 6 komponen PEM sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya.



## MODUL

# 06

# PEMERINTAHAN UMUM



### Materi Bahasan:

Modul ini berisi penjelasan tentang Konsep, Prinsip dan Peningkatan Kualitas Penerapan Urusan Pemerintahan Umum kedalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Kecamatan. Dalam penjabarannya materi Modul ini akan mencakup beberapa sub materi sebagai berikut :

- 1.1. Konsepsi Wawasan Kebangsaan Indonesia berbasis Wawasan Nusantara, Peningkatan Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah
- 1.2. Pengembangan Demokrasi, Penghargaan terhadap HAM, Responsif Jender dan Pembangunan Inklusi
- 1.3. Peningkatan koordinasi dalam menangani Konflik Sosial
- 1.4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang mendesak yang tidak tertampung dalam Pelimpahan kewenangan dan tidak ditangani Instansi Vertikal



### **Kompetensi Dasar:**

1. Perumusan Kebijakan
2. Pengambilan Keputusan
3. Peningkatan Koordinasi
4. Kepepmimpi nan lapangan



### **Perubahan yang Diharapkan:**

#### **Peserta BimTek:**

Setelah menerima materi ini Peserta BimTek akan bertambah kompetensinya sehingga mampu :

1. Memahami dengan baik konsep dan prinsip-prinsip Wawasan Kebangsaan Indonesia sebagai penerapan doktrin Nasional Wawasan Nusantara,
2. Meningkatkan Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional di wilayah yang di titik beratkan kepada langkah Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap timbul dan berkembangnya potensi Konflik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah ditingkat Kecamatan ;
3. Menjalankan dengan baik fungsi Camat sebagai Kepala Wilayah yang mampu menjaga kondusifitas Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat di wilayah melalui langkah-langkah deteksi dini dan cegah dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah social secara lintas sektor dan lintas fungsi.
4. Memiliki kesadaran, tanggung jawab dan motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah di tingkat Kecamatan agar tidak terlepas dari koridor system dan mekanisme kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ikha dalam wadah NKRI.



### **Waktu:**

4 JP ( Jam Pelajaran ) @ 45 menit = 180 menit



## 1. LATAR BELAKANG

Keseluruhan materi yang diberikan dalam modul ini mengajak Peserta untuk memahami kembali Konsep Wawasan Nusantara sebagai landasan bagi peningkatan Wawasan Kebangsaan Indonesia, Peningkatan Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan. Adapun hal-hal yang melatar belakangnya adalah :

1. Urusan Pemerintahan Umum diserahkan pelaksanaannya kepada Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Kecamatan pada hakekatnya adalah untuk melakukan pengendalian agar penerapan Otonomi Daerah di seluruh wilayah tanah air tidak sampai keluar dari rel yang ditetapkan sekaligus untuk merepresentasikan kehadiran Pemerintahan Pusat dalam setiap kegiatan pemerintahan di seluruh wilayah tanah air ;
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, telah memosisikan Camat pada tempat yang sangat strategis agar dapat mendukung keberhasilan penerapan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah ;
3. Secara faktual tingkat kompetensi Camat di satu daerah dengan daerah lain tidak merata, dan sebagian besar daripadanya masih belum memiliki kompetensi teknis dan manajerial sebagaimana yang diharapkan ;
4. Untuk dapat memenuhi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang professional dan melayani di tingkat Kecamatan, maka diperlukan langkah cepat tapi sistematis dan terukur untuk meningkatkan kapasitas Camat agar lebih memahami konsep dasar Wawasan Nusantara sebagai dasar bagi pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia, Peningkatan Kewaspadaan dan Ketahanan dalam proses kehidupan masyarakat, bangsa dan negara khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur ;
5. Tingkat keberhasilan pembelajaran pada Modul ini diukur dari kemampuan masing-masing Peserta didalam memahami, menjelaskan dan menerapkan materi pembelajaran yang diberikan baik selama pembelajaran maupun setelah kembali ketempat tugas masing-masing.





## 2. TUJUAN

### 2.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang ingin dicapai dari penyampaian Modul Pemerintahan Umum ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para Peserta didalam mengembangkan nilai dan prinsip-prinsip Wawasan Nusantara, Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Nasional serta penghargaan terhadap HAM, Jender dan pembangunan inklusif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Kecamatan.

### 2.2. Tujuan Khusus

Meningkatkan kemampuan Peserta didalam mengembangkan kehidupan demokrasi, penghargaan HAM, Responsif Jender dan Pembangunan inklusif dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat Kecamatan ;

1. Meningkatkan kemampuan Peserta didalam mengenali timbul dan berkembangnya potensi konflik sosial ;
2. Meningkatkan kemampuan Peserta didalam mengkoordinasikan penyelesaian konflik sosial secara lintas sektor dan lintas fungsi ;
3. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Peserta untuk melaksanakan tugas-tugas mendesak lainnya yang belum tercakup dalam pelimpahan wewenang dan belum dilaksanakan oleh instansi Vertikal di tingkat Kecamatan ;
4. Meningkatkan kesadaran dan motivasi Peserta untuk menjaga agar pelaksanaan Otonomi Daerah di tingkat Kecamatan tetap berada pada koridor penerapan Nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ikha dalam wadah NKRI.



### 3. INDIKATOR KEBERHASILAN

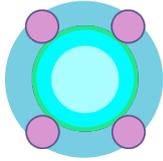
#### Umum

- a. Peserta memahami konsep Urusan pemerintahan Umum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Kecamatan;
- b. Peserta memahami nilai dan prinsip-prinsip Wawasan Nusantara, Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Nasional serta mampu menjelaskannya kembali dengan baik ;

#### Khusus

- a. Peserta mampu mengembangkan kehidupan Demokrasi, penghargaan terhadap HAM, pengarus utamaan Jender dan pembangunan inklusif dalam proses perumusan serta penerapan kebijakan ;
- b. Peserta mampu melakukan teknik deteksi dini dan cegah dini dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Kecamatan ;
- c. Peserta mampu meningkatkan koordinasi, komunikasi dan konsultasi lintas sektor dan lintas fungsi dalam menangani berbagai permasalahan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Kecamatan ;
- d. Peserta menyadari bahwa disamping tugas pokoknya masih terdapat tugas lain yang mendesak dan harus dilaksanakan walupun tidak tercakup dalam pelimpahan kewenangan dan tidak juga belum dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang ada di Kecamatan ;
- e. Peserta mampu meningkatkan kesadaran dan motivasinya untuk turut serta menjaga agar penyelenggaraan otonomi daerah di tingkat Kecamatan yang dipimpinnya tidak sampai keluar dari koridor nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ikha dalam Wadah NKRI.





## KERANGKA MATERI

PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENERAPAN WAWASAN NUSANTARA, KEWASPADAAN NASIONAL DAN KETAHANAN NASIONAL

PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, PENGHARGAAN THD HAM, RESPONSIF JENDER DAN PEMBANGUNAN INKLUSIF

PENINGKATAN PENGENDALIAN KONFLIK SOSIAL SECARA LINTAS SEKTOR DAN LINTAS FUNGSI

PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG MENDESAK UNTUK DILAKSANAKAN DI WILAYAH YANG BELUM DILAKSANAKAN INSTANSI VERTIKAL

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG DINAMIS DAN KONDUSIF DI TINGKAT KECAMATAN

PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH YANG DINAMIS DAN KONDUSIF DALAM KORIDOR N.K.R.I

### PENJELASAN RINGKAS :

- Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi batasan yang tegas tentang Urusan Pemerintahan Umum. Secara garis besar disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya di daerah dilimpahkan kepada Kepala Daerah. Ditingkat Kecamatan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota kepada Camat.
- Secara substantif Urusan Pemerintahan Umum mencakup 4 ( empat ) sub kegiatan yaitu: (1) Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang bersumber dari Wawasan Nusantara, Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Nasional, (2) Pengembangan kehidupan Demokrasi, penghargaan terhadap HAM, Responsif Jender, dan Pembangunan yang Inklusif, (3) Pencegahan dan penanganan Konflik Sosial, (4) Pelaksanaan Tugas lain yang mendesak untuk dilakukan di wilayah tetapi belum dilimpahkan dan belum dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang ada di wilayah.

### Penjelasan Sub Materi (1) :

- Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang berbasis Wawasan Nusantara, Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Nasional mengajak para Peserta untuk kembali mengembangkan cara pandang tentang diri dan lingkungan

kehidupan bangsa secara utuh dan menyatu antara lingkungan geografis, demografis, SDA dan dinamika kehidupan IPOLEKSOSBUD HANKAM ;

- Berlandaskan kesadaran akan potensi Sumber Kekayaan Alam dan Sumber Daya Alam sekaligus potensi Ancaman yang mungkin timbul, Peserta diajak untuk mewaspadaikan segala kemungkinan yang dapat mengancam keselamatan dan kedaulatan bangsa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- Atas dasar kewaspadaan akan potensi Ancaman terhadap keselamatan dan kelangsungan hidup bangsa tersebut maka Peserta diajak untuk selalu memperkuat Ketahanan setiap aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara di tingkat Kecamatan agar selalu mampu bertahan dari ancaman dari dalam maupun dalam negeri.

### **Penjelasan Sub Materi ( 2 )**

- Pengembangan kehidupan Demokrasi mengajak Peserta untuk memahami secara benar tentang prinsip-prinsip kehidupan Demokrasi yang sesuai dengan latar belakang sosio kultural bangsa, yang tidak lain adalah pencerminan dari nilai yang terkandung dalam sila 4 Pancasila ;
- Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia ( HAM ) mengajak Peserta untuk selalu menghargai Hak Asasi Manusia secara seimbang dan proporsional dengan selalu mempedomani nilai-nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagaimana tercantum dalam sila 2 Pancasila ;
- Peningkatan kepedulian atas keseimbangan Jender dan pembangunan yang inklusif mengajak Peserta untuk melihat masalah kesetaraan Jender dan pembangunan inklusif dari kaca mata budaya bangsa khususnya dari kaca mata Pancasila. Dari sudut pandang tersebut, Responsif Jender dan Pembangunan Inklusi tidak lain adalah penjabaran lebih jauh dari nilai keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam sila ke 5 Pancasila.

### **Penjelasan Sub Materi (3)**

- Peningkatan koordinasi dalam menangani Konflik Sosial secara Lintas Sektor dan lintas fungsi mengajak Peserta untuk menyadari bahwa sebagai seorang Camat yang bertugas di wilayah, tidak mungkin mampu menyelesaikan sendiri seluruh permasalahan dalam praktik kehidupan masyarakat , bangsa dan negara di tingkat Kecamatan ;

- Melalui materi ini Peserta diajak untuk berlatih bagaimana melakukan kegiatan deteksi dini dan sekaligus langkah-langkah cegah dini terhadap kemungkinan timbulnya masalah sosial yang berdampak luas dan dapat mengganggu kondusifitas kehidupan masyarakat yang akhirnya bermuara kepada gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman ;
- Dalam pelaksanaan kegiatan deteksi dini dan cegah dini tersebut Peserta diajak untuk memetakan sekaligus memanfaatkan secara maksimal peran serta stake holder terkait yang meliputi seluruh lembaga dan instansi lintas sektor maupun berbagai simpul penggerak masyarakat dari lintas fungsi.

#### **Penjelasan Sub Materi ( 4 )**

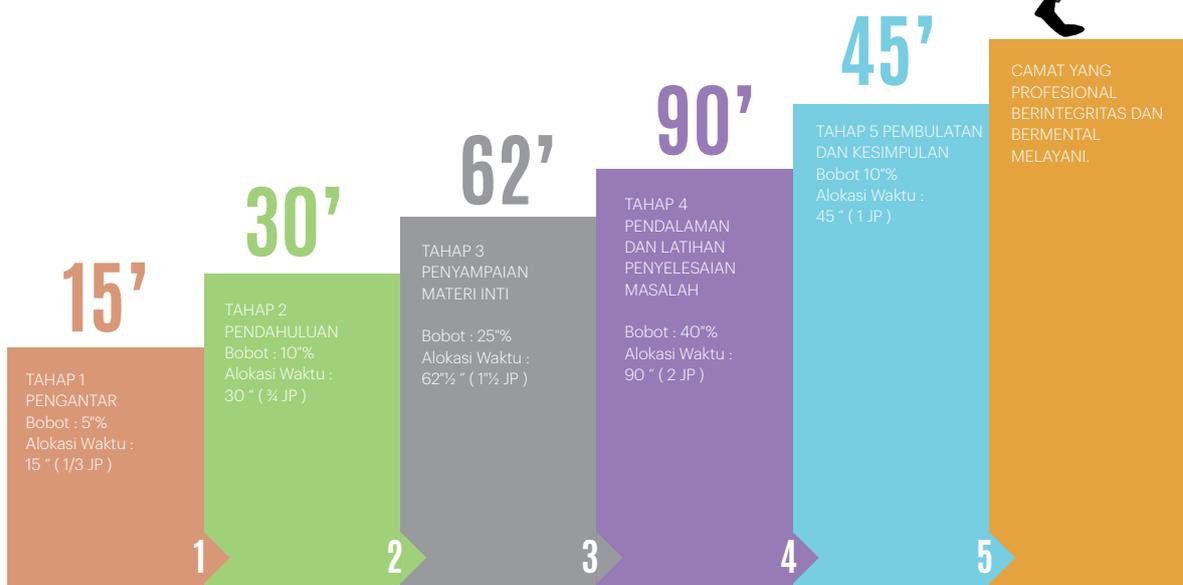
- Pelaksanaan Tugas lain yang mendesak dan harus dilaksanakan tetapi belum tertampung dalam pelimpahan wewenang Kepala Daerah dan juga belum tertangani oleh Instansi Vertikal di Daerah, pada dasarnya mengajak Peserta untuk menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas selalu terdapat tugas lain yang datangnya tiba-tiba dan tidak diperhitungkan sebelumnya.
- Atas kesadaran demikian diharapkan Peserta dapat melaksanakan setiap tugas lain yang mendesak untuk dilaksanakan meskipun tidak termasuk dalam cakupan pelimpahan wewenang secara formal dan juga tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang ada di tingkat Daerah maupun Kecamatan.
- Keberhasilan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum disuatu wilayah Kecamatan akan memantapkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan secara umum di Kecamatan bersangkutan dan secara berjenjang diharapkan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kondusifitas praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kecamatan bersangkutan yang pada gilirannya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan fungsi utama Camat di wilayah.
- Hasil akhir yang ingin dicapai dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan adalah: (1) Terwujudnya jaring kendali yang lebih kuat tapi dinamis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten atau Kota agar proses penyelenggaraan pemerintahan dalam koridor Otonomi Daerah di era PILKADA Langsung sekarang ini tetap berjalan pada jalur yang benar. (2) Mengarahkan

agar proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan mampu memberikan kontribusi positif terhadap penguatan patron kehidupan kebangsaan di tingkat *grass root* sehingga dapat kembali berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, yang dalam penerapannya selalu diiringi dengan peningkatan Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional demi mewujudkan Tujuan Nasional guna mencapai Cita-cita Nasional yang telah diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

- Perpaduan kedua parameter diatas akan memunculkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang memberi ruang kepada dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya di daerah khususnya di wilayah Kecamatan, namun tetap dalam koridor sistem kehidupan berbangsa yang berbhineka tunggal ika dan sistem serta mekanisme kehidupan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) yang berdasar Pancasila dan UUD 1945.



## 4. TAHAP-TAHAP PEMBELAJARAN



## TAHAP 1: PENGANTAR

Pada tahap pengantar ini Peserta diajak untuk bekerjasama dan aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan sistem pembelajaran orang dewasa.

Peserta dan Nara sumber saling bekerjasama untuk bisa mempelajari materi yang harus diselesaikan secara gradual (secara bertahap) dan partisipatif sehingga semuanya merasa senang dan tertarik untuk mengikuti lebih lanjut. Khusus terhadap peserta yang kelihatan kurang tertarik harus diberikan perhatian secara khusus agar setahap demi setahap menjadi ikut tertarik dan merasa senang mengikuti pembelajaran.

Pada tahap pengantar ini hanya disinggung tujuan, Ruang Lingkup, kedudukan dan arti penting materi bagi proses pelaksanaan Bimbingan Teknis secara keseluruhan.

Target dan sasaran yang ingin diraih dari pemberian materi pengantar ini adalah timbul dan berkembangnya rasa senang dan tertarik dari peserta untuk mengikuti dengan cermat materi pembelajaran selanjutnya.

## TAHAP 2: PENDAHULUAN

- Pada tahap pendahuluan ini disampaikan materi umum tentang penyelenggaraan pemerintahandaerah di era otonomi daerah.
- Untuk menggugah semangat Peserta, maka pada tahap pendahuluan ini Narasumber harus berusaha agar peserta menyampaikan pengalamannya masing- masing didalam menjalankan pemerintahan di Kecamatan.
- Diupayakan agar seluruh atau setidaknya sebagian besar peserta menyampaikan pengalamannya, dan baru kemudian Narasumber mengarahkan perhatian seluruh peserta kepada topik utama yang dibahas, yaitu penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan dengan segala seluk beluknya.
- Target dan sasaran yang ingin diwujudkan pada tahap pendahuluan ini adalah terbangunnya anggapan seluruh peserta tentang betapa penting dan perlunya materi pembelajaran yang akan diberikan.
- Dalam membangun anggapan positif tersebut Narasumber perlu menggunakan teknik jajak pendapat atau *brainsforming* baik antar peserta maupun antara peserta

### TAHAP 3:

#### PENYAMPAIAN MATERI INTI

- Materi inti dari modul 6 terdiri dari 4 bagian, yaitu (1) Pengembangan Waawasan kebangsaan yang berbasis Wawasan Nusantara, Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan nasional, (2) Pengembangan kehidupan Demokrasi, Penghargaan terhadap HAM, Responsif Jender dan Pembangunan inklusif, (3) Pencegahan dan penanganan Konflik Sosial secara lintas sektor dan lintas fungsi, (4) Pelaksanaan tugas lain yang mendesak dilakukan meski tidak tercakup dalam pelimpahan wewenang dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kecamatan ;
- Penyampaian keseluruhan materi inti ditekankan kepada materi ketiga, yaitu peningkatan kemampuan untuk melakukan kegiatan deteksi dini dan cegah dini didalam menghadapi timbul dan berkembangnya konflik sosial bersama berbagai komponen dan unsur secara lintas sektor dan lintas fungsi ;
- Proforsi penyampaian masing-masing sub materi adalah ; 25" % untuk sub materi (1), 25"% untuk sub materi 2, 40"% untuk sub materi 3 dan 10"% untuk penyampaian sub materi 4. Dengan demikian dalam praktiknya nanti penyampaian materi Modul 6 ini akan lebih banyak dalam bentuk penyelesaian kasus2 yang dialami oleh peserta dilapangan sehingga tidak membosankan.

### TAHAP 4:

#### PENDALAMAN DAN PENYELESAIAN KASUS

- Pada tahap Pendalaman ini akan di jagai tingkat kemampuan Peserta didalam melakukan Deteksi Dini dan Cegah Dini atau kemampuan untuk mengenali potensi timbulnya konflik sosial yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara di tingkat Kecamatan sekaligus mampu melakukan langkah-langkah pencegahan agar potensi konflik tersebut tidak sampai berkembang menjadi permasalahan riil ditengah praktik kehidupan masyarakat ;
- Peningkatan kemampuan Peserta didalam kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini atau dengan kata lain diistilahkan dengan kemampuan untuk mengenali secara cepat potensi timbulnya konflik sekaligus mampu melakukan langkah pencegahan agar tidak berkembang menjadi masalah sosial, pada tahap ini akan dilakukan melalui teknik simulasi dengan cara mewajibkan pesertsa untuk menyelesaikan kasus-kasus

yang diberikan oleh Narasumber ;

- Alokasi waktu untuk menyelesaikan persoalan yang diberikan adalah 15 menit dan alokasi waktu untuk mempresentasikannya 15 menit, tanya jawab juga dibatasi hanya 15 menit.
- Agar kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini ini dapat memberi kontribusi kepada pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur, maka kasus-kasus yang dimunculkan nantinya diupayakan kasus yang erat atau langsung berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Walaupun alokasi waktu untuk tahap pendalaman dan pemecahan kasus ini jauh lebih banyak dibandingkan tahapan yang lain, tetapi waktu yang hanya 45 menit itu jelas masih jauh dari cukup untuk pembelajaran latihan memecahkan kasus secara individu. Karena itu dalam pelaksanaannya nanti sesi pemecahan kasus ini akan dilaksanakan secara berkelompok ;
- Agar tahapan ini betul-betul dapat memunculkan potensi Peserta, maka peran Narasumber diusahakan hanya sebagai fasilitator dan moderator yang hanya memberikan komentar jika betul-betul dianggap perlu saja.

## **TAHAP 5:**

### **PEMBULATAN HASIL PEMBELAJARAN DAN PENUTUPAN**

- Tahap terakhir dari penyampaian materi modul 6 ini adalah tahap pembulatan dan pengakhiran. Pada tahap ini Peserta diajak untuk mereview sekaligus menyimpulkan keseluruhan materi yang telah diterima untuk kemudian menyampaikan kembali dalam bentuk jawaban atas pertanyaan lisan seputar materi pembelajaran.
- Peran Narasumber dalam tahap ini diupayakan lebih aktif daripada tahap-tahap sebelumnya agar dapat mengarahkan lontaran-lontaran pemikiran atau jawaban peserta yang keluar dari konteks bahasan materi yang diberikan.
- Pertanyaan-pertanyaan disampaikan secara lisan dan dijawab secara lisan setelah Nara sumber menyampaikan pembulatan dan kesimpulan atas seluruh materi yang diberikan.
- Hasil penilaian atas jawaban Peserta disampaikan secara global sebagai bagian dari evaluasi hasil pembelajaran kelas dan merupakan entry point untuk pengakhiran materi .

- Beberapa contoh pertanyaan yang dapat diajukan kepada Peserta pada tahap pembulatan dan pengakhiran ini antara lain adalah sebagai berikut :
  1. Apa yang Anda ketahui tentang Urusan Pemerintahan Umum ?
  2. Mengapa Camat perlu melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan?
  3. Apakah menurut Anda Wawasan Nusantara masih diperlukan oleh Bangsa Indonesia ?
  4. Mengapa kita harus waspada terhadap segala bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri ?
  5. Mengapa seorang Camat harus mampu mendeteksi sejak dini kemungkinan terjadinya masalah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan ?
  6. Apakah menurut Anda kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dapat memberi kontribusi bagi peningkatan Ketahanan Nasional di Daerah ?

Selanjutnya peserta dan fasilitator menyimpulkan secara bersama hasil pembelajaran modul 6 ini dengan membahas hasil yang penting sebagai berikut;

- Bahwa inti dari materi pemerintahan umum adalah *menginternalisasikan* Konsep Wawasan Nusantara dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- *Mengaktualisasi* kan Sikap dan Perilaku Kewaspadaan Nasional dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- *Menghabbituasi* kan sikap dan perilaku Kewaspadaan terhadap Ancaman Gangguan Halangan dan Tantangan sehingga terwujud Ketahanan IPOLEK SOSBUD dan HANKAM di wilayah Kecamatan.



MODUL

07

# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA





### **Materi Bahasan:**

- 7.1 Kebijakan Pemerintah tentang Binwas Kecamatan untuk Kegiatan Desa
- 7.2 Menciptakan alat dan mekanisme BinWas serta Pelaporan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- 7.3 Pendekatan BinWas Suportif untuk Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat



### **Kompetensi Dasar:**

- (1) Fasilitasi
- (2) Koordinasi
- (3) Pengambilan Keputusan
- (4) Akuntabilitas



### **Perubahan yang Diharapkan:**

#### **Peserta BimTek:**

Peserta membuat alat dan mekanisme BinWas Inovatif serta melaksanakannya secara konsisten sesuai dengan kewenangan dan tugasnya.



### **Waktu:**

4 JP (Jam Pelajaran) @ 45 menit = 180 menit



## 1. LATAR BELAKANG

Peserta akan memahami, alasan alasan mengapa Pembinaan dan pengawasan adalah salah satu topik yang sangat penting bagi seorang Camat, adalah sebagai berikut :

- 1) Seorang Camat memiliki tugas untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan (BinWas) terhadap kegiatan desa yang diamanatkan baik oleh undang undang maupun peraturan pemerintah, atas laporan kegiatan (a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (b) Pelaksanaan Pembangunan desa (c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan (d) Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Program pembinaan dan Pengawasan adalah hal yang sangat penting dalam rangka seorang camat mengelola kinerja kecamatannya yang dibantu oleh para staf Kecamatan.
- 3) Dalam kenyataannya BinWas, mengalami tantangan ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Sarpras. Selain itu, ketidakjelasan alat dan mekanisme BinWas serta pelapor yang kurang dapat menggambarkan keadaan dan kinerja sesungguhnya berakibat pada kurang efektifnya BinWas Kecamatan terhadap kegiatan Desa.
- 4) Selain hal tersebut, pendekatan BinWas seringkali menerapkan pola lama dengan pendekatan yang lebih bernuansa mengontrol dan mencari kesalahan, bukan berfokus pada peningkatan kinerja dan menciptakan hubungan kerja yang saling mendukung.

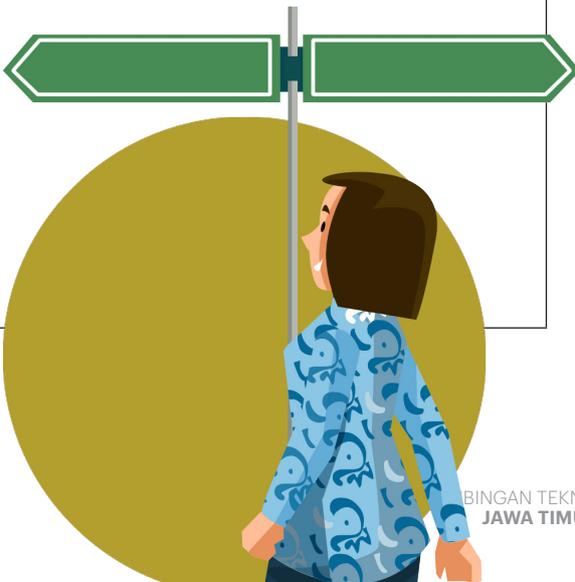


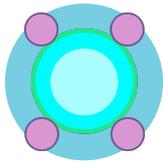
## 2. TUJUAN

Peserta memahami kewenangan dan tugas tugas dalam Binwas, dan pentingnya melakukan Binwas dengan pendekatan suportif serta menciptakan mekanisme dan alat BinWas termasuk pelaporan yang transparan dan efektif.

Melalui proses pembelajaran yang interaktif, maka berikut adalah tujuan pada setiap materi bahasan dan indikator capainnya untuk mengukur tingkat keberhasilannya sebagai berikut :

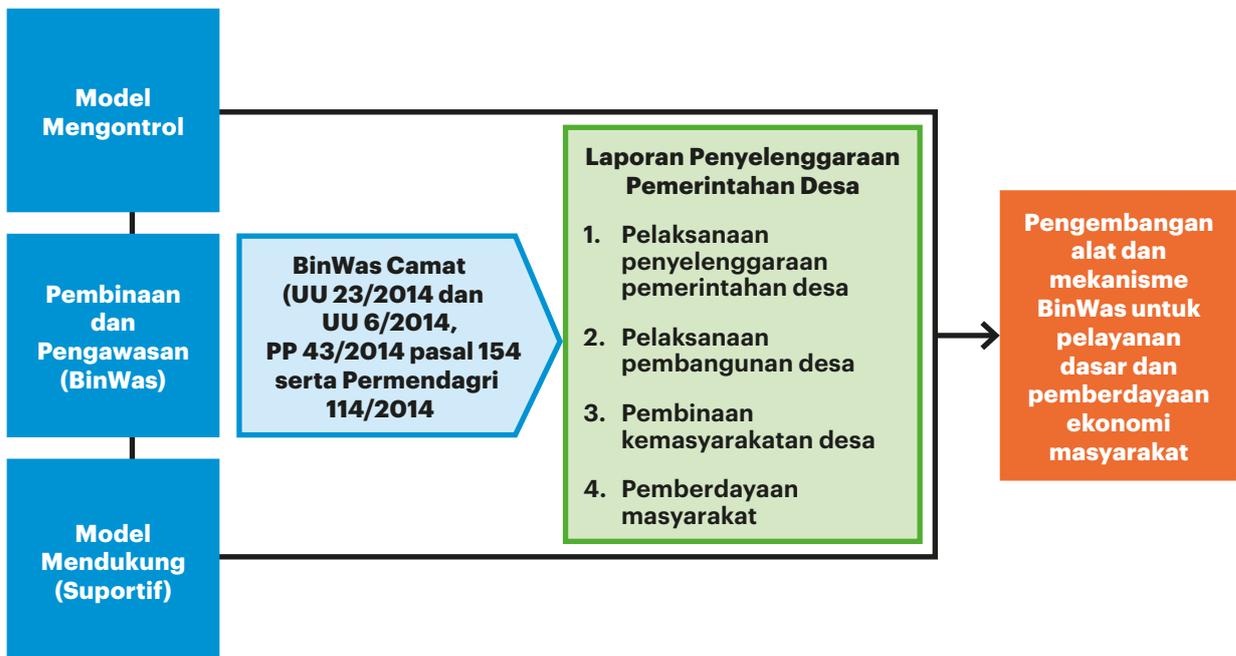
**Tujuan Sub Pokok Bahasan :**

<p><b>Tujuan Materi Bahasan 7.1: Pendekatan BinWas Suportif untuk Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.</b> Setelah Proses Pembelajaran Peserta dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Menjelaskan Pentingnya melakukan BinWas Suportif (Suportive Supervision)</li> <li>(b) Mau melakukan BinWas Suportif.</li> </ul>	<p><b>Indikator Capaian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Peserta meyakini BinWas suportif kepada kegiatan Desa adalah pendekatan yang lebih sesuai.</li> <li>(b) Memahami bagaimana melakukan BinWas yang Suportif.</li> </ul>
<p><b>Tujuan Materi Bahasan 7.2: Kebijakan Pemerintah tentang Binwas Kecamatan untuk Kegiatan Desa</b> Setelah Proses Pembelajaran peserta dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Memahami kewenangan dan tugas Camat dalam BinWas Kegiatan Desa.</li> <li>(b) Dapat mendelegasikan tugas BinWas kepada para staff yang sesuai dengan kompetensi, beban kerja dan tupoksinya.</li> </ul>	<p><b>Indikator Capaian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Peserta dapat memahami kewenangan dan tugas Camat dalam Binwas kegiatan Desa</li> <li>(b) Peserta dapat membagi tugas BinWas kepada staff kecamatan sesuai dengan kebutuhannya.</li> </ul>
<p><b>Tujuan Materi Bahasan 7.3: Menciptakan alat dan mekanisme BinWas serta Pelaporan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.</b> Setelah Proses Pembelajaran Peserta dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Memahami hal hal pokok (indikator kunci) yang harus dilaporkan dalam melakukan Binwas Yandas dan Pemberdayaan ekonomi</li> <li>(b) Mengusulkan mekanisme dan alat pelaporan BinWas yang inovatif dalam Yandas dan Pemberdayaan Ekonomi</li> </ul>	<p><b>Indikator Capaian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kesepakatan tentang indikator kunci yang dipertimbangkan dalam BinWas oleh Kecamatan.</li> <li>(b) Usulan alat pelaporan dan mekanisme BinWas Inovatif.</li> </ul>
<p><b>Tujuan Sub-Pokok Bahasan 2.1.3 :</b> Setelah Proses BimTek Peserta dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) memahami hubungan antara pengelolaan konflik, Pemecahan Masalah dan pengambilan keputusan</li> <li>(b) menerapkan langkah-langkah dalam Pemecahan Masalah (problem solving) dan Pengambilan Keputusan (Decision Making).</li> </ul>	



### 3. KERANGKA MATERI MODUL

Dalam Kerangka materi bahasan ini peserta akan mendapatkan gambaran tentang keseluruhan materi beserta keterkaitannya yang akan dibahas dalam proses pembelajaran berikut:

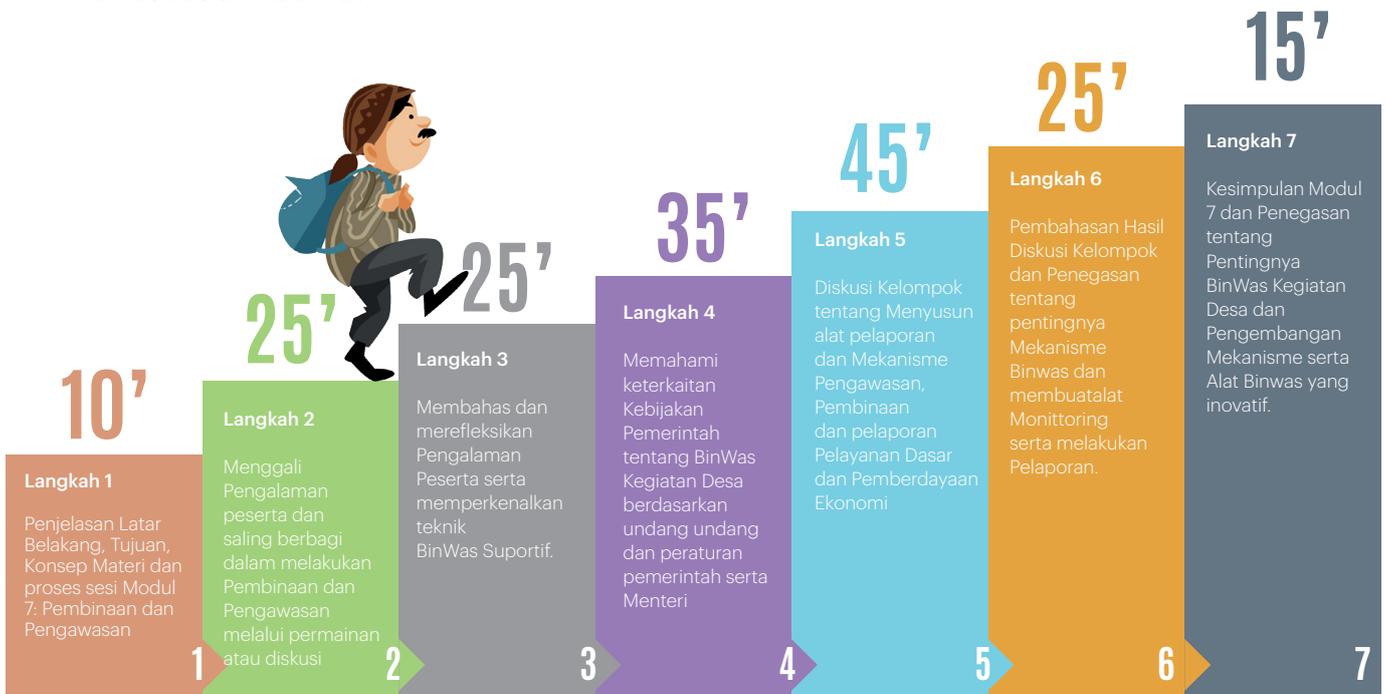


Dalam modul BinWas ini, peserta akan mengawalinya dengan memahami perbedaan pendekatan model BinWas mengontrol dan mendukung. Kemudian peserta akan diperkenalkan teknik melakukan BinWas suportif untuk menumbuhkan kerjasama yang saling mendukung kinerja masing-masing. Selanjutnya bersama sama memahami keterkaitan peran dan tugas Camat berdasarkan pada undang undang dan peraturan pemerintah serta peraturan menteri yang ada. Mengingat luasnya kewenangan dan tugas Camat dalam BinWas, maka sebaiknya dilakukan pendelegasian kepada para staffnya. Berdasarkan Permendagri No 114/ 2014, seorang Camat diamanatkan untuk melakukan BinWas terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Desa atas laporan pertanggungjawaban terhadap (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (2) Pelaksanaan Pembangunan desa (3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa. (4) Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan hal tersebut, dalam pelatihan ini peserta pada tahap akhir belajar bersama tentang mengembangkan alat dan mekanisme BinWas terhadap kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang nantinya setelah pelatihan dapat diaplikasikan di kecamatannya masing masing.



## 4. TAHAP-TAHAP PEMBELAJARAN

Pada langkah langkah pokok penyajian, peserta akan mendapatkan gambaran tentang alur tahapan, apa yang akan dilakukan pada setiap untuk berapa lama, sebagaimana diilustrasiakn berikut :



### TAHAP 1:

#### Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, dan Kerangka Konsep Materi Bahasan

Pada langkah awal dalam Modul 7, melalui proses interaktif peserta akan memahami tentang latar belakang pentingnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan Desa, Tujuan yang ingin dicapai bersama dengan konsep materi yang ditawarkan melalui proses serta tahapan tahapan sebagaimana dijelaskan pada halaman sebelumnya.

### TAHAP 2:

#### Menggali dan saling berbagi Pengalaman peserta dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan melalui permainan atau diskusi

2.1. Setiap peserta memiliki pengalaman dalam melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di desa, baik yang sifatnya terencana maupun yang tidak terencana. Selanjutnya peserta dalam kelompoknya dapat saling berbagi pengalaman baik yang kurang atau tidak menyenangkan maupun yang menyenangkan dalam hal bagaimana melakukan Binwas?

Berikut adalah Instrumen Kerja 2.1 tentang beberapa pertanyaan yang dapat dipakai sebagai panduan dalam berbagi pengalaman pribadi dalam melakukan BinWas yaitu;

### Instrumen Kerja 2.1

No	Pertanyaan Kunci	Pengalaman kurang menyenangkan	Pengalaman Menyenangkan
1	Apakah tujuan dan hasil yang diharapkan dalam melakukan BinWas Jelas?	Tidak !Mengapa ?Akibatnya ???	Ya !apa dampak positifnya yg menyenangkan ?
2	Apakah ada kejelasan tentang siapa yang melakukan Binwas kepada Siapa?		
3	Adakah kejelasan mekanisme Pelaporan tentang siapa yang melaporkan tentang apa dan untuk siapa?		
4	Adakah format laporan rutin yang dipakai dalam BinWas? Bagaimana dengan hal hal yang sifatnya segera atau mendadak?		
5	Adakah prosedur atau mekanisme untuk memastikan akan adanya umpan balik dan tindak lanjut terhadap laporandan atau kesepakatan akan hasil Binwas?		
6	Apakah cara dan proses dalam melakukan Binwas sudah efektif ?		

2. 2. Setelah masing-masing peserta menjawab pertanyaan tersebut di atas dan mereka saling berbagi pengalamannya, kemudian dengan dipandu Fasilitator bersama sama untuk mencari kesimpulan tentang hambatan atau tantangan apa saja yang perlu diperbaiki dimasa yang akan datang dan praktek praktek baik atau menyenangkan apa saja yang dapat dipertahankan.

## TAHAP 3:

### Membahas dan merefleksikan Pengalaman Peserta serta memperkenalkan teknik BinWas Suportif.

3. 1. Dalam tahapan ini, Peserta diperkenalkan dengan teknik baru tentang Pembinaan suportif. Untuk memahamiteknik ini, maka peserta mulai dengan mengetahui tentang Perbedaan antara Pembinaan yang bersifat Mengontrol dan Suportif dalam materi **bahan bacaan 3.1** berikut :

Pendekatan Pembinaan dengan Mengontrol	Pendekatan Pembinaan yang Suportif
Fokus pada mencari kesalahan seseorang	Fokus pada peningkatan kinerja dan membangun hubungan kerja yang baik
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Supervisor adalah cenderung mencari kesalahan.</li><li>2. Pemecahan masalah secara per episode dan reaktif sesaat.</li><li>3. Sedikit atau tidak ada tindak lanjutnya.</li><li>4. Tindakan bersifat menghukum dan kadang dengan sengaja.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lebih seperti guru, pelatih atau mentor seperti teman kerja.</li><li>2. Menggunakan data lokal untuk memantau kinerja dan memecahkan masalah.</li><li>3. Ada tindak lanjut secara teratur dan disepakati.</li><li>4. Hanya mendukung yang ada, tidak meng-ada-ada</li></ol>

3. 2. Pengertian Pembinaan Suportif = **Supportive Supervision**, adalah proses pembinaan yang menggunakan dialog dan umpan balik konstruktif untuk membantu staf, relawan atau seluruh mitra organisasi untuk meningkatkan kinerja mereka dalam mewujudkan misi organisasi, dan juga menetapkan tujuan untuk pertumbuhan dan perkembangan organisasi.
3. 3. Pentingnya Pembinaan Suportif Penting:
- a) Mereka merasa didukung dan dimotivasi sehingga dapat lebih produktif.
  - b) Dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat,
  - c) Dapat meningkatkan dan mempertahankan kinerja dan kepuasan kerja karyawan
  - d) Dapat menciptakan hubungan yang dinamis dengan staf dan mitra kerja;
  - e) Dapat tumbuh sebagai individu kreatif dan produktif sehingga organisasinya makin efektif.

3. 4. Keterampilan **Mendengar Aktif** sangat dibutuhkan dalam melakukan pembinaan **supportif dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut:**

- (a) Menghilangkan gangguan (seperti panggilan telepon) dan menghindari hambatan fisik (duduk di kursi yang nyaman daripada anda duduk dibatasi oleh meja diantara Anda berdua).
- (b) Dengarkan dengan cermat ide-ide utama, dan biarkan pembicara menyelesaikan pikiran dan pengalamannya tanpa ada gangguan.
- (c) Ajukan pertanyaan terbuka yang menunjukkan bahwa Anda tertarik pada ide-ide dan interpretasinya tentang sebuah topik (misalnya, "Apa saran Anda tentang bagaimana kita harus mengatasi masalah ini?")
- (d) Jangan menilai, kritik atau membela diri sementara pembicara sedang berbicara; sebaliknya, fokus pada memahami pengalaman dan perspektifnya. Memverifikasi pemahaman Anda dengan mengulangi poin kunci kembali (misalnya, "Menurut pemahaman Saya, apakah Anda mengatakan .....").

***Ingat: Anda memiliki dua telinga dan dua mata ... tapi hanya satu mulut. Jadi biarkan telinga dan mata melakukan dua kali lebih banyak pekerjaan!***

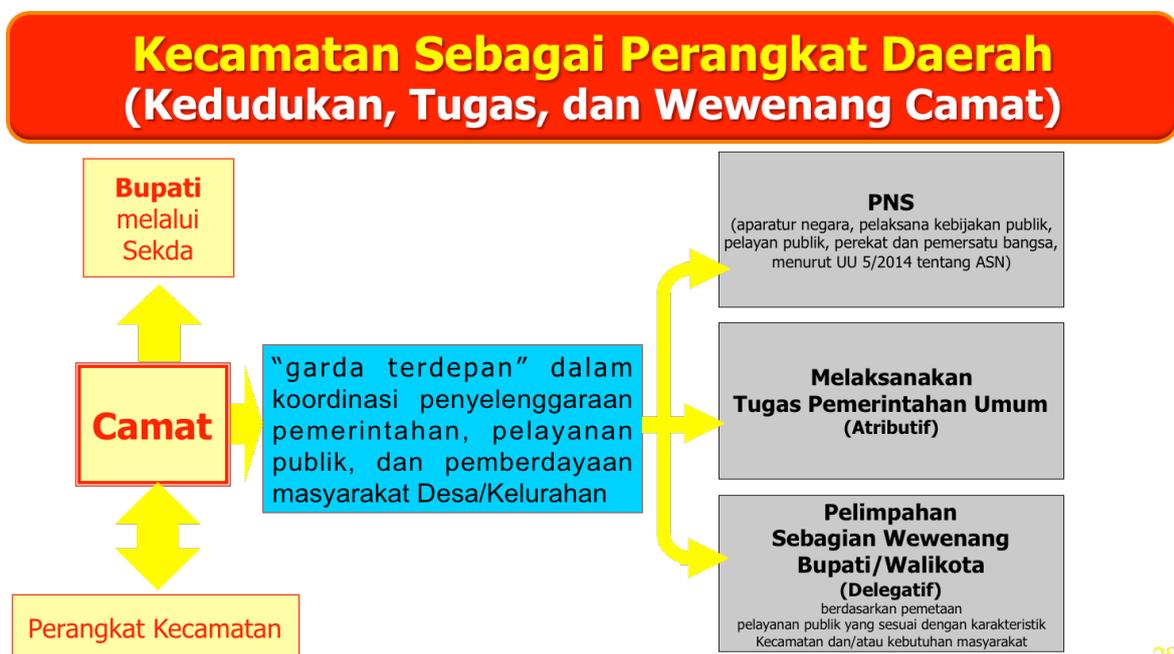
3. 5. Kegiatan **Tindak lanjut:** Pembinaan tidak berakhir dengan kunjungan yang dilakukan, sehingga setelah kembali di kantor maka Pengawas/ Pembina harus merencanakan kegiatan kegiatan tindak lanjut yang menyangkut hal hal sebagaimana **bahan bacaan** berikut:

- (a) Melakukan hal hal yang telah disepakati, menjadi bagian dan kewenangan Pengawas / Pembina.
- (b) Melibatkan petugas teknis dalam proses perencanaan dan bekerja dengan mereka untuk mengembangkan daftarpekerjaan kunci yang perlu dibantu, mengembangkan alat pemantauan untuk mengeceknya.
- (c) Membahas dukungan kecamatan yang dibutuhkan baik sarana maupun prasarana maupun bantuan teknis dan mengkoordinasikan dengan pihak pihak yang terkait dan berkepentingan.
- (d) Mengawasi laporan bulanan dan membangun komunikasi yang teratur dengan staf yang diawasi dan dibina untuk melihat apakah rekomendasi telah diimplementasikan;
- (e) Mengidentifikasi perkembangan kinerjanya untuk kemudian diberikan penghargaan, baik berupa peningkatan karir maupun pujian dan kesempatan untuk pelatihan.

## TAHAP 4:

### Memahami keterkaitan Kebijakan Pemerintah tentang BinWas Kegiatan Desa

- 4.1. Peserta memulai langkah ini dengan menjawab pertanyaan “ Apakah selama ini anda mengetahui dan memahami kewenangan dan tugas mereka dalam hal Pembinaan dan Pengawasan?
- 4.2. Kemudian peserta mendapatkan penjelasan singkat dan membahasnya bersama tentang kewenangan dan tugas Camat dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Desa sesuai dengan undang undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut:



28

Selanjutnya akan dijelaskan tugas Atributif dan tugas Delegatif yang melekat pada Camat sebagai berikut.

- a. Tugas Atributif / Tugas Umum Pemerintahan :
  1. Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
  2. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan trantibum.
  3. Mengkoordinasi penerapan & penegakan Perundang-undangan.
  4. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana & fasilitas pelayanan umum.
  5. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di Kecamatan.
  6. Membina penyelenggaraan Pemdeskel.
  7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan desa / kelurahan.

- b. Tugas Delegatif
  - a. Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.
  - b. Tugas Delegatif yang meliputi Aspek : perizinan; rekomendasi; koordinasi; pembinaan; pengawasan; fasilitasi; penetapan; penyelenggaraan; dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
  - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

4.3. Kemudian peserta menjawab pertanyaan reflektif tentang “ Apakah seorang Camat mampu melakukan tugas tugas tersebut di atas sendirian?

Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah (Rincian Tugas Camat menurut UU 23/2014)

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat kewenangan dan tugas Camat sangat luas maka tugas tersebut sebaiknya di delegasikan kepada staff kecamatan. Melalui diskusi dalam kelompok peserta selanjutnya membagi ke 18 tugas BinWas tersebut di untuk didelegasikan kepada siapa saja? Berikut format instrumen kerja 4.3 tentang laporan hasil diskusi yang dapat dipakai;

### Istrumen Kerja 4.3

Tugas Binwas menurut UU 6/2014 dan PP 43/2014 pasal 154	Didelegasikan kepada siapa ?	Alasan utamanya ?
1. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;		
2. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;		
3. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;		
4. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;		
5. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;		
6. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;		
7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;		
8. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;		
9. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;		
10. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;		
11. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;		

Tugas Binwas menurut UU 6/2014 dan PP 43/2014 pasal 154	Didelegasikan kepada siapa ?	Alasan utamanya ?
12. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;		
13. Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;		
14. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegakan batas Desa;		
15. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;		
16. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan		
17. 17 koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya		
18. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;		

- 4.4. Setelah selesai diskusi, peserta merefleksikan bersama dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut :
- (a) Kepala Seksi atau Bidang apa saja yang mendapatkan tugas paling banyak?
  - (b) Apakah telah terjadi pembagian tugas dengan adil (sesuai dengan kompetensi, tupoksi atau beban kerja) mereka?
  - (c) Dari seluruh tugas di atas, yang mana saja berhubungan erat dengan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

## TAHAP 5:

### Diskusi Kelompok tentang Menyusun alat pelaporan dan Mekanisme Pengawasan, Pembinaan dan pelaporan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi

#### 5.1. URUSAN PEMERINTAHAN

Sebelum menindaklanjuti terhadap bagaimana melakukan diskusi kelompok dalam menyusun alat pelaporan dan mekanisme pengawasan sekaligus mengadakan pembinaan, peserta perlu kiranya mengetahui terhadap urusan pemerintahan.

Dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 disebutkan urusan pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum, masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- b. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi, kabupaten / kota. Dalam urusan pemerintahan Konkuren dibagi 2 (dua) :
  - 1) Wajib 24 urusan
  - 2) Pilihan 8 urusan
- c. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

5.2 Setelah peserta memahami bagaimana melakukan Bin Was yang suportif, kewenangan dan tugas Camat, maka hal tersebut hanya akan efektif apabila Kecamatan memiliki alat dan mekanisme BinWas. Mekanisme Binwas meliputi tiga komponen penting yang tidak dapat dipisahkan yaitu, Pembinaan, Pengawasan, dan pelaporan.



**Box 5.2**  
**Ringkasan Penjelasan Fasilitator**  
**Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan pelaporan.**

<p><i>Definisi Pembinaan</i></p>	<p><b>Ivancevich (2008:46)</b>, mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.</p> <p><b>Selanjutnya sehubungan dengan definisi tersebut, Ivancevich</b> mengemukakan sejumlah butir penting yaitu, pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi.</p> <p>Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.</p>
<p><i>Prinsip Dasar Pembinaan yang baik</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pembinaan harus mendorong mitra agar dapat mengekspresi diri sehingga dapat menunjukkan kemampuan dan potensinya dalam bekerja.</li> <li>b) Pembinaan harus memberikan inisiatif dan peluang bagi setiap individu untuk mengambil tanggung jawab lebih banyak.</li> <li>c) Pembinaan harus memberikan kesempatan penuh kepada mitra agar melakukan pekerjaannya dengan bekerjasama untuk mengembangkan semangat Tim. Dan mengembangkan hubungan interpersonal yang baik.</li> <li>d) Pembinaan harus memberikan otonomi kepada mitra sesuai dengan kepribadiannya, kompetensi dan karakteristiknya.</li> <li>e) Pembinaan harus memberikan kemampuan untuk menafsirkan kebijakan dan memberikan instruksi dengan kreatif atau tidak monoton.</li> <li>f) Pembinaan harus dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan individu, bukan keinginannya.</li> <li>g) Pengawas harus selalu berpikir bahwa dirinya adalah pemimpin sehingga dapat memberikan Pembinaan dengan memberikan bantuan dan dorongan atas kesulitan yang dihadapinya.</li> <li>h) Pembinaan harus menciptakan suasana dan kondisi relasi yang demokratis.</li> <li>i) Pembinaan harus direncanakan dengan baik dan diadopsi sebagai perencanaan yang baik. Ini disebut untuk perencanaan dan organisasi yang baik.</li> <li>j) Pembinaan yang baik adalah yang menghormati kepribadian masing-masing staf atau mitra kerja.</li> </ul>
<p><i>Pengertian &amp; Tujuan Pengawasan</i></p>	<p>Pengertian Pengawasan Menurut Para Pakar, sebagai berikut :</p> <p>Menurut <b>Sondang P. Siagian, Pengertian Pengawasan</b> adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.</p> <p>Dari pengertian pengawasan diatas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.</p> <p>Tujuan Pengawasan yaitu, sebagai berikut :</p> <p>Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.</li> <li>2. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.</li> <li>3. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.</li> <li>4. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah).</li> </ul>

<p><i>Prinsip Prinsip Pengawasan</i></p>	<p>Berikut adalah prinsip prinsip pengawasan menurut imbolon (2004:69) yang dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi yang ingin dicapai.</li> <li>(2) Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.</li> <li>(3) Pengawasan harus berorientasi kepada kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku (<i>wetmatigheid</i>), berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan (<i>rechmatigheid</i>) dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan (<i>doelmatigheid</i>).</li> <li>(4) Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.</li> <li>(5) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti (<i>accurate</i>) dan tepat.</li> <li>(6) Pengawasan harus bersifat terus menerus (<i>continue</i>).</li> <li>(7) Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (<i>feed back</i>) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.</li> </ol>
<p><i>Tujuan dan Jenis Pelaporan</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Tujuan laporan: mengurangi tingkat ketidak pastian yang berkaitan dengan suatu masalah yang dihadapi pengambil keputusan, dan mempengaruhi perilaku pengambil keputusan dengan cara yang positif.</li> <li>(b) <b>Jenis Jenisnya terdiri dari (1) Pelaporan terprogram:</b> adalah laporan yang dapat memberikan informasi untuk memecahkan masalah yang telah diantisipasi pengguna. (2) <b>Atribut laporan:</b> agar lebih efektif, suatu laporan harus memiliki atribut antara lain relevan, ringkas, berorientasi pengecualian, akurat, lengkap, tepat waktu, dan singkat. (3) <b>Pelaporan khusus:</b> sumber data untuk mendukung kebutuhan pelaporan khusus melalui Laporan dapat berupa dokumen kertas atau gambar elektronik yang disajikan di terminal lomputer.</li> </ol>
<p><i>Kewajiban Kepala Desa untuk melakukan pelaporan menurut PP 43/2014.</i></p>	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 43 tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan undang undang nomor 6 tahun 2016 tentang Desa: Bahwa Kepala Desa wajib melakukan pelaporan tentang <b>Penyelenggaraan Pemerintahan desa</b> (pasal 48), sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggaraan pemerintahan desa (pasal 49, ayat 2) adalah paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</li> <li>2. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;</li> <li>3. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan</li> <li>4. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.</li> </ol> <p>Selanjutnya, pada ayat 3, Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud di atas, digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati/walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan.</p> <p>Sedangkan, sebagaimana dimatkan oleh peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114, tahun 2014, tentang pembangunan desa, pada pasal 3, <b>Pembangunan desa</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyelenggaraan pemerintahan Desa,</li> <li>2) pelaksanaan pembangunan Desa,</li> <li>3) pembinaan kemasyarakatan Desa dan</li> <li>4) pemberdayaan masyarakat Desa.</li> </ol> <p>Terdapat perbedaan nomenklatur antara PP 43 / 2014 adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Permen114/2014 disebut dengan Pembangunan Desa, terhadap empat hal yang sama pentingnya.</p>

Pembangunan  
Desa berdasarkan  
Permendagri 114 /2014.

Dalam konteks pelatihan ini, mengacu pada Permendagri 114 /2014 tentang pembangunan desa, dari ke empat komponen yang erat sekali hubungannya dengan BinWas pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat:

**1. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa** antara lain:

a) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:

- (1) Tambatan perahu;
- (2) Jalan pemukiman;
- (3) Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
- (4) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
- (5) Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
- (6) Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

b) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

- (1) Air bersih berskala Desa;
- (2) Sanitasi lingkungan;
- (3) Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
- (4) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

c) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- (1) Taman bacaan masyarakat;
- (2) Pendidikan anak usia dini;
- (3) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- (4) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
- (5) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

d) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

- (1) Pasar Desa;
- (2) Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
- (3) Penguatan permodalan BUM Desa;
- (4) Pembibitan tanaman pangan;
- (5) Penggilingan padi;
- (6) Lumbung Desa;
- (7) Pembukaan lahan pertanian;
- (8) Pengelolaan usaha hutan Desa;
- (9) Kolam ikan dan pembenihan ikan;
- (10) Kapal penangkap ikan;
- (11) Cold storage (gudang pendingin);
- (12) Tempat pelelangan ikan; 13.tambak garam;
- (13) Kandang ternak;
- (14) Instalasi biogas;
- (15) Mesin pakan ternak;
- (16) Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

e) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- (1) Penghijauan;
- (2) Pembuatan terasering;
- (3) Pemeliharaan hutan bakau;
- (4) Perlindungan mata air;
- (5) Pembersihan daerah aliran sungai;
- (6) Perlindungan terumbu karang; dan
- (7) Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa

	<p><b>2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:</b></p> <p>a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;</p> <p>b) Pelatihan teknologi tepat guna;</p> <p>c) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa;</p> <p>d) Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kader pemberdayaan masyarakat desa</li> <li>(2) Kelompok usaha ekonomi produktif</li> <li>(3) Kelompok perempuan</li> <li>(4) Kelompok tani</li> <li>(5) Kelompok masyarakat miskin</li> <li>(6) Kelompok nelayan</li> <li>(7) Kelompok pengrajin</li> <li>(8) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak</li> <li>(9) Kelompok pemuda</li> <li>(10) Kelompok lain sesuai kondisi desa</li> </ol>
--	--

1.3 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya peserta mendiskusikan tentang komponen penting apasaja yang perlu diawasi dan bagaimana mekanismenya.

Tugas Kelompok Menyusun Alat BinWas

Tugas Diskusi Kelompok tentang: Isi Kolom 3,4 dan 5

Lembar tugas 6.2

- a. Hal-hal apa saja yang penting untuk BinWas dan
- b. Apa Indikator Kinerjanya,serta
- c. Mekanisme seperti apa ?

Menyusun Alat dan Mekanisme BinWas

Kualifikasi Tugas UU 6/2014 ttg Desa, Berdasarkan Perangkat Kecamatan	Tugas BinWas	Hal-hal apa yang penting untuk diawasi	Apa indikator kinerjanya	Mekanisme Binwas

Sebagai langkah awal pada diskusi ini, peserta diharapkan untuk memilih hal hal tersebut di atas yang sesuai dengan fokus BinWas untuk Pelayanan dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Selanjutnya dalam kelompok menentukan komponen yang penting, indikatornya serta usulan mekanisme dengan mengisi format Instrumen Kerja 5.3 berikut sesuai dengan fokus binwas yang diberikan oleh fasilitator:

### Instrumen Kerja 5.3

DAFTAR USULAN KOMPONEN PENTING, CARA MENGUKUR DAN MEKANISME BINWAS			
Fokus Binwas	Komponen apa yg sangat penting untuk BinWas Desa	Indikator Kinerjanya yang dilaporkan	Mekanisme BinWas
1. Kesehatan	1.  2.  3.  dst		
2. Pendidikan	1.  2.  3.  dst		
3. Indentitas Hukum	1.  2.  3.  dst		

4. Infrastruktur Dasar	1.  2.  3.  dst		
5. Perlindungan Sosial	1.  2.  3.  dst		
6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.	1.  2.  3.  dst		

Berikut adalah contoh pengisian Instrumen Kerja 5.3 tersebut di atas beserta alat BinWas yang telah dikembangkan.

DAFTAR USULAN KOMPONEN PENTING, CARA MENGUKUR DAN MEKANISME BINWAS			
Fokus Binwas	Komponen apa yg sangat penting untuk BinWas Desa	Indikator Kinerjanya yang dilaporkan	Mekanisme BinWas
7. Proses dan Realisasi APBDesa untuk mendukung penanggulangan kemiskinan.	1. Belanja Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan.  2. Siltap dan Insentif	* Lihat Contoh Lembar Evaluasi APBDesa oleh Kecamatan berikut ini.	Dibentuk Tim Evaluasi APBdes dan anggota melakukan pengawasan dan mengevaluasi, memberikan pembinaan secara kontinyu

Bedasarkan tabel di atas dikembangkan lembar evaluasi sebagaimana contoh berikut:

**\* Contoh : Lembar Evaluasi APB Desa oleh Kecamatan**

Kecamatan :  
Desa :  
Tanggal Penerimaan :

No.	Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Rekomendasi
		Ya	Tidak		
	Belanja Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan				
1	Belanja Desa sesuai dengan Kewenangan Desa			Perbup Kewenangan Desa	
2	Belanja desa ditetapkan berdasarkan musyawarah desa.			Berita Acara Musyawarah Desa	
3	Belanja Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam musyawarah desa.			Berita Acara Musyawarah Desa	
4	Belanja untuk Pegawai dan Operasional tidak melebihi 30% total APBDesa setelah dikurangi Bantuan Keuangan Khusus			APBDesa	
5	Priotas Nasional masuk dalam belanja APBDesa.			Permendesa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa	
6	Prioritas Daerah masuk dalam belanja APBDesa.			Perbup tentang Prioritas Penggunaan DD dan ADD	

No.	Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Rekomendasi
		Ya	Tidak		
7	Belanja Desa tidak tumpang tindih dengan belanja SKPD.			RKPD/RAPBD Kabupaten	
8	Satuan harga sesuai dengan peraturan bupati/ walikota			Perbup tentang Satuan Harga/ Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	
9	Belanja desa tidak dialokasikan untuk belanja-belanja yang dilarang (negatif list)			?	
SILTAP dan Insentif					
1	Gaji untuk Kepala Desa tidak melebihi besaran penghasilan tetap yang ditetapkan oleh peraturan bupati/walikota.			Peraturan Bupati tentang SILTAP dan Insentif	
2	Gaji untuk Sekretaris Desa tidak melebihi besaran penghasilan tetap yang ditetapkan oleh peraturan bupati/walikota.			Peraturan Bupati tentang SILTAP dan Insentif	
3	Gaji untuk Kepala Urusan Desa tidak melebihi besaran penghasilan tetap yang ditetapkan oleh peraturan bupati/walikota.			Peraturan Bupati tentang SILTAP dan Insentif	
4	Gaji untuk Kepala Seksi tidak melebihi besaran penghasilan tetap yang ditetapkan oleh peraturan bupati/ walikota.			Peraturan Bupati tentang SILTAP dan Insentif	
5	Gaji untuk Kepala Dusun tidak melebihi besaran penghasilan tetap yang ditetapkan oleh peraturan bupati/walikota.			Peraturan Bupati tentang SILTAP dan Insentif	
6	Insentif untuk Anggota BPD tidak melebihi besaran penghasilan tetap yang ditetapkan oleh peraturan bupati/walikota.			Peraturan Bupati tentang SILTAP dan Insentif	
7	Insentif untuk Guru PAUD dicantumkan dalam APBDDesa			Peraturan Bupati tentang SILTAP dan Insentif	
8	Insentif untuk Kader POSYANDU dicantumkan dalam APBDDesa			Peraturan Bupati tentang SILTAP dan Insentif	

Evaluasi dilakukan tanggal: \_\_\_\_\_

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama :

Jabatan:

## TAHAP 6:

### Pembahasan Hasil Diskusi Kelompok dan Penegasan tentang pentingnya Mekanisme Binwas dan membuat alat Monitoring serta melakukan Pelaporan

Peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, sementara kelompok lain mengkritisi dengan cermat tentang:

- (a) Komponen pokok
- (b) Indikator Kuncinya
- (c) Mekanismenya.

Kemudian menyepakati, sebagai tindak lanjut dari diskusi ini, masing masing kecamatan akan mengembangkan alat monitoring atau evaluasi untuk pelaporannya serta mekanisme BinWas yang inovatif.

## TAHAP 7:

### Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup

Pada langkah akhir dalam modul ini, peserta memberikan jawaban atas pertanyaan berikut :

- a) Apakah peserta **memahami dan yakin serta mampu** bagaimana melakukan BinWas yang Suportif ?
- b) Apa saja kewenangan dan tugas Camat dalam Binwas kegiatan Desa?
- c) Kepada siapa saja tugas tugas BinWas didelegasikan?
- d) Apakah peserta telah **memahami dan yakin terhadap usulan komponen dan** indikator kunci serta mekanisme sebagai bahan awal untuk mengembangkan alat pelaporan dan mekanisme BinWas Inovatif?
- e) Dari kedua kegiatan tersebut perlu mengembangkan alat monitoring / evaluasi untuk pelaporan dan mekanisme BinWas yang inovatif dituangkan dalam Standard Operating Procedure (SOP).



**Selanjutnya, peserta bersama fasilitator menyimpulkan pesan pesan kunci, dari modul 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan kegiatan desa, sebagai berikut:**

- a) Salah satu kewenangan Camat sesuai dengan UU no 23/2014 adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan, kemudian menurut UU 6/2014 dan PP 43/2014 pasal 154 merinci tugas pembinaan dan pengawasan desa oleh Camat menjadi 18 tugas yang kemudian dapat didelegasikan kepada perangkat kecamatan terkait, serta PP. No. 19 Tahun 2008.
- b) Pendekatan BinWas Suportif adalah pendekatan yang disarankan karena sesuai dengan peran utama Camat yaitu fasilitatif dan koordinatif.
- c) Pengembangan alat dan Mekansime BinWas adalah wajib diciptakan secara inovatif oleh masing masing kecamatan berdasarkan komponen dan indikator kunci dengan tentang mempertimbangkan prinsip pembinaan sesuai kewenangan dan dilakukan secara suportif.

MODUL

08

# PELAYANAN TERPADU KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT





### Materi Bahasan:

- 8.1. Latar belakang, definisi dan manfaat pelayanan administrasi terpadu kecamatan
- 8.2. Optimalisasi dan inovasi pelaksanaan pelayanan terpadu kecamatan
- 8.3. Pemetaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menyumbang kepada kesejahteraan yang dapat didelegasikan kepada camat



### Kompetensi Dasar:

- A. Kompetensi Pemerintahan
  1. O.841120.041.01 Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah
  2. O.841120.046.01 Melakukan Penerapan Standar Pelayanan Dalam Proses Pelayanan Pemerintah
  3. O.841120.042.01 Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik
  4. O.841120.053.01 Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik.
- B. KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL:
  1. M.01 Integritas
  2. M.02 Kerjasama
  3. M.03 Komunikasi
  4. M.04 Orientasi Pada Hasil
  5. M.06 Pengembangan Diri dan Orang Lain
  6. M.07 Mengelola Perubahan
  7. M.08 Pengambilan Keputusan
  8. SK.01 Perekat Bangsa
- C. KOMPETENSI TEKNIS Terkait pelaksanaan tugas camat, guna mendukung penanggulangan kemiskinan :
  1. Pembuatan kebijakan
  2. Koordinasi
  3. Kepemimpinan
  4. Akuntabilitas



### Perubahan yang Diharapkan:

#### Peserta BimTek:

1. Berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik di kecamatan.
2. Mendorong terjadinya proses advokasi pelimpahan kewenangan bupati/ walikota pada camat
3. Melaksanakan pelayanan publik yang menyumbang pada kesejahteraan masyarakat secara efektif di kecamatan.
4. Menerapkan PATEN sebagai wadah untuk melaksanakan kewenangan kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik



### Waktu:

4 JP ( Jam Pelajaran ) @ 45 menit = 180 menit



## 1. LATAR BELAKANG

Modul ini diharapkan dapat mendorong Peserta untuk dapat memahami urgensi pelayanan terpadu kecamatan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mampu mengoptimalkan pelaksanaan dan kegiatan inovasi pelayanan terpadu kecamatan (PATEN). Harapan ini didasari oleh hal-hal berikut:

1. Pemenuhan syarat administratif dan teknis sesuai aturan Perundang-undangan oleh kecamatan masih rendah yang ditandai dengan minimnya ketersediaan dokumen prosedur pelayanan serta tata kelola SDM pelayanan yang belum baik;
2. Masyarakat menuntut kecamatan dapat memberikan pelayanan yang cepat dan murah serta responsif terhadap keluhan/saran yang diberikan
3. Camat memiliki tugas untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat sesuai kewenangan yang dimilikinya .
4. Guna melaksanakan agar camat dapat menjamin mutu kinerja pelayanan kecamatan, maka camat perlu memahami fungsi manajemen pelayanan serta mampu memetakan kebutuhan masyarakat yang dapat dilayani izinnnya di wilayah kecamatan serta mampu mendayagunakan PATEN untuk mendorong iklim usaha



## 2. TUJUAN

Modul ini bertujuan untuk membuat peserta memahami pentingnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik di kecamatan, pemetaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menyumbang kepada kesejahteraan dan dapat didelegasikan kepada camat, serta optimalisasi dan inovasi pelaksanaan pelayanan terpadu kecamatan

Tujuan Modul ini akan dicapai melalui pencapaian tujuan pada berbagai materi bahasan modul. Tujuan masing-masing materi bahasan berikut indikator pencapaiannya adalah sebagai berikut:

## MATERI BAHASAN 8.1.

Latar belakang, definisi dan manfaat pelayanan terpadu kecamatan

### **Tujuan Materi Bahasan:**

Mampu memahami pentingnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik di kecamatan

### **Indikator Pencapaian Tujuan:**

- a. Peserta mampu menjelaskan manfaat pelayanan terpadu kecamatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- b. Memahami pemenuhan tahapan dalam pelayanan terpadu kecamatan sesuai aturan Perundang-undangan.

## MATERI BAHASAN 8.2

Pemetaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menyumbang kepada kesejahteraan yang dapat didelegasikan kepada camat

### **Tujuan Materi Bahasan:**

Membuat peserta dapat:

Memahami item pelayanan perizinan dan non perizinan

### **Indikator Pencapaian Tujuan:**

Peserta mampu memetakan item perizinan dan non perizinan yang mendukung kesejahteraan masyarakat

## MATERI BAHASAN 8.3

Optimalisasi dan inovasi pelaksanaan pelayanan terpadu kecamatan

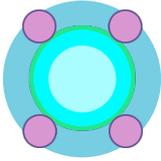
### **Tujuan Materi Bahasan:**

Membuat peserta dapat:

Mengetahui dan mengoptimisasikan pelaksanaan PATEN

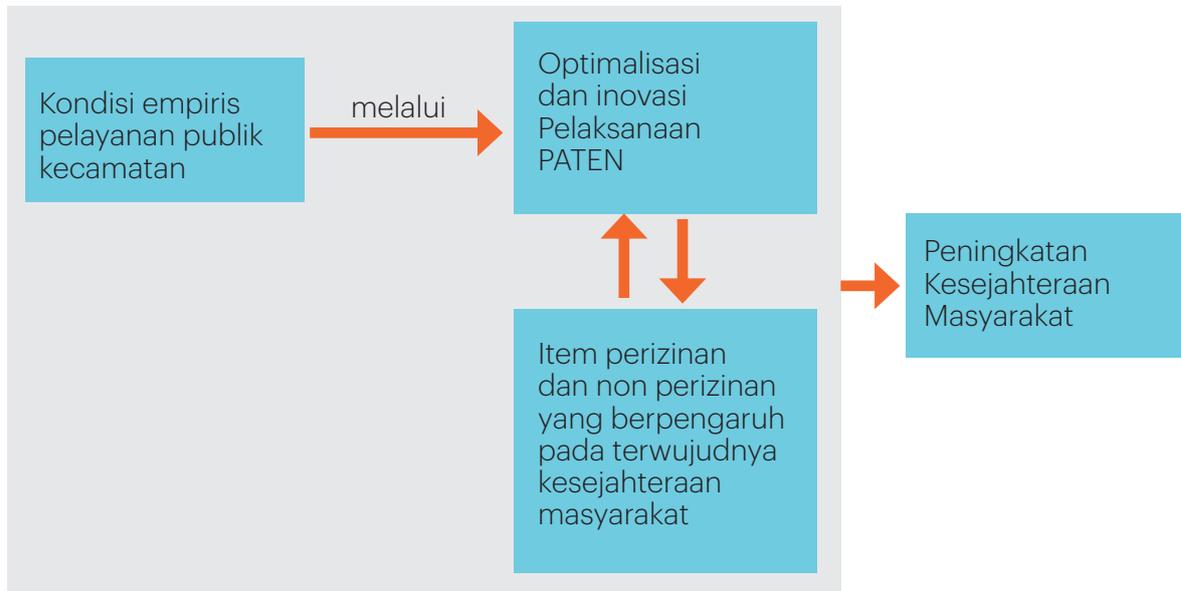
### **Indikator Pencapaian Tujuan:**

Peserta mampu mengidentifikasi hal-hal yang dapat menjadi inovasi sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.



### 3. KERANGKA MATERI MODUL 8

Materi-materi yang diberikan pada Modul 8 mengikuti kerangka pikir berikut:



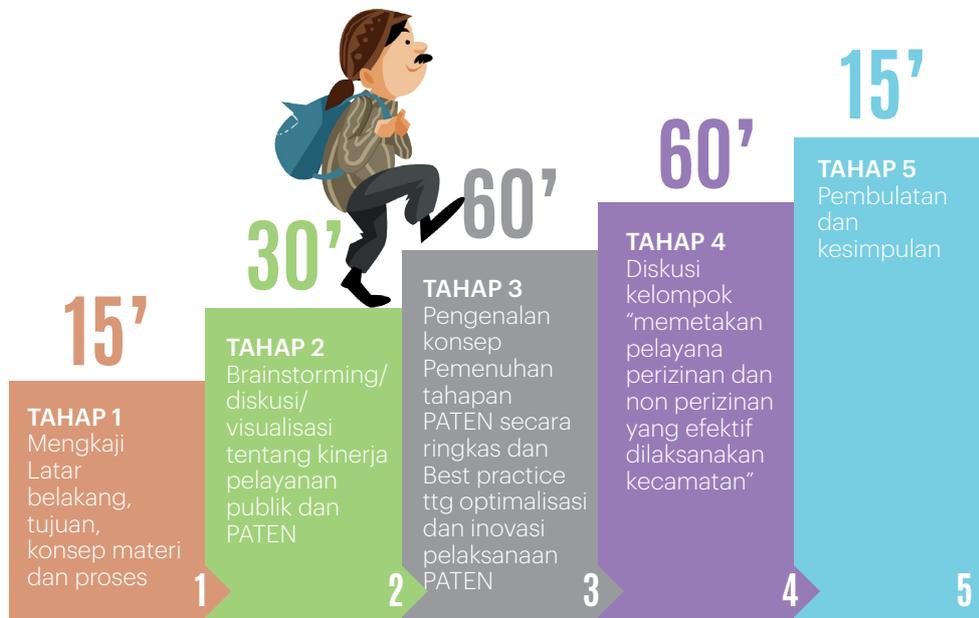
Kerangka ini akan membantu Peserta memahami hak warga atas pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi. Peserta akan mempelajari bahwa pemenuhan hak warga menuntut perencanaan dan penganggaran memenuhi fungsi-fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, prosedur dan pengawasan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Camat perlu melakukan pengawalan, agar perencanaan dan penganggaran memenuhi fungsinya. Dengan demikian, perencanaan dan penganggaran dapat mendukung pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan.





## 4. TAHAP-TAHAP PEMBELAJARAN

Tahapan-tahapan pembelajaran yang akan dialami oleh Peserta adalah sebagai berikut:



Proses lengkap pada setiap tahap pembelajaran adalah sebagai berikut:

### TAHAP 1:

#### Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi dan Proses

Pada tahap ini peserta diajak untuk mengetahui latar belakang, tujuan, konsep materi dan proses pembelajaran pada modul 8 ini yang berkaitan dengan Pelayanan Terpadu di Kecamatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahap ini diharapkan semua peserta akan berperan aktif dalam proses pembelajaran yang nantinya akan menghasilkan bagaimana cara untuk memetakan pelayanan terpadu dikecamatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh kecamatan

Pada tahap ini, peserta juga mendapatkan gambaran tentang latar belakang, definisi dan manfaat PATEN. Penjelasan umum tentang PATEN dapat dilihat pada BOX 8.1 di bawah ini

## BAHAN BACAAN 8.1.

### Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

<i>Definisi</i>	Suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang pengelolaannya, mulai dari permohonan hingga penerbitan dokumen dilakukan melalui satu meja atau loket pelayanan.
<i>Tujuan PATEN</i>	<p>Bagi Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memberi kejelasan kepada petugas pelayanan mengenai biaya, waktu dan prosedur pelayanan</li><li>▪ Lebih memberi keadilan kepada semua staf sehingga tak ada lagi istilah bagian yang “basah” dan “kering”</li><li>▪ Memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kecamatan dan meningkatkan kesadaran warga bahwa pelayanan publik yang berkualitas bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi juga warga pengguna layanan</li><li>▪ Mewujudkan tertib administrasi dokumen pelayanan oleh kecamatan</li><li>▪ Masing-masing kecamatan memiliki uraian tugas sesuai tupoksi</li><li>▪ Standar operasional prosedur pelayanan lebih jelas dan transparan</li><li>▪ Semangat dan kedisiplinan aparatur kecamatan meningkat</li><li>▪ Mewujudkan kecamatan sebagai ujung tombak otonomi daerah di daerah</li><li>▪ Administrasi dan pengarsipan pelayanan di kecamatan akan lebih rapi dan tertata</li></ul> <p>Bagi kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Adanya standar pelayanan untuk seluruh kecamatan</li><li>▪ Menjadikan kecamatan sebagai <i>fornt desk</i> / loket dari sistem pelayanan yang berkualitas di daerah</li><li>▪ Persiapan bagi proses pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat</li><li>▪ Adanya indikator pengukuran kinerja kecamatan yang lebih adil dan jelas</li><li>▪ Sebagai wadah bagi peningkatan pendapatan daerah</li></ul> <p>Bagi masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, tidak diskriminatif dan transparan</li><li>▪ Masyarakat akan lebih puas dalam memperoleh pelayanan dari kecamatan</li><li>▪ Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan informasi, menilai dan memberi masukan agar tercipta pelayanan yang berkualitas</li><li>▪ Menghargai martabat dan kedudukan warga pengguna layanan</li></ul>
<i>Hambatan pelaksanaan PATEN</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Komitmen petugas pelayanan masih rendah yang ditandai dengan kurang responsif terhadap keluhan/saran</li><li>▪ Kurangnya pemahaman dalam memenuhi syarat administratif dan teknis PATEN oleh kecamatan</li><li>▪ Belum adanya <i>job description</i> yang mengakibatkan belum optimalnya pelayanan dikarenakan tidak adanya kejelasan siapa berbuat apa dan pemberian <i>reward and punishment</i> bagi aparatur pelaksana pelayanan</li></ul>

## TAHAP 2:

### **Brainstorming/diskusi/visualisasi tentang kinerja pelayanan publik dan PATEN**

Peserta akan melakukan diskusi kelompok yang terbagi kedalam 2 kelompok dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan hasil kinerja pelayanan kecamatan yang sudah menerapkan PATEN maupun belum.

Adapun tugas dari masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

1. Kelompok kecamatan yang telah menerapkan PATEN menceritakan kinerja pelayanan kepada masyarakat baik dari kepastian, segi kecepatan waktu, biaya pengurusan dan kepuasan masyarakat
2. Kelompok kecamatan yang belum menerapkan PATEN menceritakan bagaimana kinerja pelayanan kepada masyarakat baik dari segi kepastian, kecepatan waktu, biaya pengurusan dan kepuasan masyarakat.

## TAHAP 3:

### **Pengenalan konsep pemenuhan tahapan PATEN secara ringkas dan *Best practice* ttg optimalisasi dan inovasi pelaksanaan PATEN**

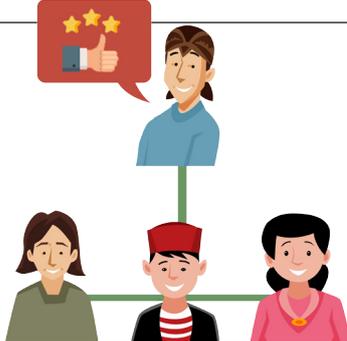
Peserta akan mempelajari proses pelaksanaan tahapan-tahapan PATEN, penerapan contoh-contoh yang baik (*best practise*) dalam pelaksanaan PATEN serta peserta akan mengidentifikasi hal-hal apa dalam PATEN yang dapat menjadi inovasi sesuai kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing kecamatan.

Pada tahap ini peserta juga dapat memberikan masukan terkait dengan hal-hal yang telah baik dalam pelaksanaan PATEN termasuk inovasi yang telah dilakukan. Penjelasan tentang tahapan pelaksanaan PATEN dapat dilihat di BOX 8.2



## BAHAN BACAAN 8.2.

### Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

<p><i>Tahapan PATEN</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemenuhan syarat substantif</li> <li>▪ <b>Pemenuhan syarat teknis</b></li> <li>▪ <b>Pemenuhan syarat administratif</b></li> <li>▪ Penetapan kecamatan sebagai penyelenggara paten</li> <li>▪ Peresmian dan sosialisasi</li> <li>▪ Penerapan paten</li> <li>▪ <b>Monitoring dan evaluasi</b></li> </ul>
<p><i>Syarat Teknis</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ loket/meja pendaftaran</li> <li>▪ tempat pemrosesan berkas</li> <li>▪ tempat penyerahan dokumen</li> <li>▪ tempat pembayaran</li> <li>▪ tempat pengolahan data dan informasi</li> <li>▪ tempat penanganan pengaduan</li> <li>▪ tempat piket</li> <li>▪ ruang tunggu</li> <li>▪ Perangkat pendukung lainnya</li> </ul>  <p>The illustration shows a service center with a staff member in a blue shirt at the top, and three customers (two women and one man in a red cap) at the bottom. A red speech bubble with three yellow stars and a thumbs-up icon is positioned above the staff member, indicating a positive service experience.</p>
<p><i>Syarat Administratif</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SOP &amp; Standar Pelayanan</li> <li>▪ Uraian tugas personil kecamatan</li> </ul>
<p><i>Monev PATEN</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyelenggaraan PATEN perlu dimonitor terus menerus agar memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.</li> <li>▪ Hasil monitoring ini penting sebagai masukan bagi pemerintah kecamatan untuk terus meningkatkan kualitas PATEN;</li> <li>▪ Informasi mengenai penyelenggaraan PATEN ini diperoleh dari warga masyarakat dan petugas pelayanan;</li> <li>▪ Monev PATEN untuk meningkatkan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap layanan kecamatan.</li> </ul>

## TAHAP 4:

**Diskusi kelompok tentang pemetaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dilaksanakan kecamatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat**

Pada tahap ini Peserta akan memetakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dilaksanakan kecamatan yang mendukung peningkatan kesra sesuai instrumen kerja parameter seleksi kewenangan. Box 8.3. meringkas langkah-langkah pelaksanaan diskusi kelompok sebagai berikut :

**Box 8.3.**  
**Langkah-langkah pelaksanaan diskusi kelompok**  
**PEMETAAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DAPAT**  
**DIDELEGASIKAN KEPADA CAMAT DAN DAPAT MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN**  
**MASYARAKAT**

- Langkah 1*            Membagi kelompok diskusi berdasarkan karakteristik kecamatan yang terdiri dari 2 kelompok.
- Langkah 2*            Peserta mengisi instrumen kerja parameter seleksi kewenangan dari fasilitator
- Langkah 3*            Peserta mempresentasikan hasil pengisian tugas individu yang disampaikan secara acak
- Langkah 4*            Fasilitator menyimpulkan proses diskusi kelompok

**INSTRUMEN KERJA (LK 8.1)**

No	PATEN YANG DAPAT DIDELEGASIKAN KEPADA CAMAT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	KONDISI SAAT INI	UPAYA YANG BISA DILAKUKAN
A	PERIZINAN 1..... 2..... 3..... 4.....		
B	NON PERIZINAN 1..... 2..... 3..... 4.....		

## TAHAP 6:

### Pembulatan hasil pembelajaran dan penutupan

Peserta bersama fasilitator akan membulatkan dan menyimpulkan intisari dari seluruh materi yang diberikan pada modul ini. Peserta diharapkan dapat menjawab beberapa pernyataan evaluatif dari fasilitator sebagai berikut:

- Apa pentingnya PATEN bagi kecamatan yang belum menerapkan dan bagi semua kecamatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat?
- Hal-hal apa saja dalam PATEN yang dapat menjadi inovasi bagi kecamatannya ?
- Item-item kewenangan apa saja baik perizinan dan non perizinan yang efektif dilaksanakan oleh kecamatan dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ?
- Bagaimana cara Camat dapat turut mengawal terlaksananya pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan yang telah dipetakan?
- Peserta dan fasilitator kemudian akan bersama-sama menyimpulkan intisari materi pada modul ini. Alternatif kesimpulan materi dapat dilihat pada Box 8.3. berikut:

#### Box 8.3.

### KESIMPULAN MODUL 8

1. PATEN merupakan penyelenggaraan pelayanan terhadap publik yang dilakukan di Kecamatan yang dimulai dari permohonan sampai kepada penerbitan dokumennya melalui satu loket di kecamatan.
2. Pelayanan publik melalui PATEN di Kecamatan bisa berupa perizinan dan non perizinan yang didelegasikan oleh Bupati/Walikota kepada Camat.
3. Tujuan dilaksanakannya PATEN di Kecamatan agar masyarakat mendapat pelayanan yang lebih cepat, mudah, tidak diskriminatif dan transparan.
4. PATEN yang dilaksanakan dengan baik akan menghargai martabat dan kedudukan warga sehingga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan warga terhadap pelayanan pemerintah.
5. PATEN mendorong peningkatan kesejahteraan warga dikecamatan disebabkan dengan dipermudah dalam pengurusan baik perizinan maupun non perizinan.

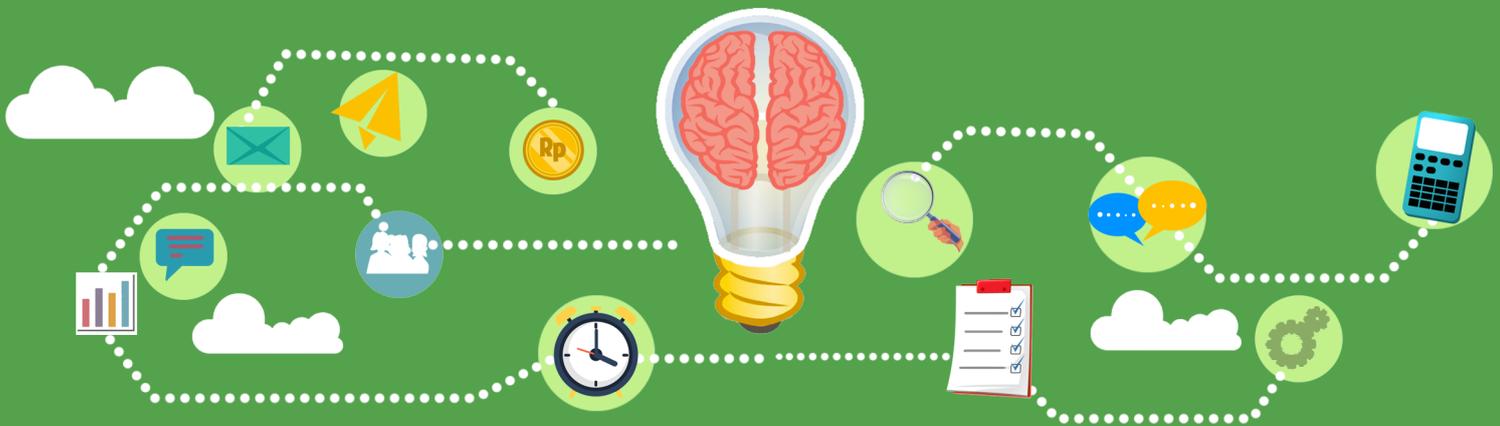




MODUL

09

# KOORDINASI KEGIATAN PELAYANAN DASAR DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT





### Materi Bahasan:

- 9.1. Makna, tujuan dan pentingnya koordinasi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
- 9.2. Menyusun mekanisme koordinasi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat



### Kompetensi Dasar:

#### A. KOMPETENSI PEMERINTAHAN:

1. (O.841120.031.01) Menjalin Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan
2. (O.841120.034.01) Melakukan Diagnosis Organisasi
3. (O.841120.041.01) Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah
4. (O.841120.045.01) Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan Dan Hubungan Antar Kelembagaan
5. (O.841120.052.01) Melakukan Diplomasi Koordinasi
6. (O.841120.063.01) Merumuskan Standar Pelayanan Pemerintah

#### B. KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL:

1. M.01 Integritas
2. M.02 Kerjasama
3. M.03 Komunikasi
4. M.04 Orientasi Pada Hasil
5. M.06 Pengembangan Diri dan Orang Lain
6. M.07 Mengelola Perubahan
7. M.08 Pengambilan Keputusan
8. SK.01 Perekat Bangsa

#### C. KOMPETENSI TEKNIS Terkait pelaksanaan tugas camat, guna mendukung penanggulangan kemiskinan :

1. Koordinasi
2. Fasilitasi
3. Kepemimpinan
4. Akuntabilitas



### Perubahan yang Diharapkan:

#### Peserta BimTek:

1. Peka dan berkomitmen terhadap kebutuhan terselenggaranya kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan secara terpadu
2. Berkomitmen untuk membangun kerjasama antar pemangku tanggungjawab dalam kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat



### Waktu:

3 JP ( Jam Pelajaran ) @ 45 menit = 135 menit



## 1. LATAR BELAKANG

Modul ini mengajak Peserta untuk memahami tentang koordinasi yang baik serta mampu untuk merumuskan cara dan mekanisme koordinasi dalam kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Camat mempunyai tugas pemberdayaan ekonomi masyarakat tugas-tugas pemangku tanggungjawab dalam kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan warga berbasis hak, berkeadilan gender dan inklusif;
2. Dalam Pemenuhan hak warga sebagai pendekatan dalam peningkatan kesejahteraan warga, tidak bisa dipisah pisahkan sehingga perlu penanganan terpadu untuk menjalankannya;
3. Kesulitan dalam menjalankan tugas koordinasi dan koordinasi selalu menjadi permasalahan pada kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan berbagai pemangku tanggungjawab di wilayah kerjanya, menuntut camat lebih cakap dan sigap untuk merumuskan cara dan mekanisme koordinasi yang lebih tepat.



## 2. TUJUAN

Modul 9, bertujuan untuk membuat peserta BimTek memahami pentingnya koordinasi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis hak, serta mampu merumuskan mekanisme koordinasi tersebut, dalam rangka menggali potensi yang ada untuk peningkatan kesejahteraan warga di Kecamatan.

Tujuan Modul ini akan dicapai melalui pencapaian tujuan pada berbagai materi bahasan modul. Tujuan masing-masing materi bahasan berikut indikator pencapaiannya adalah sebagai berikut:

## MATERI BAHASAN 9.1

Makna, Tujuan dan Pentingnya Koordinasi Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

### Tujuan Materi Bahasan

Peserta dapat memahami makna, tujuan dan pentingnya koordinasi pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

### Indikator Pencapaian Tujuan

1. Peserta mampu menjelaskan makna, tujuan dan pentingnya koordinasi
2. Peserta mampu menjelaskan kesepakatan inti dalam mekanisme koordinasi.

## MATERI BAHASAN 9.2.

Mekanisme Koordinasi Kegiatan Pelayanan Dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

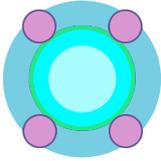
### Tujuan Materi Bahasan:

Peserta dapat memahami mekanisme koordinasi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

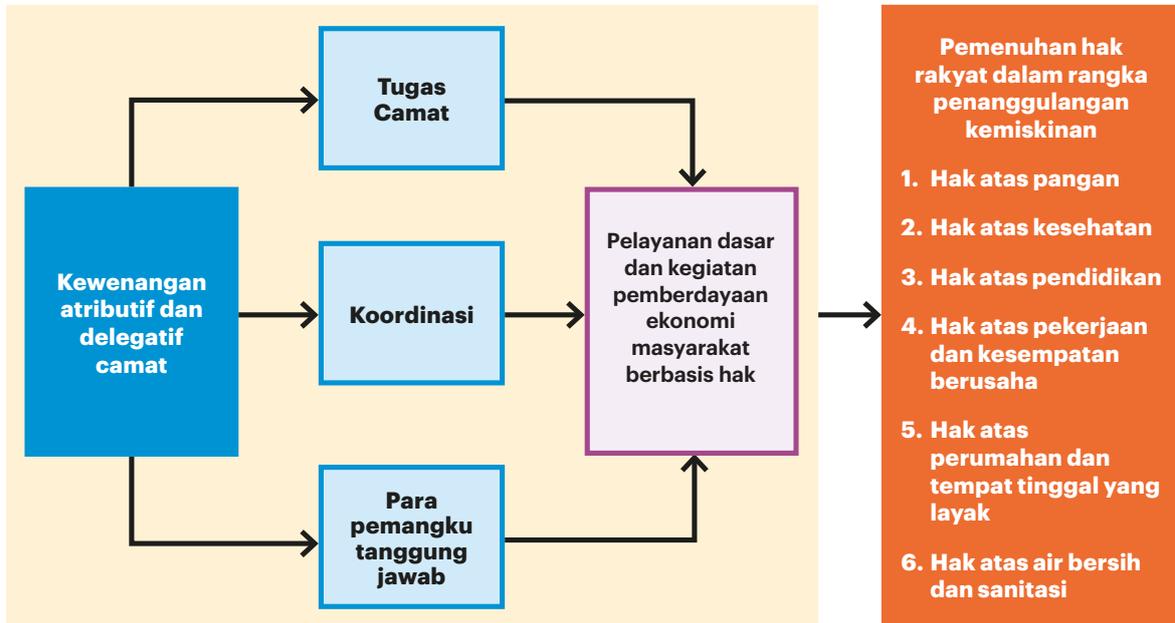
### Indikator Pencapaian Tujuan:

1. Peserta mampu menyusun dan mengisi instrumen koordinasi pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
2. Peserta mampu mengkoordinir dan menentukan cara mekanisme koordinasi yang sistematis antar pemangku tanggungjawab (Sektor terkait)





### 3. KERANGKA MATERI MODUL 9



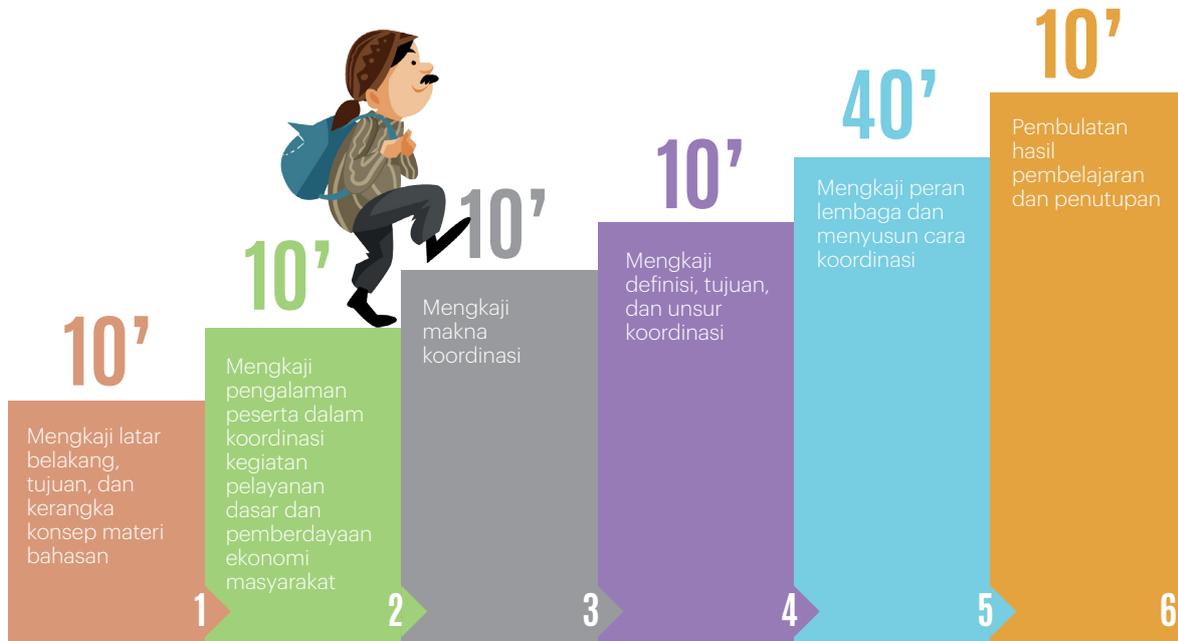
Kerangka modul ini menjelaskan tentang koordinasi Camat dalam pemenuhan hak warga terutama untuk warga miskin dan rentan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan harus terpadu dalam pemenuhannya. Pemenuhan hak warga terutama warga miskin dan rentan dapat melalui kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Camat mempunyai tugas atributif untuk mengkoordinasikan kegiatan pemenuhan hak warga melalui pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh semua pemangku tanggungjawab di kecamatan lokasi tugasnya. Disamping tugas atributif tersebut, Camat melalui pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota juga dapat ditugaskan dalam kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang juga menuntut tindakan koordinasi dengan semua pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam mencapai kesejahteraan warga.





## 4. TAHAP-TAHAP PEMBELAJARAN

Tahapan-tahapan pembelajaran yang akan dialami oleh peserta adalah sebagai berikut:



Proses lengkap pada setiap tahap pembelajaran adalah sebagai berikut:

### TAHAP 1:

#### WAKTU 10 MENIT

#### Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Dan Kerangka Konsep Materi Bahasan

Pembelajaran pada tahap ini adalah untuk membuat peserta mendapatkan gambaran mengenai latar belakang dan tujuan diberikannya materi mengenai koordinasi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari pemberian gambaran ini, peserta dapat mengkomunikasikan kebutuhan belajarnya terkait topik ini, sehingga dapat menyepakati kerangka substansi materi dan menyepakati proses pembelajarannya.

Peserta akan mendapat kesempatan untuk mendiskusikan serta mengusulkan penyesuaian atau tambahan tujuan pembelajaran, serta materi yang dirasa dibutuhkan untuk dipelajari.

## TAHAP 2:

### WAKTU 10 MENIT

#### Mengkaji Pengalaman Peserta tentang Koordinasi Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pembelajaran pada tahap 2 ini dimaksudkan untuk menggali pengalaman dari peserta mengenai koordinasi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada tahap ini, peserta yang terpilih akan menceritakan pengalaman terbaik dalam melakukan kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peserta yang terpilih harus menceritakan pengalaman tersebut dengan pendekatan 5 W dan 1 H yakni:

- Apa (*What*), bentuk kegiatan koordinasi yang pernah dilakukan
- Dimana (*Where*), kegiatan koordinasi tersebut dilakukan
- Kapan (*When*), kegiatan koordinasi tersebut dilaksanakan
- Siapa (*Who*), individu dan kelembagaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut
- Mengapa (*Why*), kegiatan koordinasi tersebut dilakukan
- Bagaimana (*How*), Kegiatan tersebut dilakukan

## TAHAP 3:

### Mengkaji Makna Koordinasi

Pada tahap 3 ini peserta akan mengkaji tentang makna dari koordinasi melalui permainan Bantuan Untuk Keluarga Belum Sejahtera secara berkelompok. Melalui permainan ini dari peserta masing masing kelompok diharapkan memilih 8 nama dengan cara melingkari nama yang dipilih dari 32 Nama. Nama yang dipilih oleh masing masing kelompok akan sangat tergantung dari efektifnya koordinasi di antara anggota kelompok dan antar kelompok



<b>Box 9.1</b> <b>Permainan</b> <b>BANTUAN BAGI KELUARGA BELUM SEJAHTERA</b>	
Alat yg dibutuhkan 1. 4 Lembar kertas yg berisi 32 nama keluarga belum sejahtera 2. Kain flannel 3. Double tip 4. Spidol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta dibagi menjadi 4 kelompok ( masing masing dengan jenis bantuan yang berbeda )</li> <li>• Masing-masing kelompok mendapat 1 lembar kertas yang berisi 32 nama keluarga belum sejahtera</li> <li>• Tiap –tiap kelompok menentukan 8 nama yang terpilih sebagai penerima bantuan dengan cara melingkari</li> <li>• Nama yang berwarna merah untuk jenis kelamin wanita dan warna hitam untuk jenis kelamin laki laki</li> <li>• Setiap kelompok terlebih dahulu menentukan pemimpin yang akan memandu <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap kelompok dalam menentukan pilihan tidak diperbolehkan melihat dan bertanya pada kelompok lain</li> <li>2. Setelah selesai menentukan pilihan, kertas tersebut ditempelkan di kain flanel</li> </ol> </li> </ul>
Makna Permainan	Bagaimana setiap kelompok mengetahui permasalahan dan perlunya saling berkoordinasi sehingga melalui koordinasi yang baik dengan adanya berbagai jenis bantuan tidak akan terjadi duplikasi di satu nama. Bagaimana bentuk advokasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok untuk menyelesaikan tugasnya. Makna bahwa setiap keluarga belum tentu mendapat kesempatan untuk mendapatkan haknya dan ada keluarga yang mendapat lebih 1 jenis bantuan. Sesuai dengan tujuan bantuan bahwa setiap keluarga yang belum sejahtera akan mendapatkan bantuan. Jadi koordinasi menjadi sangat penting.

## TAHAP 4:

### WAKTU 10 MENIT

#### Mengkaji Definisi, Tujuan dan Unsur Koordinasi

Pada tahapan ini peserta akan mengkaji tentang definisi, tujuan dan pentingnya koordinasi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembelajaran pada tahap ini peserta akan mendapatkan penjelasan dari Fasilitator terkait dengan konsep koordinasi dan unsur-unsur yang penting dalam pelaksanaan koordinasi.

Peserta juga mendapat kesempatan untuk mendiskusikan secara bersama melalui curah pendapat terkait tambahan materi yang penting untuk di bahas sehingga akan memperkaya pemahaman yang berkaitan dengan koordinasi. Ringkasan penjelasan dari fasilitator dapat dilihat pada box 9.2.

**Box 9.2**  
**Ringkasan Penjelasan fasilitator**

<p>Konsep Koordinasi Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>Salah satu bentuk konsep dalam melakukan koordinasi adalah bagaimana pemangku tanggungjawab yang mempunyai kepentingan dan tujuan bersama memahami tentang pentingnya melakukan koordinasi dalam setiap tindakannya.</p> <p>Koordinasi efektif yang dilakukan dalam rangka untuk mengoptimalkan sumberdaya yang <del>dipunyai</del> ada di masing-masing pihak untuk mencapai tujuan bersama tersebut.</p> <p>Untuk mencapai kesejahteraan warga melalui kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan upaya yang terpadu dari seluruh pemangku tanggungjawab baik dari unsur pemerintah maupun pihak-pihak lainnya di luar pemerintah sendiri seperti pihak swasta, LSM dan tokoh masyarakat.</p> <p>Camat sebagai aparat pemerintahan yang berdekatan langsung dengan masyarakat harus lebih Sigap dan Cakap untuk dapat menginisiasi koordinasi dengan semua pemangku tanggungjawab dalam kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan warga.</p>
<p>Definisi Koordinasi</p>	<p>Adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.</p> <p>Menurut <b>James G March</b> dan <b>Herben A Simon</b>, adalah suatu proses untuk mencapai kesatuan tindakan di antara kegiatan yang saling bergantung.</p> <p>Menurut <b>Terry, Koordinasi</b> adalah suatu sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk memberikan jumlah yang tepat, waktu dan mengarahkan pelaksanaan yang mengakibatkan harmonis dan tindakan terpadu untuk tujuan lain. Pandangan mengenai koordinasi ini menarik perbedaan antara koordinasi dengan kerja sama. Kerja sama diartikan sebagai aksi kolektif satu orang dengan yang lain atau orang lain menuju tujuan bersama.</p> <p>Jika dilihat dari sudut normatifnya, maka koordinasi diartikan sebagai <b>kewenangan untuk menggerakkan, menyelaraskan, menyerasikan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda, agar nantinya semua terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsionalnya, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.</b></p> <p>Dari pengertian koordinasi yang diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian koordinasi adalah proses penyepakatan bersama yang mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa, sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur tersebut terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain</p>

<p>Tujuan untuk saling berkoordinasi</p>	<p>Koordinasi bertujuan untuk:</p> <p>a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan keseimbangan antara berbagai kegiatan dependen suatu organisasi. Menciptakan efektifitas kerja antar pemangku tanggung jawab dan pihak lain yang terkait untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat</p> <p>b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya di setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan. Mencegah terjadinya konflik antara pemangku tanggungjawab melalui kesepakatan yang mengikat</p> <p>c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lainnya, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif</p>
<p>Unsur-unsur penting dalam berkoordinasi</p>	<p>Unsur Koordinasi menurut beberapa ahli</p> <p>Menurut Leonard D. White adalah penyesuaian diri (<i>adjustment</i>), pengoperasian (<i>Operation</i>), waktu (<i>time</i>) yang cocok, sumbangan terbanyak (<i>maximum contribution</i>), serta hasil (<i>product</i>).</p> <p>Menurut Terry adalah usaha-usaha sinkronisasi yang teratur (<i>orderly synchronization of effort</i>), pengaturan waktu (<i>timing</i>) dan dipimpin (<i>directing</i>), harmonis (<i>harmonious</i>), serta tujuan yang ditetapkan (<i>Stated objective</i>)</p> <p>Menurut James D. Mooney adalah susunan yang teratur dari usaha kelompok (<i>orderly arrangement of group effort</i>), kesatuan tindakan (<i>unity of action</i>), serta tujuan bersama (<i>common purpose</i>)</p> <p>Menurut Sugandha, unsur-unsur yang terkandung dalam usaha koordinasi terdiri dari, unit-unit atau organisasi-organisasi, Sumber-sumber (potensi), kesatu-paduan, gerak kegiatan, keserasian, serta arah yang sama (sasaran)</p> <p>Dari semua unsur yang disampaikan para ahli dapat disimpulkan bahwasanya unsur unsur dalam koordinasi tersebut semuanya berkaitan dengan pencapaian tujuan bersama dengan mengoptimalkan sumber daya semua pihak yang berkoordinasi seperti waktu, potensi, keserasian dan keterpaduan kegiatan.</p> <p>Sumber daya ini juga bisa disebut dengan unsur koordinasi.</p>
<p>Tingkatan Koordinasi</p>	<p>Koordinasi terdiri 3 tingkatan, yakni kerjasama, kolaborasi dan integrasi. Pencirian dari 3 tingkatan koordinasi tersebut dapat dilihat dari 2 aspek yakni aspek kondisi masing-masing pemangku tanggungjawab yang berkoordinasi dan cara pengambilan keputusan, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini</p>

	KERJASAMA	KOLABORASI	INTEGRASI
Pemangku tanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengambil keputusan sendiri</li> <li>▪ Tetap otonom</li> <li>▪ Memiliki staff dan anggaran sendiri</li> <li>▪ Bertanggung jawab sendiri atas tindakan yang diambil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berbagi tanggung jawab dan pengambilan keputusan</li> <li>▪ Berbagi peran dan tugas</li> <li>▪ Akuntabel terhadap lembaga mitra lainnya</li> <li>▪ Mengkontribusikan sumber daya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanggung jawab dialihkan ke struktur/ entitas organisasi yang baru</li> <li>▪ Sumber daya diintegrasikan</li> <li>▪ Kegiatan diadministrasikan sesuai prosedur yang disepakati</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diambil secara konsensus</li> <li>▪ Kesepakatan tidak selalu diperlukan untuk semua kasus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diambil secara konsensus</li> <li>▪ Kesepakatan diperlukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dengan pengambilan suara, jika perlu</li> <li>▪ Kesepakatan diperlukan</li> </ul>

<p><i>Advokasi Mendorong Koordinasi</i></p>	<p>a. Kegiatan Advokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi akan adanya masalah yang diakibatkan dari kegiatan yang telah dilakukan</li> <li>• Pendekatan kepada pemangku tanggungjawab untuk melihat seberapa jauh hasil yang telah dicapai</li> <li>• Mempromosikan manfaat berkolaborasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Konsolidasi sumber daya</li> <li>◦ Efisiensi pelayanan</li> <li>◦ Pelayanan lebih berkualitas</li> <li>◦ Media saling belajar</li> <li>◦ Penguatan organisasi</li> <li>◦ Media untuk mendapat dukungan (dari pendana dan dari publik)</li> <li>◦ Keberlanjutan pelayanan</li> </ul> </li> <li>• Mempromosikan kebutuhan untuk berkoordinasi berdasarkan resource yang tersedia dari lembaga-lembaga potensial:</li> <li>• Kesamaan visi, misi, pola administrasi/ komunikasi/ penanganan konflik/akuntabilitas</li> <li>• Kesiapan berbagi sumber daya dan informasi</li> <li>• Kesiapan berbagi pengambilan keputusan dan akuntabilitas</li> </ul> <p>b. Lembaga Potensial untuk Berkoordinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciri-ciri lembaga yang termotivasi untuk berkoordinasi:</li> <li>• Menyadari adanya masalah dalam pencapaian hasil yang diinginkan</li> <li>• Membutuhkan tambahan sumber daya untuk melaksanakan pelayanan (staff, ruang, peralatan)</li> <li>• Ingin memberi pelayanan secara lebih efisien, dan menghindari adanya konflik</li> <li>• Ingin melayani penggunaanya secara lebih efektif, dan tidak bisa dilaksanakan sendiri</li> <li>• Ingin belajar dari lembaga lainnya</li> <li>• Membutuhkan dukungan lembaga lain untuk mendapatkan dukungan dari suatu pihak.</li> <li>• Ingin memperkuat lembaganya</li> <li>• Ingin mengupayakan keberlanjutan layanan melalui kerja sama dengan lembaga lain.</li> </ul>
---	--

## TAHAP 5:

### Mengkaji cara menyusun koordinasi

Pada tahapan ini peserta akan mengkaji melalui diskusi kelompok tentang cara menyusun koordinasi dalam kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mendiskripsikan permasalahan yang pernah terjadi dalam koordinasi kegiatan pelayanan dasar seperti pemberian identitas hukum kepada warga, pelayanan kesehatan, pelaksanaan pendidikan, pemenuhan insfratraktur dasar dan kegiatan kelompok ekonomi produktif.

### Pengantar:

Permasalahan koordinasi pada masing-masing bidang dapat diambil dari pembelajaran pada materi pada modul sebelumnya. Dapat disesuaikan dengan SPM yang harus dicapai

### Pembagian Kelompok dalam Pengerjaan Instrument:

Pengisian instrument akan dilakukan oleh 5 kelompok:

a. Kelompok Identitas Hukum.

Kelompok ini akan merumuskan strategi mengoordinasikan berbagai lembaga untuk melakukan kegiatan bersama terkait pelayanan identitas hukum.

b. Kelompok Kesehatan.

Kelompok ini akan merumuskan strategi mengoordinasikan berbagai lembaga untuk melakukan kegiatan bersama terkait pelayanan kesehatan.

c. Kelompok Pendidikan.

Kelompok ini akan merumuskan strategi mengoordinasikan berbagai lembaga untuk melakukan kegiatan bersama terkait pelayanan pendidikan.

d. Kelompok Infrastruktur Dasar.

Kelompok ini akan merumuskan strategi mengoordinasikan berbagai lembaga untuk melakukan kegiatan bersama terkait infrastruktur dasar

e. Kelompok Ekonomi Produktif.

Kelompok ini akan merumuskan strategi mengoordinasikan berbagai lembaga untuk melakukan kegiatan bersama terkait ekonomi produktif.



### Instrumen Kerja (IK.9.1)

#### Perumusan Koordinasi Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat

Bidang Tugas Diskusi	:	
Masalah apa yang terjadi di kecamatan yang menurut anda memerlukan tindakan dari berbagai-pemangku tanggungjawab	:	
Apa yang telah dilakukan masing-masing pemangku tanggungjawab untuk menangani masalah tadi	:	
Mengapa masalah masih terjadi dan kegiatan apa lagi yang perlu dilakukan	:	
Perluakah kegiatan tadi dilakukan secara bersama	:	
Pemangku tanggungjawab yang terlibat dalam koordinasi masalah tersebut	:	
Harapan Anda mengenai dampak dari Koordinasi kegiatan tersebut	:	
Cara Anda meyakinkan pemangku tanggungjawab yang Anda harapkan terlibat agar berkoordinasi	:	
Mekanisme koordinasi yang seperti apa yang bisa Anda tawarkan kepada para pemangku tanggungjawab tadi	:	Mekanisme komunikasi
		Mekanisme penanganan konflik
		Mekanisme akuntabilitas

	Mekanisme monitoring dan evaluasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator keberhasilan koordinasi yang akan diukur:</li> <li>• Cara pengukuran indikator:</li> </ul>
--	---

## TAHAP 6:

### Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup

Pada tahapan ini peserta akan melakukan pembulatan terkait dengan hasil pembelajaran materi koordinasi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat peserta perlu mencermati materi ini secara keseluruhan dengan menjawab berapa pertanyaan kunci apakah saya telah dapat:

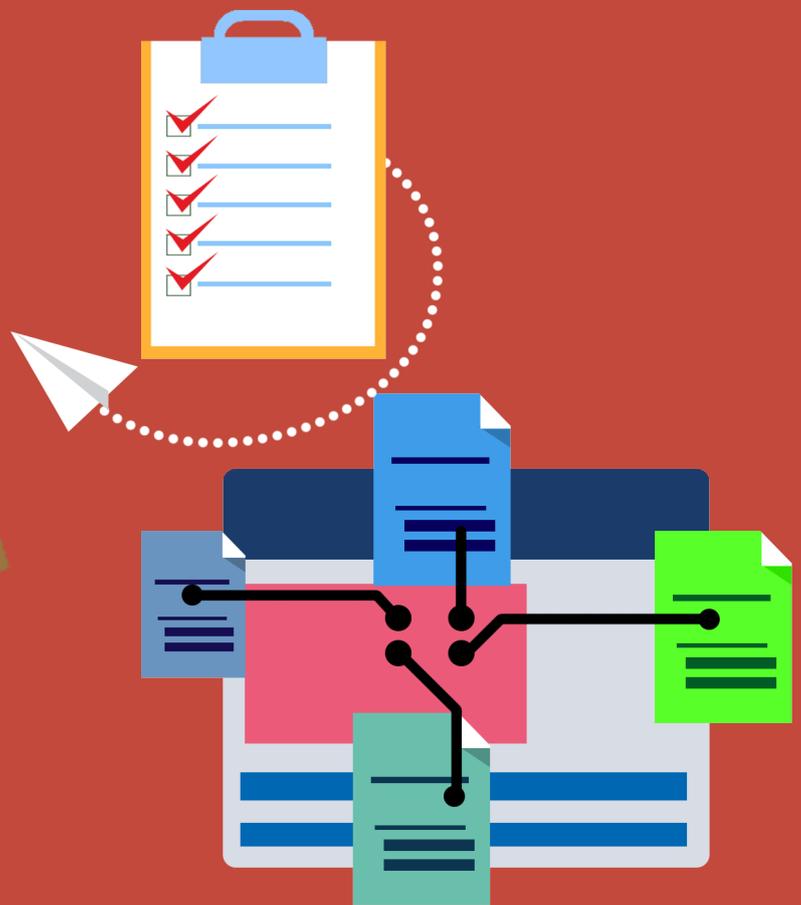
1. Menjelaskan konsep koordinasi dalam pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Menjelaskan makna, tujuan dan pentingnya koordinasi
3. Menjelaskan pentingnya menyusun mekanisme koordinasi pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
4. Apakah mampu mengkoordinir pelaksanaan koordinasi pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat?

Selanjutnya pembahasan akhir dari pembelajaran dari modul ini adalah penarikan kesimpulan penting dari modul koordinasi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi sebagai berikut:

1. Warga masyarakat memiliki 10 hak dasar yang pemenuhannya saling terkait dan tidak bisa dipisah-pisahkan.
2. Agar memenuhi hak warga yang saling terkait, penyelenggaraan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat hendaknya dilaksanakan secara terpadu oleh semua pemangku tanggungjawab.
3. Sesuai tugasnya, camat dapat memfasilitasi penyelenggaraan terpadu pelayanan dasar dan ekonomi terpadu. Camat dapat memfasilitasi identifikasi kebutuhan dan potensi koordinasi, mengadvokasi terwujudnya koordinasi, memfasilitasi perumusan disain koordinasi, memfasilitasi pelaksanaan koordinasi, serta memfasilitasi monitoring dan evaluasi atas keberhasilan koordinasi.
4. Instrumen fasilitasi perumusan mekanisme koordinasi dapat membantu camat dalam memfasilitasi penyelenggaraan terpadu pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan lokasi tugasnya.
5. Bahwa sesuai tugasnya seorang camat tidak mempunyai kepentingan lain, tetapi kepentingan bahwa mensejahterakan warganya adalah merupakan tugas camat.

MODUL  
**10**

# MENYUSUN RENCANA AKSI





### **Materi Bahasan:**

- 10.1. Pembulatan pembelajaran BimTek Camat
- 10.2. Menyusun rencana aksi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat



### **Kompetensi Dasar:**

- A. KOMPETENSI PEMERINTAHAN:
  1. (O.841120.035.01 ) Menyusun Rencana Kerja SKPD
  2. (O.841120.057.01) Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal
  3. (O.841120.045.01) Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan
- B. KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL:
  1. 1. M.01 Integritas
  2. 2. M.02 Kerjasama
  3. 3. M.04 Orientasi Pada Hasil
  4. 4. M.05 Pelayanan Publik
  5. 5. M.06 Pengembangan Diri dan Orang Lain
  6. 6.M.07 Mengelola Perubahan
  7. 7.M.08 Pengambilan Keputusan
  8. 8. SK.01 Perekat Bangsa
- C. KOMPETENSI TEKNIS Terkait pelaksanaan tugas camat, guna mendukung penanggulangan kemiskinan:
  1. Koordinasi
  2. Fasilitasi
  3. Kepemimpinan



### **Perubahan yang Diharapkan:**

#### **Peserta BimTek:**

1. Peka dan berkomitmen terhadap kebutuhan terselenggaranya kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan secara terpadu.
2. Mempunyai rencana kerja yang terinci dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.



### **Waktu:**

2 JP ( JamPelajaran ) @ 45 menit = 90 menit



## 1. LATAR BELAKANG

Materi ini mengajak Peserta untuk merefleksikan dan membahas kembali hal-hal yang penting dari materi-materi yang telah didapat pada pembelajaran sebelumnya. Dengan merefleksikan semua materi-materi tersebut diharapkan peserta dapat menjalin hubungan diantara materi tersebut dan dapat mengambil kesimpulan, dan selanjutnya dapat menyusun rencana aksi yang akan menjadi pedoman untuk kegiatan pasca BimTek di kecamatan lokasi tugas. Pertimbangan yang melatar belakangi materi ini adalah:

1. Pelatihan ini adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas Camat dalam peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
2. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan Camat memiliki peran dan kewenangan strategis sebagai mana diamanatkan oleh UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan No 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memastikan efektifitas pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan di wilayah kerjanya.
3. Peningkatan kesejahteraan di kecamatan memerlukan keterlibatan semua pihak pemangku tanggungjawab dan masyarakat dan untuk itu camat yang mempunyai tugas koordinasi mempunyai peran sebagai koordinator dalam peningkatan kesejahteraan di kecamatan lokasi tugas.
4. Camat perlu untuk menindak lanjuti hasil yang didapat dari BimTek camat untuk diterapkan di lokasi kecamatan wilayah tugas yang berpedoman kepada rencana aksi yang dibuat setelah BimTek dilaksanakan.
5. Penyusunan rencana aksi dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi tidak bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Camat.



## 2. TUJUAN

Modul 10, bertujuan untuk memperkuat komitmen peserta BimTek untuk lebih peka dalam peningkatan kesejahteraan dan mampu untuk menyusun rencana aksi yang melibatkan semua unsur dalam kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tujuan Modul ini akan dicapai melalui pencapaian tujuan pada berbagai materi bahasan modul. Tujuan masing-masing materi bahasan berikut indikator pencapaiannya adalah sebagai berikut:

## MATERI BAHASAN 10.1

Pembulatan pembelajaran BimTek Camat

### Tujuan Materi Bahasan

Peserta dapat menjelaskan materi penting Bintek dan mampu menyimpulkan Materi BimTek camat

### Indikator Pencapaian Tujuan

1. Tersampainya kesimpulan materi BimTek camat
2. Terbangunnya komitmen untuk menindaklanjuti
3. Rencana aksi

## MATERI BAHASAN 10.2.

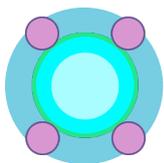
Menyusun rencana aksi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

### Tujuan Materi Bahasan ;

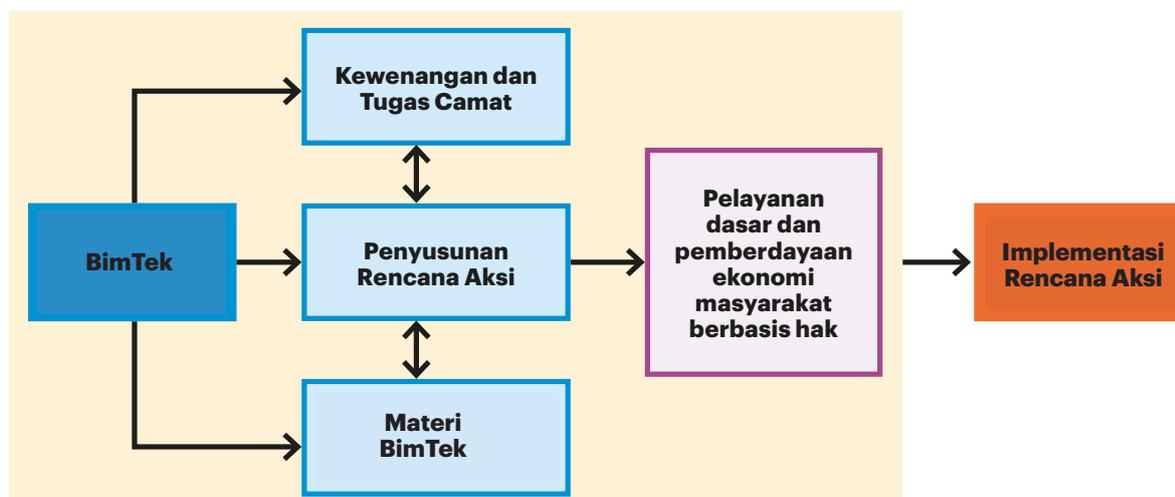
Peserta dapat menyusun rencana aksi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

### Indikator Capaian

1. Peserta memahami peran lembaga terkait dalam kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi.
2. Tersusunnya rencana aksi yang terinci dan terukur yang melibatkan semua pihak bertanggungjawab



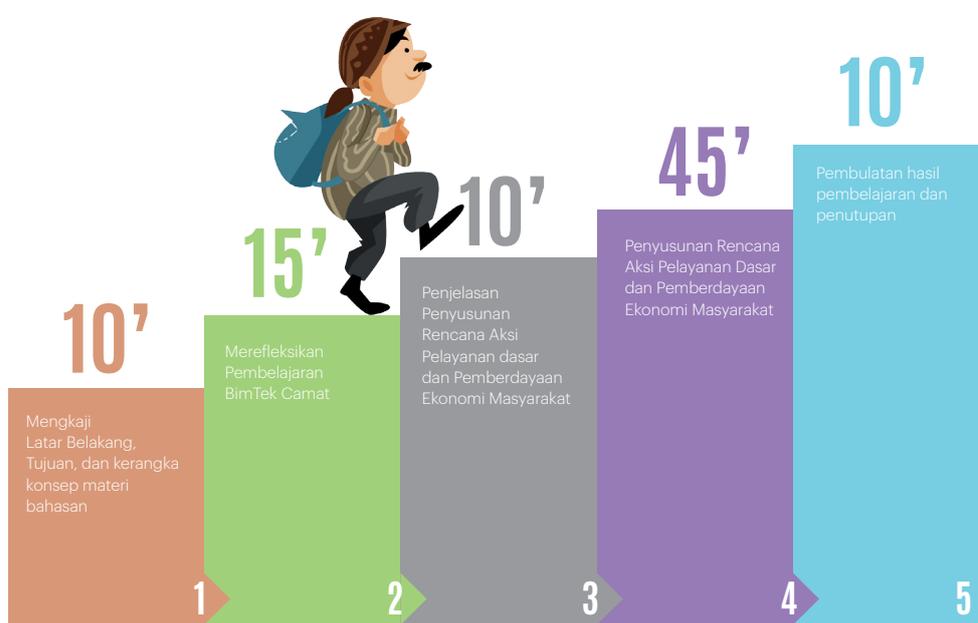
## 3. KERANGKA MATERI MODUL 10



BimTek Peningkatan Kapasitas Camat dalam Peningkatan Kesejahteraan melalui Pelayanan dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dilaksanakan secara komprehensif, sehingga perlu menyusun Rencana Aksi yang akan menjadi pedoman kegiatan peningkatan kesejahteraan di kecamatan lokasi tugas. Rencana Aksi yang disusun berdasarkan kewenangan dan tugas-tugas yang dimiliki oleh Camat dan sebaiknya melibatkan semua unsur pemangku kepentingan.



## 4. TAHAP-TAHAP PEMBELAJARAN



Proses lengkap pada setiap tahap pembelajaran adalah sebagai berikut:

### TAHAP 1:

#### Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, dan Kerangka Konsep Materi Bahasan

Peserta diajak untuk memahami latar belakang, tujuan dan konsep materi modul 10 yang merupakan materi terakhir dari BimTek Camat dan bagian yang sangat penting untuk dilanjutkan dengan menyusun rencana aksi yang akan menjadi pedoman kegiatan peningkatan kesejahteraan di kecamatan lokasi tugas.

## TAHAP 2:

### Merefleksikan pembelajaran BimTek Camat

Pada tahap ini peserta diajak untuk kembali merefleksikan materi pembelajaran yang telah disampaikan pada BimTek Camat dan untuk proses ini peserta diminta untuk menceritakan hal-hal yang penting dari materi BimTek dan secara bersama-sama dengan fasilitator menyimpulkan bagian-bagian yang dianggap penting dari materi tersebut.

## BAHAN BACAAN

### Pembelajaran BimTek Camat

Bahan bacaan yang akan disampaikan adalah kata-kata penting yang menjadi kesimpulan pada masing-masing modul pada BimTek Camat sebagai berikut:

#### Box 10.1

#### Ringkasan Materi BimTek

#### Modul 1 Perkenalan dan Kontrak Belajar

Dari Modul 1 Peserta telah mempelajari hal-hal berikut:

1. Saling mengenal antara peserta dengan peserta, fasilitator dan panitia penyelenggara adalah prasyarat utama untuk keberhasilan BimTek
2. Partisipasi aktif peserta diwujudkan melalui pengelolaan kelas dan aturan yang telah disepakati untuk dijalankan dan ditegakkan
3. Konsistensi antara tujuan BimTek dan proses perlu dipegang bersama antara fasilitator dan peserta untuk mendapatkan hasil yang optimal.
4. Proses dan Metode BimTek yang tepat digunakan adalah kombinasi pendekatan pembelajaran orang dewasa, *appreciative inquiry* dan *experiential learning approach*.

#### Modul 2 Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Hak

Dari Modul 2 Peserta telah mempelajari hal-hal berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan memperkuat penghidupan (livelihood) dan pendapatan.

2. Menyelenggarakan pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan identitas hukum) secara terkoordinasi.
3. Mewujudkan keadilan gender.
4. Mengupayakan inklusi.
5. Memberi perlindungan dan peningkatan akses pada warga miskin dan rentan

Modul 2 juga telah membekali Peserta dengan instrument kerja untuk:

1. Mendiagnosis pemenuhan hak warga atas kesejahteraan di Kecamatan
2. Memetakan warga miskin dan rentan di kecamatan, beserta perlindungan sosial yang mereka butuhkan.
3. Peserta dapat menggunakan kedua instrument ini untuk lebih aktif memantau seberapa jauh hak warga atas kesejahteraan telah terpenuhi di Kecamatan.

### **Modul 3 Kepemimpinan Camat yang Sigap dan Cakap**

Modul 3 ini peserta mempelajari beberapa hal antara lain:

1. Camat diharapkan dapat menerapkan kepemimpinan transformatif dalam mengelola program dan kegiatan pembangunan di kecamatannya.
2. Seorang Camat dalam menjalankan tugasnya baik yang bersifat atributif maupun delegatif, harus memiliki peran ganda sebagai pemimpin dan manajer.
3. Sebagai pemimpin yang transformatif Camat menginspirasi perubahan positif kepada para pemangku tanggungjawab dan kepentingan dalam melayani warga miskin, melalui visi dan nilai nilai sikap dan perilaku Sigap dan Cakap.
4. Sebagai Manajer dalam mengelola program dan kegiatan di kecamatannya selalu berfokus memastikan tujuan dan hasil yang ingin dicapai, tepat waktu, sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dengan penggunaan sumber daya dan dana yang efisien.

Pada modul ini Peserta juga mempelajari:

Tugas-tugas dalam melakukan koordinasi, memfasilitasi dan mengambil keputusan dalam menghadapi hambatan dan tantangan program kegiatan penanggulangan kemiskinan bersama dengan para pemangku tanggungjawab dan kepentingan.

### **Modul 4 Penyelenggaraan Pelayanan dasar Berbasis Hak**

Dari modul 4 Peserta telah mempelajari hal-hal berikut:

1. konsep pelayanan dasar berbasis hak
2. mandat pendekatan hak agar penyelenggaraan pelayanan dasar menyediakan

aspek-aspek pelayanan berikut:

- a. ketersediaan
- b. akses
- c. penerimaan
- d. kualitas
- e. keterlibatan dan keberdayaan warga
- f. akuntabilitas dan penanganan keluhan
- g. koordinasi lintas pelayanan
- h. kecukupan anggaran;
- i. peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pelayanan
- j. perlindungan warga miskin dan rentan



Modul 4 juga telah membekali Peserta dengan instrument kerja untuk memantau pemenuhan hak warga kecamatan atas pelayanan dasar.

### **Modul 5 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pada modul ini peserta akan mempelajari beberapa hal sebagai berikut:

1. Komponen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdiri dari (1) Pelaku dan Organisasi Usaha, (2) Tenaga Kerja (3) Iklim Kewirausahaan, (4) Investasi, (5) Infrastruktur Ekonomi, dan (6) Sumber Daya Alam. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan, camat sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan melalui perijinan, rekomendasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan.
2. Peserta dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan dapat mendukung, memprioritaskan dan melindungi warga miskin dan rentan.

Pada akhir pembelajaran modul 5 ini, juga dipelajari

Menganalisa rumusan dukungan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menganalisa masalah apa yang sedang dihadapi dalam perekonomian, tindakan yang telah dilakukan oleh lembaga terkait dan merumuskan potensi dukungan inovatif yang dapat dilakukan sesuai dengan 6 komponen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

### **Modul 6 Pemerintahan Umum**

Modul 6 ini Peserta dapat mempelajari hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa inti dari materi pemerintahan umum adalah menginternalisasikan

- Konsep Wawasan Nusantara dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah Kecamatan.
2. Mengaktualisasikan Sikap dan Perilaku Kewaspadaan Nasional dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah Kecamatan.
  3. menghabituisasikan sikap dan perilaku Kewaspadaan terhadap Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) sehingga terwujud Ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan, dan keamanan (IPOLEK SOSBUD dan HANKAM) dan HANKAM di wilayah Kecamatan

Pada akhirnya peserta akan diajak mengenali secara dini potensi terhadap munculnya konflik dan merumuskan langkah-langkah pencegahan agar tidak menjadi permasalahan sosial yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bernegara.

### **Modul 7 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggraan Kegiatan Desa**

Pada modul ini peserta mempelajari hal-hal sebagai berikut:

Perbedaan pendekatan model BinWas mengontrol dan mendukung dalam menumbuhkan kerjasama yang saling mendukung kinerja masing-masing. Pemahaman tentang keterkaitan peran dan tugas Camat berdasarkan pada undang undang dan peraturan pemerintah serta peraturan menteri yang ada.

Perlunya camat melakukan pendelegasian tugas-tugas pembinaan dan pengawasan kegiatan desa sesuai dengan pelaksanaan kewenangan desa yang terdiri dari bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Selanjutnya pada modul 7 ini juga dipelajari:

Memberikan contoh alat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan desa.

Mengembangkan alat dan mekanisme BinWas terhadap kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang nantinya setelah pelatihan dapat diaplikasikan di kecamatannya masing masing.

### **Modul 8 Pelayanan Terpadu Kecamatan**

#### **Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Dari modul 8 Peserta telah mempelajari hal-hal berikut:

1. PATEN merupakan penyelenggaraan pelayanan terhadap publik yang dilakukan

di Kecamatan yang dimulai dari permohonan sampai kepada penerbitan dokumennya melalui satu loket di kecamatan.

2. Pelayanan publik melalui PATEN di Kecamatan bisa berupa perizinan dan non perizinan yang didelegasikan oleh Bupati/Walikota kepada Camat.
3. Tujuan dilaksanakannya PATEN di Kecamatan agar masyarakat mendapat pelayanan yang lebih cepat, mudah, tidak diskriminatif dan transparan.
4. PATEN yang dilaksanakan dengan baik akan menghargai martabat dan kedudukan warga sehingga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan warga terhadap pelayanan pemerintah.
5. PATEN mendorong peningkatan kesejahteraan warga dikecamatan disebabkan dengan dipermudah dalam pengurusan baik perizinan maupun non perizinan.

Dengan mempelajari Modul 8, peserta juga diharapkan dapat menganalisa hal-hal berikut:

Kewenangan yang dapat didelegasikan kepada kecamatan dalam rangka pelayanan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi pelayanan publik yang ada pada saat ini dan upaya inovasi apa yang dapat dilakukan oleh camat untuk meningkatkan pelayanan tersebut.

## **Modul 9 Koordinasi Kegiatan Pelayanan dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pada modul ini peserta mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan koordinasi pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain:

1. Pemenuhan hak warga terutama untuk warga miskin dan rentan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan harus terpadu dalam pemenuhannya
2. Pemenuhan hak warga terutama warga miskin dan rentan di kecamatan melalui kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat memerlukan kerja sama dan dukungan semua pemangku tanggungjawab.
3. Camat mempunyai tugas atributif untuk mengoordinasikan kegiatan pemenuhan hak warga melalui pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh semua pemangku tanggungjawab di kecamatan lokasi tugasnya
4. Camat melalui pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota dapat juga ditugaskan dalam kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang juga menuntut tindakan koordinasi dengan semua pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam mencapai kesejahteraan warga.

Modul ini juga memberikan pembelajaran terkait dengan :

1. Salah satu bentuk konsep dalam melakukan koordinasi adalah bagaimana pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan tujuan bersama memahami tentang perlunya melakukan usaha bersama dalam setiap tindakannya.
2. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga tidak saling mengganggu tugas masing-masing bahkan saling mendukung.
3. Mengidentifikasi serta menawarkan mekanisme koordinasi pada kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

### TAHAP 3:

#### Penjelasan Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Pelayanan dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Setelah merefleksikan kesimpulan materi bahasan pada modul sebelumnya, maka peserta diajak untuk mengkaji tentang rencana aksi yang nantinya akan disusun secara individu dan akan menjadi pedoman untuk tindakan pasca BimTek.

Peserta juga dapat memberikan masukan terkait dengan pengalamannya menyusun rencana aksi di lokasi tugas masing-masing.

### BAHAN BACAAN

#### Penyusunan Rencana Aksi

Membuat *action plan* atau rencana aksi adalah langkah awal yang mutlak dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan. Lantas, kenapa membuat action plan bisa menjadi demikian penting? Dan apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat action plan yang baik? untuk itu dapat dilihat pada tulisan di bawah ini:



<p>Definisi Rencana Aksi (Action Plan)</p>	<p>Rencana aksi (<i>action plan</i>) adalah suatu rencana kegiatan yang lebih terinci untuk menterjemahkan strategi atau arahan-arahan yang telah diindikasikan pada rencana yang lebih umum, rencana strategis, rencana zonasi dan lain sebagainya kedalam langkah-langkah kerja pengelolaan kegiatan tersebut</p>
<p>Tujuan Pembuatan Rencana Aksi</p>	<p>Menguraikan dengan jelas dan transparan apa yang akan dicapai oleh seluruh pemangku kepentingan atau pemangku tanggungjawab dengan menyusun aksi atau langkah dengan merujuk kepada tujuan utama.</p> <p>Aksi menguraikan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan perlu memperhatikan dan mengisi pertanyaan-pertanyaan dari komponen kegiatan utama dan diterjemahkan kedalam kegiatan-kegiatan yang lebih terinci.</p>
<p>Yang Perlu Diperhatikan dalam Pengembangan Rencana Aksi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat prosedur dan menetapkan kegiatan yang diperlukan (yang harus dilakukan dan cara melakukan)</li> <li>2. Menugaskan penanggungjawab pada setiap kegiatan (peran dan tanggungjawab)</li> <li>3. Membuat jadwal yang jelas dan realistis (yang dilakukan dan waktu pelaksanaan)</li> <li>4. Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan dari mana sumbernya (sumber daya yang diperlukan dan penyedia sumber daya)</li> <li>5. Menetapkan hasil yang diinginkan (yang ingin dicapai dan waktu pencapaian)</li> </ol>
<p>Menindaklanjuti Rencana Aksi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Memeriksa hasil</b>, perkembangan yang dicapai dalam tengat waktu yang ditetapkan</li> <li><b>2. Mengevaluasi kegiatan dan memantau pelaksanaan</b>, pencapaian tujuan tercapai dan penjelasan pencapaian.</li> <li><b>3. Mengomunikasikan dan memberikan penghargaan</b> terhadap pencapaian</li> <li><b>4. Melakukan kajian</b> terhadap perkembangan untuk mengidentifikasi peluang baru dan melihat kesinambungan kegiatan.</li> <li><b>5. Menetapkan target baru</b>, untuk peningkatan pencapaian tujuan</li> </ol>

## TAHAP 4:

### Penyusunan Rencana Aksi Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pada tahap ini peserta diajak untuk menyusun Rencana Aksi dalam kegiatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan mengidentifikasi peran kelembagaan dan pelaku, tahapan kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan tersebut dan perlu juga merumuskan tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan. Rencana aksi ini merupakan janji peserta sebagai tindak lanjut hasil BimTek yang akan diteruskan kepada bupati/walikota masing-masing.

#### Lembar Kerja

Penyusunan Rencana Aksi

#### FORMAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI

Nama Kegiatan Inovatif : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

#### A. Latar Belakang

1. Mengapa rencana aksi dibuat?
2. Apa bentuk kegiatan inovatif?
3. Bagaimana cara mewujudkannya?

#### B. Tujuan dan Manfaat

#### C. Rencana Aksi:

RENCANA AKSI				
NO	KEGIATAN	WAKTU	STAKEHOLDERS TERKAIT/TERLIBAT	OUTPUT
1				
2				

Surabaya, ..... 2017

Camat .....

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

## TAHAP 5:

### Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutupan

Peserta dan fasilitator akan bersama-sama menyimpulkan poin-poin penting dari keseluruhan Modul 10 ini. Peserta akan mendapatkan penjelasan dari fasilitator mengenai keterkaitan dari semua Instrument penyusunan rencana aksi.

Peserta diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan evaluatif dari fasilitator sebagai berikut:

Apakah dapat menjelaskan minimal 2 kesimpulan materi bahasan dari Modul BimTek Camat?

1. Apakah dapat menyebutkan peran lembaga yang melakukan kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan?
2. Apakah devisi dari rencana aksi?
3. Apa yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana aksi?

Pada tahapan akhir dari pembelajaran modul 10 ini, peserta dan fasilitator menyimpulkan pembelajaran sebagai berikut:

1. Peningkatan kesejahteraan merupakan upaya untuk memenuhi hak warga, agar mereka hidup sejahtera dan bermartabat. Prinsip-prinsip peningkatan kesejahteraan berbasis hak adalah: a) memenuhi hak; b) berkeadilan jender; c) inklusif; serta d) melindungi warga miskin dan rentan.
2. Camat dapat memfasilitasi penyelenggaraan terpadu pelayanan dasar dan ekonomi terpadu. Camat dapat memfasilitasi identifikasi kebutuhan dan potensi koordinasi, mengadvokasi terwujudnya koordinasi, memfasilitasi perumusan disain koordinasi, memfasilitasi pelaksanaan koordinasi, serta memfasilitasi monitoring dan evaluasi atas keberhasilan koordinasi
3. Untuk memenuhi hak warga dalam rangka peningkatan kesejahteraan, camat dapat menyusun rencana aksi baik sebagai pedoman untuk rencana pembuatan proposal inovasi atau langsung untuk sebagai acuan dalam menjalankan tugas-tugas di kecamatan.







ISBN 978-623-95507-1-4 (PDF)



9 786239 550714